

**IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
BUMDES
(Studi Kasus BUMDes “ KARYA MULYA” Desa Wonomulyo
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**

SKRIPSI



Oleh

**SHINTA MAULYDIA SARI
NIM: 19520011**

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

**IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
BUMDES
(Studi Kasus BUMDes “ KARYA MULYA” Desa Wonomulyo
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S. Akun)



Oleh

**SHINTA MAULYDIA SARI
NIM: 19520011**

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
BUMDES (Studi Kasus pada BUMDes "KARYA MULYA" Desa
Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh
SHINTA MAULYDIA SARI
NIM : 19520011

Telah Disetujui Pada Tanggal 12 Juni 2023

Dosen Pembimbing,



Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA NIP.
197203222008012005

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES (Studi Kasus BUMDes “ KARYA MULYA” Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh

SHINTA MAULYDIA SARI

NIM : 19520011

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 26 Juni 2023

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1 Ketua Penguji

Dyah Febriantina Istiqomah, M.Sc

NIP. 198702192019032009



2 Anggota Penguji

Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.S.A

NIP. 19751030201608012048



3 Sekretaris Penguji

Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA

NIP. 197203222008012005



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D NIP.

197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shinta Maulydia Sari
NIM : 19520011
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES (Studi Kasus BUMDes "KARYA MULYA" Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) adalah hasil karya saya sendiri bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Mei 2023

Hormat saya,



Shinta Maulydia Sari

NIM: 19520011

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan, hingga kita dapat mengikutinya dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Atas rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES (Studi Kasus BUMDes “KARYA MULYA” Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)” dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak yang terkait. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M Zainuddin. M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Wonomulyo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh mata kuliah skripsi.
4. Ibu Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak.CA selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan, masukan, pengarahan, dan ide sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen jurusan akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar selama perkuliahan sehingga penulis bisa sampai pada titik skripsi ini.
6. Bapak Imam Sutrisno dan Ibu Mislah selaku orang tua penulis yang telah senantiasa memberikan do’a, dukungan, dan semangat sehingga penulis

bisa menyelesaikan skripsi serta Evi Mayang Sari selaku kakak yang senantiasa memberikan bantuan dan saran kepada penulis dalam pengerjaan skripsi.

7. Bapak Tiknu selaku Kepala Desa Wonomulyo serta perangkat desa lainnya yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Mas Hafidz dan Mbak Putri selaku Ketua dan Sekretaris BUMDes “Karya Mulya” Desa Wonomilyo yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Wildan Fauzi Abdillah, seseorang yang telah menemani, menyemangati, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan. Afin, Ardini, Putri, Zukhay, Rizky yang telah memberikan saran serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan seluruh pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan dan keikhlasan hati yang telah banyak tercurah kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang dapat membantu untuk kesempurnaan penulisan. Semoga penulisan skripsi dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin Yarabbalalamin.

Malang, 18 Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan.....	7
1.3.2 Manfaat.....	7
1.4 Batasan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
2.2 Kajian Teoritis	22
2.2.1 Akuntabilitas.....	22
2.2.2 Transparansi.....	27
2.2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	31
2.3 Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Subyek Penelitian	35
3.4 Data dan Jenis Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Analisis Data	40

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.. 43

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	43
4.1.1 Gambaran Umum Desa Wonomulyo	43
4.1.2 Keadaan Ekonomi Desa Wonomulyo.....	45
4.1.3 Visi dan Misi Desa Wonomulyo	47
4.1.4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Wonomulyo .	49
4.1.5 Gambaran Umum BUMdes “Karya Mulya”	49
4.1.6 Visi dan Misi BUMDes “Karya Mulya”	50
4.1.7 Susunan Organisasi Pengelola BUMDes “Karya Mulya”.....	51
4.1.8 Pengelolaan Keuangan BUMDes “Karya Mulya”	51
4.1.9 Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes “Karya Mulya”	60
4.1.10 Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Bumdes “Karya Mulya”	62
4.1.11 Kendala yang Terjadi dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes “Karya Mulya”.....	63
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
4.2.1 Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Bumdes “Karya Mulya”	64
4.2.2 Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Bumdes “Karya Mulya”	68
4.2.3 Kendala yang Terjadi dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes “Karya Mulya”	71

BAB V PENUTUP..... 75

5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2. 2 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya.....	21
Tabel 3. 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	37
Tabel 3. 2 Kriteria Pencapaian Akuntabilitas	42
Tabel 3. 3 Kriteria Pencapaian Transparansi	42
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Wonomulyo Berdasarkan Mata Pencaharian	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Desa wonomulyo	44
Gambar 4. 2 Kantor Desa Wonomulyo	45
Gambar 4. 3 Gambar Susunan Organisasi Pemerintaha Desa Wonomulyo	49
Gambar 4. 4 Gambar Susunan Organisasi Pengelola BUMDes “Karya Mulya” .	51
Gambar 4. 5 Produk Pupuk yang Dijual oleh BUMDes “Karya Mulya”	54
Gambar 4. 6 Bukti Pembelian Pupuk Kepada “Lestari Makmur”	55
Gambar 4. 7 Ruang Rapat BUMDes	56
Gambar 4. 8 Gudang Penyimpanan Pupuk	57
Gambar 4.9 Catatan Hasil Penjualan Pupuk dari Kelompok Tani.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan keuangan BUMDes “Karya Mulya” Unit Pupuk Tahun 2022

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4. Surat Keterangan Bebas Plagiasi

Lampiran 5. Jurnal Bimbingan Skripsi

Lampiran 6. Surat Ijin Penelitian Skripsi

Lampiran 7. Biodata Penulis

ABSTRAK

Maulydia Sari, Shinta. 2023, SKRIPSI. Judul: “Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES (Studi Kasus BUMDes “Karya Mulya” Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

Pembimbing : Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan BUMDes

BUMDes adalah badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa beserta masyarakat. Pendirian BUMDes ini dimaksudkan untuk mengembangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh desa agar pendapatan asli desa tersebut bisa meningkat. Desa Wonomulyo telah mendirikan BUMDes “Karya Mulya” dengan usaha yang telah berjalan yaitu penjualan pupuk bersubsidi. Berdasarkan kegiatan penjualan pupuk tersebut pihak BUMDes telah melakukan pengelolaan keuangan serta melakukan penyusunan laporan keuangan. Namun sampai dengan saat ini masih belum ada bentuk pelaporan keuangan yang dilaksanakan kepada kepala desa selaku penasehat dan kepada BPD selaku pengawas BUMDes. Dengan demikian perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan BUMDes agar dapat memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi serta kendala yang terjadi dalam melakukan pengelolaan keuangan pada BUMDes “Karya Mulya” yang ada di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis melakukan penelitian kualitatif karena penulis ingin mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Subjek dalam penelitian ini yaitu pengelola BUMDes yang terdiri dari ketua dan sekretaris saja karena wakil dan bendahara tidak aktif dalam kepengurusan, perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, dan bendahara, ketua BPD, dan masyarakat Desa Wonomulyo yang tergabung dalam kelompok tani. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya” masih kurang akuntabel akuntabel. Hal ini dapat dilihat bahwa pengelola telah menyusun laporan keuangan hanya saja belum melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada publik. Kedua, pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya” juga masih kurang transparan hal ini dibuktikan dengan tidak adanya akses dokumen yang diberikan kepada publik. Ketiga, kendala yang

dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya” meliputi kurangnya Sumber Daya Manusia, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, dan kurangnya fasilitas yang diberikan oleh pihak Desa.

ABSTRACT

Mauldydia Sari, Shinta. 2023, *THESIS*. Title: "Implementation of the Principles of Accountability and Transparency in BUMDES Financial Management (Case Study of BUMDes "Karya Mulya" Wonomulyo Village, Poncokusumo District, Malang Regency)

Advisor : Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. ca

Keywords : Accountability, Transparency, BUMDes Financial Management

BUMDes is a business entity established and managed by the village government and the community. The establishment of BUMDes is intended to develop the resources and potential of the village so that the village's original income can increase. Wonomulyo Village has established BUMDes "Karya Mulya" with an ongoing business, namely the sale of subsidized fertilizers. Based on the fertilizer sales activities, the BUMDes has carried out financial management and prepared financial reports. In terms of financial management, there are two important aspects to note, namely the aspect of accountability and the aspect of transparency. This is because the source of capital provided to BUMDes comes from village funds. Thus accountability and transparency in BUMDes financial management must be carried out properly so that there are no suspicions from the village community regarding the use of funds and criminal acts of corruption that can harm many parties.

The purpose of this research is to find out how accountability and transparency are implemented and the obstacles that occur in managing finances at BUMDes "Karya Mulya" in Wonomulyo Village, Poncokusumo District, Malang Regency. To achieve this goal, the writer conducted a qualitative research because the writer wanted to describe the facts that happened in the field. The method used is descriptive analysis using a case study approach. The subjects in this study were BUMDes managers consisting of the chairman and secretary only because the deputy and treasurer were not active in management, village officials consisting of the village head, secretary and treasurer, BPD chairman, and the people of Wonomulyo Village who were members of farmer groups. Data collection techniques are carried out through interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out through 4 (four) stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions (verification).

Based on the results of the study, the following conclusions were obtained: first, the implementation of accountability in the financial management of BUMDes "Karya Mulya" is still less accountable. It can be seen that the manager has prepared financial statements, but has not carried out reporting and accountability to the public. Second, the financial management of BUMDes "Karya Mulya" is also still lacking transparency, as evidenced by the absence of

access to documents provided to the public. Third, the obstacles faced in implementing the financial management of BUMDes "Karya Mulya" include lack of Human Resources, low quality of Human Resources, and lack of facilities provided by the Village.

المستخلص

موليديا ساري ، شينتا. 2023 ، أطروحة. العنوان: "تنفيذ مبادئ المساءلة والشفافية في الإدارة المالية ل بومديس (دراسة حالة بومديس "كاريا موليا" قرية ونوماليو ، منطقة بونكوكوسومو ، مالانغ ريجنسي)

: د. نانيك وهيوني ، AK ، M.Si. ، SE. ج

: المساءلة والشفافية والإدارة المالية ل بومديس

المشرف

الكلمات المفتاحية

بومديس هي كيانات تجارية أنشأتها وتديرها حكومة القرية والمجتمع. يهدف إنشاء بومديس إلى تطوير الموارد والإمكانات التي تمتلكها القرية بحيث يمكن زيادة الدخل الأصلي للقرية. أنشأت قرية ونوماليو بومديس "كاريا موليا" مع عمل مستمر ، وهو بيع الأسمدة المدعومة. بناء على أنشطة مبيعات الأسمدة هذه ، قامت بومديس بالإدارة المالية وإعداد البيانات المالية. وفيما يتعلق بالإدارة المالية، هناك جانبان مهمان يجب الاهتمام بهما، وهما جانب المساءلة (المساءلة) وجانب الانفتاح (الشفافية). وذلك لأن مصدر رأس المال المقدم إلى بومديس يأتي من أموال القرية. وبالتالي ، يجب تنفيذ المساءلة والشفافية في الإدارة المالية ل بومديس بشكل صحيح حتى لا يكون هناك شك لدى مجتمع القرية فيما يتعلق باستخدام الأموال وأعمال الفساد الإجرامية التي يمكن أن تضر بالعديد من الأطراف.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية تنفيذ المساءلة والشفافية وكذلك العقوبات التي تحدث في تنفيذ الإدارة المالية في بومديس "كاريا موليا" في قرية ونوماليو ، منطقة بونكوكوسومو ، مالانغ ريجنسي. لتحقيق هذا الهدف ، يقوم المؤلف بإجراء بحث نوعي لأن المؤلف يريد وصف الحقائق التي تحدث في هذا المجال. الطريقة المستخدمة هي التحليل الوصفي باستخدام نهج دراسة الحالة. الموضوعات في هذه الدراسة هي مديري بومديس الذين يتألفون من رؤساء وأمناء فقط لأن الممثلين وأمناء الخزنة ليسوا نشطين في الإدارة ، ومسؤولي القرية الذين يتألفون من رؤساء القرى والأمناء وأمناء الخزنة ورؤساء بي دي ومجتمعات قرية ونوماليو الذين هم أعضاء في مجموعات المزارعين. يتم تنفيذ تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. يتم تحليل البيانات من خلال 4 (أربع) مراحل ، وهي جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات ورسم الاستنتاجات (التحقق).

بناء على نتائج الدراسة ، تم الحصول على الاستنتاجات التالية: أولاً ، لا يزال تنفيذ المساءلة في الإدارة المالية ل بومديس "كاريا موليا" أقل مساءلة. يمكن ملاحظة أن المدير قد أعد البيانات المالية ، لكنه لم يقدّم بإعداد التقارير والمساءلة أمام الجمهور. ثانياً ، لا تزال الإدارة المالية ل بومديس "يعمل موليا" تفتقر أيضاً إلى الشفافية، كما يتضح من عدم الوصول إلى الوثائق المقدمة للجمهور. ثالثاً ، تشمل العقوبات التي تواجه تنفيذ الإدارة المالية ل بومديس "كاريا موليا" نقص الموارد البشرية ، وتدني جودة الموارد البشرية ، ونقص التسهيلات التي تقدمها القرية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan salah satu cabang dari ilmu akuntansi yang memiliki perkembangan pesat, terutama pada era reformasi saat ini. Sehingga pencapaian kinerja pemerintah dituntut untuk bisa akuntabel dan transparan mengenai pengelolaan segala urusan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk urusan mengenai keuangan (Edowai et al, 2021). Dengan adanya pengelolaan tersebut, maka terdapat keharusan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menyediakan informasi mengenai segala kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan dalam jangka waktu satu periode. Dalam akuntansi sektor publik juga perlu dilakukan pemeriksaan oleh pihak pengawas secara efektif dan efisien untuk mencegah potensi terjadinya tindak kecurangan yang dapat merugikan banyak pihak. Pemeriksaan tersebut tidak hanya dilakukan pada pemerintahan tingkat pusat, tetapi juga harus dilaksanakan secara merata sampai dengan pemerintahan tingkat bawah yaitu pemerintahan desa.

Pemerintahan desa adalah bagian dari pemerintahan pusat yang memiliki kedudukan paling bawah. Berdasarkan pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintahan desa yaitu pemerintah desa yang diketuai oleh seorang kepala desa dan dibantu jajaran perangkat desa. Seorang kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan hak atau wewenang secara luas kepada pemerintah desa

untuk mengatur seluruh urusan mengenai desa. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera di tingkat pemerintah desa. Selain itu desa juga merupakan pemerintahan dimana dalam kegiatannya berhubungan secara langsung dengan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang sehingga nantinya diharapkan dapat menyentuh kepentingan masyarakat tersebut secara langsung (Aryanti et al, 2021). Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur sendiri pemerintahan desa atau otonomi desa ini mencakup kebebasan untuk mengatur, mengelola, dan mengoptimalkan segala sumber daya dan potensi yang ada dalam desa termasuk pengelolaan keuangan desa.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan desa dalam hal pengelolaan sumber daya dan potensi yang ada harus mampu melaksanakan konsep *good governance* dengan sungguh-sungguh, termasuk mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa agar dapat memberikan imbal hasil yang memadai (Yuliana & Sartika, 2020). Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan baik karena apabila konsep yang digunakan salah maka akan terjadi bentuk-bentuk kecurangan dan penyelewengan dana yang dapat merugikan banyak pihak bahkan negara. Oleh karena itu pemerintah desa harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dengan baik (Rahajeng, 2020).

Pemerintahan dapat dikatakan baik apabila di dalamnya telah melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*, namun menurut (Suci Setia Ningrum & Hermawan, 2018) dalam hal pengelolaan keuangan terdapat dua aspek yang penting untuk diperhatikan, yaitu aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan aspek keterbukaan (transparansi). Pertama, aspek akuntabilitas secara umum merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan, serta pengawasan atas sumber daya berdasarkan ketentuan yang telah diamanahkan kepada seseorang atau suatu instansi (Mais et al, 2020). Akuntabilitas berdasarkan konteks keuangan pada pemerintahan desa merupakan usaha pemerintah desa untuk menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal keuangan desa. Kedua, aspek tranparansi

secara umum merupakan prinsip dimana terdapat kebebasan bagi pihak yang berkepentingan atau yang membutuhkan untuk mendapatkan serta mengetahui informasi mengenai penyelenggaraan suatu pemerintahan (Mais et al, 2020). Sehingga masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan anggaran atau keuangan desa. Serta untuk memperlihatkan bahwa anggaran tersebut telah digunakan sesuai dengan tujuan kepentingan desa yang telah dirancang sebelumnya. Adanya penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam hal keuangan juga merupakan upaya yang dilakukan untuk menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya terjadinya *fraud* atau penyelewengan dana yang jika di biarkan secara terus menerus akan berujung pada tindak pidana korupsi yang dapat merugikan banyak pihak (Tama et al, 2020). Oleh karena itu diperlukan sebuah laporan keuangan agar setiap penggunaan dana dapat terdeteksi dengan jelas.

Umumnya produk akhir dari kegiatan yang berkaitan dengan keuangan pada suatu entitas baik itu di entitas publik adalah terbentuknya sebuah laporan keuangan (Anas et al, 2021). Pada laporan keuangan publik tidak seharusnya disusun dalam rangka pemenuhan tujuan para pengguna tertentu saja, akan tetapi harus disusun dalam rangka pemenuhan tujuan umum dari berbagai kebutuhan pihak. Hal ini dikarenakan laporan keuangan publik yang dalam hal ini adalah pemerintahan desa merupakan kebutuhan yang dapat digunakan atau diakses oleh masyarakat desa, wakil masyarakat desa (BPD), donatur, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, investor, serta pemerintah di atasnya yaitu pemerintah kabupaten/kota sampai dengan pemerintah pusat (Anas et al, 2021).

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan sumber daya dan potensi agar menambah pendapatan asli desa adalah dengan mendirikan suatu badan usaha yakni Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut dengan BUMDes. BUMDes ini merupakan suatu badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa beserta masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa (Ariski et al, 2022). Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

Tentang Badan Usaha Milik Desa yang dimaksud dengan BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (PP No.11 Tahun 2021). Berdasarkan pasal 213 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa desa diperbolehkan untuk mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDes yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi desa. Tetapi pada kenyataannya masih banyak desa dari berbagai daerah yang masih belum memulai mengembangkan BUMDes, hal ini dikarenakan kurangnya potensi serta kemampuan masyarakat dalam mengelola BUMDes (Qosjim, 2017).

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan BUMDes tentu membutuhkan modal. Salah satu sumber modal yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan BUMDes berasal dari dana desa (Ariski et al, 2022). berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dijelaskan bahwa pada tahun 2022 dana desa digunakan atau diarahkan untuk kegiatan percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa. Dalam hal ini dana desa yang digunakan untuk mengelola BUMDes termasuk dalam kategori untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan BUMDes, terdapat empat komponen yang dapat dijadikan sebagai tumpuan dalam laporan keuangan BUMDes. Empat komponen tersebut yaitu aset, hutang, pendapatan, dan biaya yang dilengkapi dengan bukti transaksi yang sah. Kemudian hal ini dipertegas dengan SAK EMKM yang terdapat tiga dasar yang harus ada pada saat menyusun laporan keuangan. Tiga dasar tersebut yakni dasar akrual,

kelangsungan usaha, dan konsep entitas bisnis. Pada SAK EMKM juga mengharuskan dalam laporan keuangan setidaknya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. BUMDes sendiri dapat dikatakan sebagai golongan yang sesuai dengan SAK EMKM. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes bertujuan untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat desa tidak untuk pemenuhan pribadi (Mahmudah, 2018). Sehingga penyusunan laporan harus dilakukan secara jelas.

Laporan keuangan BUMDes disusun berdasarkan kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Tetapi berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Maslika et al, (2021) mengenai “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tamanharjo Bersinar Kecamatan Singosari Kabupaten Malang” menyatakan bahwa terdapat kendala dalam pengelolaan laporan keuangan. Kendala tersebut terjadi pada proses penyusunan laporan keuangan. Pada proses penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan sangat sederhana. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dari pihak pengelola BUMDes.

Penelitian relevan lainnya yaitu tentang “Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus pada BUMDes Jaya Tirta” juga telah dilakukan oleh (Ariski et al, 2022). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan yang dilakukan di BUMDes Jaya Tirta telah terlaksana secara akuntabel dan transparan. Hal tersebut dibuktikan pada seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban selalu melibatkan masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes “Karya Mulya” yang berada di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Berdasarkan informasi awal yang didapatkan peneliti melalui wawancara singkat dengan Mas Hafidz selaku Ketua BUMDes pada tanggal 2 Januari 2023, dijelaskan

bahwa BUMDes “Karya Mulya” telah berdiri sejak tahun 2021. Awalnya usaha yang diprogramkan antara lain usaha penjualan pupuk bersubsidi, pelayanan air bersih yang layak minum (HIPAM), pengelolaan sampah, penjualan beras, dan pasar desa. Tetapi saat ini usaha yang sudah berjalan hanya usaha penjualan pupuk bersubsidi saja. Sedangkan untuk usaha lainnya masih dalam proses perencanaan ulang. Usaha pupuk tersebut telah berjalan mulai tahun 2022 lalu, namun sejauh ini masih belum ada pelaporan mengenai keuangan kepada Kepala Desa selaku pihak penasehat BUMDes dan BPD selaku pengawas BUMDes. Namun Ketua BUMDes “Karya Mulya” menerangkan bahwa laporan keuangan dari kegiatan pengelolaan keuangan usaha pupuk sudah tersedia. Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti beranggapan perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan BUMDes agar dapat memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Bumdes”. (Studi Kasus BUMDes “KARYA MULYA” Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**. Dengan harapan dapat mengurangi kekhawatiran dan keraguan banyak pihak dalam hal pengelolaan keuangan BUMDes. Penelitian ini tidak hanya fokus pada implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi saja, melainkan terdapat pembahasan mengenai kegiatan dan kendala yang terjadi dalam pengelolaan keuangan usaha pupuk yang ada di BUMDes “Karya Mulya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya”?
2. Bagaimana implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya”?

3. Apa saja kendala yang terjadi dalam pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya”?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya”.
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya”.
3. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya”.

1.3.2 Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai media referensi bagi peneliti dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang menggunakan dasar serta konsep yang sama, yakni mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan serta solusi bagi pihak pengelola BUMDes “Karya Mulya dalam melaksanakan pengelolaan terutama pada pengelolaan keuangan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

1.4 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak keluar dari rumusan masalah maka diperlukan adanya batasan penelitian. Adapun batas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya” yang berada di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

2. Variabel kualitatif yang menjadi acuan pembahasan hanya mengenai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Penelitian yang dilakukan hanya untuk mengetahui implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya” yang berada di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan jurnal dari penelitian terdahulu yang digunakan untuk mendukung temuan penelitian yang akan dilaksanakan. Penulis mengumpulkan beberapa jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ini dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Metode	Hasil Penelitian
1.	Firsttantri Izza Aryanti dan Dessy Putri Andini	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang (2021)	Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan model penelitian interaktif	Pemerintah Desa Panggungrejo juga sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Hal itu dibuktikan dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan indikator akuntabilitas menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017.

2.	Nanda Ayu Ariski dan Muhammad Asim Asy'ari	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Jaya Tirta” (2022)	Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus jenis <i>disciplined comparative</i>	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tiap tahap pada pengelolaan BUMDes Jaya Tirta telah terlaksana secara akuntabel dan transparan. Pada tahap perencanaan akuntabilitas dan transparansi dibuktikan dengan kejelasan dan keterbukaan informasi. Pada tahap pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dibuktikan dengan pengawasan dan pemeriksaan bukti transaksi serta penyusunan laporan pertanggungjawaban walaupun dengan bentuk yang masih sederhana. Kemudian untuk tahap pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi
----	--	---	---	---

				dibuktikan dengan dilaksanakannya forum musyawarah desa dalam rangka pemaparan hasil pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
3.	Ach. Qosjim	Analisis Kinerja BUMDes di Kabupaten Lumajang (<i>Performance Analysis BUMDes in Jember District</i>) (2017)	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif	Hasil dari penelitian ini mencakup tiga poin. Pertama, keberhasilan usaha BUMDes tidak hanya dipengaruhi oleh tata kelola lembaga akan tetapi terdapat kaitan rantai dengan faktor lainnya yang nantinya saling mempengaruhi. Kedua, skala dan jangkauan usaha BUMDes akan akan mempengaruhi keberlanjutan BUMDes tersebut. Ketiga, BUMDes yang terbentuk dari kearifan lokal dan kesadaran sosial akan lebih kuat dan

				berpotensi untuk terus berlanjut daripada BUMDes yang terbentuk dari campur tangan pemerintah di atasnya.
4.	Eka Suci Setia Ningrum dan Sigit Hermawan	Analisis Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dan Kemungkinan Berdirinya BUMDes (2018)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif	Penelitian ini dilakukan di Desa Sumokali. Hasilnya menyatakan bahwa pemerintahan Sumokali sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes yang dibuktikan dengan dilibatkannya BPD dan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan desa. akan tetapi dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan mengenai transparansi yang mana pihak desa tidak terbuka untuk menunjukkan dokumen keuangan

				kepada peneliti dan masyarakat umum. Kemungkinan untuk peluang berdirinya BUMDes di desa ini adalah cukup besar karena di desa ini juga memiliki potensi yang besar.
5.	Rimi Gusliana Mais dan Lini Palindri	Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa (2020)	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana teknik analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman.	hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Suka Damai adalah desa tersebut berusaha mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa. Upaya yang dilakukan dalam perwujudan prinsip akuntabilitas dan transparansi dilakukan dalam bentuk yang berbeda oleh kepala desa, sekretaris desa, dan BPD. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan kepala desa adalah

				dengan menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan desa. begitupun dengan BPD. bentuk pertanggungjawabannya adalah dengan bertindak sebagai pengawas atas pencapaian kinerja pemerintah desa dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa. kemudian untuk upaya penerapan transparansi, kepala desa dan BPD melakukannya dengan cara mengadakan pertemuan warga untuk menyampaikan dan melaporkan kegiatannya. Sedangkan untuk sekretaris desa dengan cara memaparkan informasi keuangan desa pada papan informasi agar dapat
--	--	--	--	--

				dilihat atau dijangkau secara umum serta masih dalam proses mengembangkan situs <i>website</i> desa agar segala informasi mengenai desa dapat dijangkau melalui <i>online</i> .
6.	Putu Surya Adi Tama dan Dewa Gede Wirama	Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (2020)	Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif	Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tumbu. Pada tahap perencanaan ADD pemerintah desa telah melaksanakan prinsip transparansi yang dibuktikan dengan dilaksanakannya Musrenbang desa dan adanya baliho rangkuman APBDes tahun 2018. Pada tahap pelaksanaan ADD juga telah mengupayakan diterapkannya prinsip transparansi dengan cara melibatkan masyarakat pada tiap pelaksanaan program

				ADD. Pada tahap pertanggungjawaban bentuk penerapan transparansi dilakukan dengan cara pelibatan BPD dan delegasi organisasi masyarakat dalam Musdes mengenai LPJ Realisasi APBDes tahun 2018. Prinsip akuntabilitas juga sudah diterapkan dengan cara mengumpulkan seluruh dokumen yang digunakan pada tahap pertanggungjawaban ADD
7.	M. Anas, Rr. Forijati, dan Mochamad Muchson	Pengaruh <i>Good Public Governance</i> (GPG) Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintahan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Good Public Governance</i> (GPG) yang dilihat dari unsur akuntabilitas dan kewajaran berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas informasi

		Desa di Kabupaten Kediri (2021)		laporan keuangan desa di Kabupaten Kediri. Sedangkan dugaan yang mengatakan bahwa demokrasi, transparansi, dan budaya hukum berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Kabupaten Kediri tidak didukung dengan data empiris. Berdasarkan unsur transparansi, pemerintah desa di Kabupaten Kediri belum memberikan informasi yang memadai serta belum mempublikasikan laporan keuangan. Berdasarkan unsur akuntabilitas, perangkat desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya yang dalam pengelolaan dan pelaporan
--	--	--	--	---

				keuangan dengan jujur, terukur, tepat waktu.
8.	Siti Mahmudah	Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: BUMDes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik) (2018)	Metode dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif	Kegiatan BUMDes Desa Sungon Legowo telah berkembang pesat. Laporan keuangan yang disusun pada BUMDes masih sederhana. Isi dari laporan keuangan hanya mengenai catatan pemasukan dan pengeluaran. Untuk sistem pengendalian intern terbilang lemah karena pihak pengelola BUMDes yang memiliki pekerjaan lain.
9.	Ferra Pratiwi Zai, Sahala Purba, dan Arison Nainggolan	Pengaruh Penerapan <i>Good Government Governance</i> dan Kompetensi Sumber Daya	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis statistik	Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa penerapan <i>good government governance</i> dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh

		Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi kasus pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat) (2020)	deskriptif dan regresi linear berganda melalui <i>software</i> SPSS	yang signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan
10.	Atep Hendang Waluya	Akuntansi: Akuntabilitas dan Transparansi dalam QS. Al Baqarah (2): 282-284 (2020)	Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan karena objek yang diteliti adalah bidang kewahyuan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kata Al Hisabah yang merupakan pondasi akuntansi dalam islam terdapat makna dari akuntabilitas dan transparansi. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam QS. Ibrahim (14):41 dan QS. Al Insyiqaq (84). Ayat-ayat tersebut bermakna bahwasanya diakhir kehidupan manusia Allah SWT akan meminta

				pertanggungjawaban tiap manusia atas segala amal dan perbuatan yang telah dilakukan semasa hidup di dunia. Kemudian dalam QS Al-Baqarah ayat 282-284 menerangkan bahwa islam juga ikut serta dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh umat manusia setiap harinya. Tak hanya itu, dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa akuntansi, akuntabilitas, dan transparansi merupakan hal yang dianjurkan Allah SWT.
--	--	--	--	---

Sumber: Diolah penulis

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian kali ini, yaitu:

Tabel 2. 2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Firsttantri Izza Aryanti dan Dessy Putri Andini, 2021, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang	1. Variabel yang digunakan adalah akuntabilitas. 2. Objek yang diteliti adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa.	1. Variabel yang digunakan selain akuntabilitas, juga terdapat variabel transparansi. 2. Objek penelitian adalah pengelolaan keuangan BUMDes.
2.	Nanda Ayu Ariski dan Muhammad Asim Asy'ari, (2022), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa "Jaya Tirta".	1. Variabel yang digunakan adalah akuntabilitas dan transparansi. 2. Metode yang digunakan sama, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 3. Objek yang diteliti sama, yaitu pengelolaan BUMDes	1. Objek yang diteliti lebih fokus yaitu mengenai pengelolaan keuangan BUMDes

3.	Eka Suci Setia Ningrum dan Sigit Hermawan, 2018, Analisis Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dan Kemungkinan Berdirinya BUMDes.	1. Variabel yang digunakan adalah akuntabilitas dan transparansi. 2. Objek penelitian yang digunakan adalah pengelolaan APBDes. 3. Metode penelitian yang digunakan sama, yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif	1. Objek penelitian yang digunakan adalah pengelolaan keuangan BUMDes.
----	--	---	--

Sumber: Diolah Penulis

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Raba (2020:1) memaknai akuntabilitas (*accountability*) sebagai suatu tindakan dalam hal pertanggungjawaban; suatu keadaan yang harus dipertanggungjawabkan atau juga sering diartikan sebagai tanggung gugat.

Pengertian lainya mengenai akuntabilitas juga dikemukakan oleh Edowai et al, (2021:16) yang mengartikan akuntabilitas sebagai suatu bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. bentuk pertanggungjawaban ini dilakukan secara peroidik. Ia juga mengatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban untuk menyajikan, melaporkan, dan

mempertanggungjawabkan berbagai kegiatan terutama dalam hal keuangan sehingga dapat diketahui oleh publik. Adanya kuntabilitas dalam pemerintahan berarti merupakan salah satu ciri bahwa pemerintahan tersebut telah melaksanakan salah satu prinsip dari *good governance*.

Menurut Mardiasmo, (2018:27) akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban yang dimiliki seorang yang diberi amanah untuk dapat mempertanggungjawabkan, menyajikan, dan melaporkan atas kegiatan yang telah diamanahkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pihak yang memberikan amanah tersebut berhak dan berkewajiban untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Sektor Publik”, Mardiasmo membagi akuntabilitas sektor publik menjadi dua jenis, yakni pertama, akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada tingkatan yang lebih tinggi. Misalnya bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten dan seterusnya sampai dengan pemerintah tingkat pusat. Kedua, akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah bentuk pertanggungjawaban yang kepada masyarakat.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban hasil akhir dari pelaksanaan suatu kegiatan yang mana pertanggungjawaban tersebut ditujukan kepada pihak yang berhak mendapatkan informasi pertanggungjawaban dan harus diberi informasi pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks pengelolaan suatu usaha, pelaksanaan pertanggungjawaban dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu aspek moral, strategis, dan etika kebijakan (Rochayatun et al., 2023).

2. Kriteria Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam hal finansial merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan pengelolaan mengenai keuangan publik merupakan salah satu perhatian publik yang diutamakan. Dalam

melaksanakan kegiatan pengelolaan dapat dikatakan akuntabel apabila pada tiap-tiap tahap pengelolaan tersebut telah sesuai dengan kriteria yang digunakan sebagai acuan penilaian. Dalam buku yang ditulis oleh Edowai et al, (2021) disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria akuntabilitas finansial, yakni:

1. Integritas keuangan atau kesesuaian keuangan. Artinya laporan yang dihasilkan harus berisikan kondisi keuangan secara nyata yang sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa ada yang tanpa ada sesuatu yang disembunyikan.
2. Pengungkapan. Pada saat pengungkapan, laporan keuangan harus dapat disajikan sebagai media yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh suatu entitas dalam periode waktu tertentu. Untuk memudahkan pada saat tahap pertanggungjawaban, maka dianjurkan untuk melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi.
3. Ketaatan. Dalam hal ini ketaatan berpacu pada prinsip syariah yang mana dalam tersebut memuat keadilan, kebenaran, dan akuntabilitas.

Akuntabilitas pada BUMDes juga dapat dinilai melalui kriteria yang sebagaimana telah disebutkan oleh Ebrahim, (2003) dalam Ariski et al, (2022) sebagai berikut:

1. Adanya laporan pertanggungjawaban keuangan (*Output*)
Akuntabilitas suatu usaha dapat diukur dengan menggunakan laporan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini dikarenakan di dalam laporan pertanggungjawaban tersebut berisi hasil pengelolaan atas usaha yang telah dilakukan. Kriteria mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 58 tentang pertanggungjawaban BUMDes. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut dijelaskan bahwa pelaksana operasional dari BUMDes diwajibkan menyiapkan laporan

keuangan baik laporan keuangan secara berkala (semesteran maupun laporan keuangan tahunan yang kemudian disampaikan kepada musyawarah desa setelah ditelaah oleh penasehan dan pengawas.

2. Adanya partisipasi masyarakat (proses)

Menurut Ebrahim, (2003) dalam Ariski et al, (2022) partisipasi masyarakat merupakan salah satu kriteria yang sama pentingnya untuk dipelajari lebih lanjut dalam menentukan pengukuran akuntabilitas usaha. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes maka akan meminimalisir tindak kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak pengelola BUMDes tersebut. Kriteria ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 pada Pasal 27 (1-g) yang mana mengatakan bahwa BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain (Masyarakat) guna mengembangkan usaha pada BUMDes.

3. Adanya pengawasan dan pemeriksaan (proses)

Pengawasan dan pemeriksaan merupakan bagian dari proses akuntabilitas. Ebrahim, (2003) dalam Ariski et al, (2022) mengatakan Pasalnya pengawasan dan pemeriksaan ini merupakan sebuah pengukuran akuntabilitas yang bertumpu pada serangkaian kegiatan yang telah dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 31. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pada laporan keuangan BUMDes baik laporan semesteran dan tahunan dilakukan telaah oleh pihak pengawas dan penasehat untuk kemudian diajukan kepada musyawarah desa. Adanya penerapan pengawasan dan pemeriksaan dalam kegiatan yang ada pada BUMDes diharapkan dapat memperkecil tindak kecurangan yang dapat merugikan banyak pihak.

3. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Islam menganggap manusia sebagai khalifah bumi yang dipercayakan dengan tanggungjawab untuk menjaga dan merawat bumi (Asnawi et al., 2020). Kata akuntabilitas bukan hanya bermakna sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang wajar dan jujur. Akan tetapi jika dikaitkan dengan pandangan islam akuntabilitas ini juga memiliki arti kehidupan tersendiri. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT. Dalam konsep islam dijelaskan bahwa alam semesta dan seluruh isinya ini merupakan ciptaan dan milik Allah SWT yang dititipkan kepada manusia untuk bisa digunakan oleh manusia sebagai fasilitas semasa hidup (Prabowo, 2018). Oleh karena itu nantinya umat manusia harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya kepada Allah SAW setelah meninggal dunia.

Akuntabilitas dalam bahasa arab disebut dengan *masuliyyah* (مسؤولية). Kata ini lebih bermakna pada satu akhlak atau perilaku seseorang yang bertanggungjawab atas perkataan dan perbuatan yang telah dilakukan (Waluya, 2020). Marwiyah, (2018) mengatakan bahwa akuntabilitas dan responsibilitas apabila dalam perspektif administrasi publik memiliki arti yang sama dengan amanah. Untuk dapat membentuk perilaku yang amanah maka salah satu unsur yang harus ada pada diri seseorang adalah bertanggungjawab. Beliau juga mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan amanah apabila dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang tersebut. Hal ini telah diterangkan dalam Al-Qur'an, yakni pada surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa : 58)

Akuntabilitas menurut pandang islam memiliki makna mendalam yang lebih dibandingkan dengan akuntabilitas menurut pengertian umum. Hal tersebut dikarenakan akuntabilitas dalam islam tidak hanya berkaitan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak yang berkepentingan lainnya, akan tetapi turut serta melibatkan Tuhan sang maha memiliki segalanya di dalamnya. Dalam hal bisnis atau usaha baik usaha pribadi maupun usaha bersama, pihak-pihak yang melaksanakan juga perlu mendapatkan pemahaman mendasar tentang Islam, yang tidak didasarkan pada penilaian pribadi tetapi masyarakat secara keseluruhan (Ridwan et al., 2019).

2.2.2 Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah bentuk tindakan keterbukaan mengenai informasi pada suatu organisasi yang mana bentuk keterbukaan tersebut berupa ketersediaan informasi dan mudahnya pengaksesan informasi tersebut oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan yang membutuhkan (Pakaya et al., 2019).

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 yang membahas mengenai pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang salah satunya adalah asas transparansi. Dalam hal ini transparansi berarti adanya keterbukaan sehingga masyarakat umum dapat memperoleh informasi mengenai keuangan desa. Dengan begitu informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam hal keuangan

dapat diketahui oleh masyarakat dengan mudah. Adanya transparansi juga dapat digunakan sebagai kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah desa.

Edowai et al, (2021:29) mengartikan transparansi sebagai jalan untuk pihak yang membutuhkan informasi mengenai peraturan, kebijakan, dan informasi lainnya yang dapat dijangkau oleh publik atau dengan arti lain bahwa transparansi dilaksanakan agar kebebasan informasi dapat dipahami dan diawasi. Transparansi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengurangi hal-hal negatif yang kemungkinan bisa terjadi pada suatu organisasi maupun pemerintahan. Misal terjadinya korupsi dan tindak kecurangan lainnya yang jika dibiarkan dapat merugikan banyak pihak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan salah satu prinsip dimana prinsip tersebut menjamin kebebasan bagi pihak yang berkepentingan untuk dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Kriteria Transparansi

Kriteria yang digunakan untuk mengukur suatu organisasi yang dalam hal ini adalah BUMDes, bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh prinsip transparansi diterapkan. Apabila BUMDes dalam melaksanakan pengelolaannya telah sesuai dengan indikator yang ada, maka dapat dikatakan bahwa BUMDes tersebut telah menerapkan salah satu prinsip *good governance* dengan baik. Cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut telah menerapkan prinsip transparansi adalah dengan melakukan pengukuran yang mengacu pada kriteria transparansi. Kristianten, (2006:73)) dalam Pakaya et al, (2019 menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur penerapan trasparansi:

1. Adanya ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Dikatakan transparan apabila dokumen mengenai pengelolaan keuangan BUMDes tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Sebagaimana yang telah tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 59 bahwa laporan keuangan tahunan yang telah dipaparkan pada musyawarah desa dipublikasikan melalui alat media masa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi

Dikatakan transparan apabila dalam suatu kegiatan pengelolaan termasuk mengenai keuangan terdapat berbagai informasi yang jelas dan lengkap. Pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 dikatakan bahwa laporan keuangan semesteran paling sedikit memuat informasi mengenai laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya. Kemudian untuk laporan keuangan tahunan setidaknya memuat informasi mengenai laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya, laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersarna, keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai, kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.

3. Adanya keterbukaan dalam melakukan proses

Terbuka dalam melakukan proses berarti tidak ada yang ditutupi saat kegiatan pengelolaan dilaksanakan. Salah satunya yaitu

dengan keikutsertaan masyarakat luar sehingga bisa mengetahui apa saja yang dilakukan dalam kegiatan pengelolaan keuangan BUMDes. Sama halnya yang telah disebutkan dalam Pasal 27 (1-g) yang mengatakan bahwa BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain (Masyarakat) guna mengembangkan usaha pada BUMDes.

4. Adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Adanya kerangka regulasi bertujuan untuk menjamin bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan terutama mengenai keuangan terdapat peraturan yang mengatur mengenai ketentuan dari pengelolaan keuangan BUMDes. Salah satu regulasi yang mengatur mengenai BUMDes adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Transparansi mengacu pada tersedianya informasi bagi masyarakat umum serta adanya kejelasan mengenai peraturan perundang-undangan dan kepuasan pemerintah (Pakaya et al, 2019). Adapun kriteria yang mendasari hal tersebut menurut (Pakaya et al., 2019) adalah sebagai berikut:

1. Akses pada informasi tersedia secara akurat dan tepat waktu
2. Adanya penyediaan yang jelas tentang prosedur dan biaya
3. Adanya kemudahan dalam mengakses informasi
4. Menyusun suatu tata cara pengaduan apabila terjadi pelanggaran.

3. Transparansi dalam Perspektif Islam

Istilah transparansi dalam bahasa arab adalah Al-Syafafiyah (الشفافية). Dalam transparansi terdapat nilai kejujuran atau keterbukaan setiap informasi yang ada pada sebuah entitas. Hal tersebut sesuai dengan Qur'an Surat Al-Isra' ayat 35, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلٍ

Artinya:

” Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al’Isra’ : 35)

Pelaksanaan transparansi mengenai keuangan publik pada zaman Rasulullah SAW juga telah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar As-Shidiq. (Waluya, 2020) Hal tersebut dibuktikan dalam sebuah riwayat hadis yang artinya berikut:

“Aisyah mengatakan bahwa ketika Abu Bakar As-Shidiq sedang sakit ia berkata, lihatlah apa yang bertambah pada hartaku setelah aku menjadi pemimpin, kirimkanlah harta tersebut kepada khalifah setelahku, lalu kami melihat ada dua hamba sahaya, maka kami mengirimkan kembali kedua hamba sahaya tersebut kepada Umar, lalu Umar menangis dan berkata semoga allah merahmatai Abu Bakar, khilafah yang setelahnya memiliki beban yang sangat berat.”

Berdasarkan cerita singkat diatas, pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa seorang atasan wajib untuk menegakkan transparansi dalam berhubungan dengan orang lain (muamalah) serta dapat memisahkan antara harta pribadi dengan harta yang digunakan untuk kepentingan lainnya. selain itu hikmah dari kisah ini juga menyadarkan kita betapa pentingnya penerapan transparansi keuangan dan hukum yang mnegatur mengenai transparansi mengenai sumber harta yang dimiliki (Waluya, 2020).

2.2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian BUMDes

BUMDes merupakan salah satu badan usaha yang berperan aktif dalam upaya meningkatkan taraf hidup serta perekonomian masyarakat desa (Munir et al., 2021). Sesuai dengan Pasal 1 ayat (21)

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. (Permendagri No. 20 Tahun 2018)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dikatakan bahwa “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. (PP No, 11 Tahun 2021)

Pakaya et al, (2019) mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga dalam pemerintahan desa yang sumber modal serta pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri. Keberadaan BUMDes tidak berjalan begitu saja, akan tetapi BUMDes didirikan dan dikelola sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat sekitar. Karena pada dasarnya tujuan dari BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama dalam hal perekonomian.

Hasan et al, (2018) menyebutkan terdapat tujuh ciri yang membedakan BUMDes dengan lembaga komersil. Adapun ciri-ciri tersebut antara lain:

1. BUMDes dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha BUMDes diperoleh dari desa dan masyarakat. besaran modal dari desa sebesar 51% dan

yang berasal dari masyarakat sebesar 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil)

3. BUMDes dijalankan berdasarkan pedoman bisnis yang sesuai dengan budaya lokal (*local wisdom*)
4. Bidang usaha yang dijalankan dalam BUMDes disesuaikan dengan potensi masing-masing desa dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang didapat dalam BUMDes digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
6. BUMDes diberikan fasilitas oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa
7. Pelaksanaan jalanya BUMDes diawasi oleh beberapa pihak, yakni pemerintah desa, Badan Pemerintahan Desa (BPD), dan anggota.

2. Pengelolaan BUMDes

Pelaksanaan usaha pada BUMDes membutuhkan literasi keuangan untuk dapat mengelola sumber dayanya agar dapat bertahan dan mencapai keunggulan kompetitif (Soetjipto et al., 2023). Upaya yang dapat dilakukan untuk menunjang dibentuknya BUMDes adalah dengan melakukan pengelolaan secara tepat serta memiliki komitmen yang jelas untuk kedepannya. Sesuai yang telah dikatakan oleh Hasan et al. (2021) bahwa untuk menjalankan usaha yang etis maka diperlukan komitmen. Umumnya proses pengelolaan BUMDes diawali dan akhiri dengan melakukan forum musyawarah desa. Menurut Ariski et al, (2022) dalam pengelolaan BUMDes terdapat 3 (tiga) tahap, yakni:

1. Tahap perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan menentukan hal-hal yang akan dilakukan atau dicapai kedepannya dengan memprediksi

keadaan dimasa yang akan datang agar mendapat hasil yang maksimal Ariski et al, 2022). Pada umumnya kegiatan perencanaan BUMDes dilaksanakan melalui forum musyawarah desa. hal ini dikarenakan musyawarah desa merupakan forum tertinggi dalam BUMDes (PP No. 11 Tahun 2021). Pada tahap perencanaan, pihak pengelola diharuskan menyusun dokumen terkait perencanaan serta hal-hal lain yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Dokumen awal yang harus dipersiapkan dalam perencanaan ini antara lain dokumen mengenai anggaran keuangan, prediksi laba rugi, sumber modal, jangka waktu pelaksanaan program kerja, dan lain-lain. Selain itu dokumen dalam proses perencanaan juga memuat mengenai analisis kelayakan investasi yang di dalamnya terdapat perhitungan *net present value*, *payback periode*, *profitability index*, dan *internal rate of return* (Widodo et al, 2021)

2. Tahap pelaksanaan

Ariski et al, (2022) mengatakan pelaksanaan adalah bentuk tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun sebelumnya sehingga kemudian dapat diimplementasikan. Pelaksanaan ini juga dapat disebut dengan penerapan. Pada pelaksanaan ini dana yang dianggarkan atau yang sebelumnya telah direncanakan harus diatur seefektif dan seefisien mungkin serta berpacu pada peraturan dan standar operasional yang ada. Dengan begitu maka tujuan BUMDes dapat terlaksana dengan tepat (Suharyono, 2020).

3. Tahap pertanggungjawaban

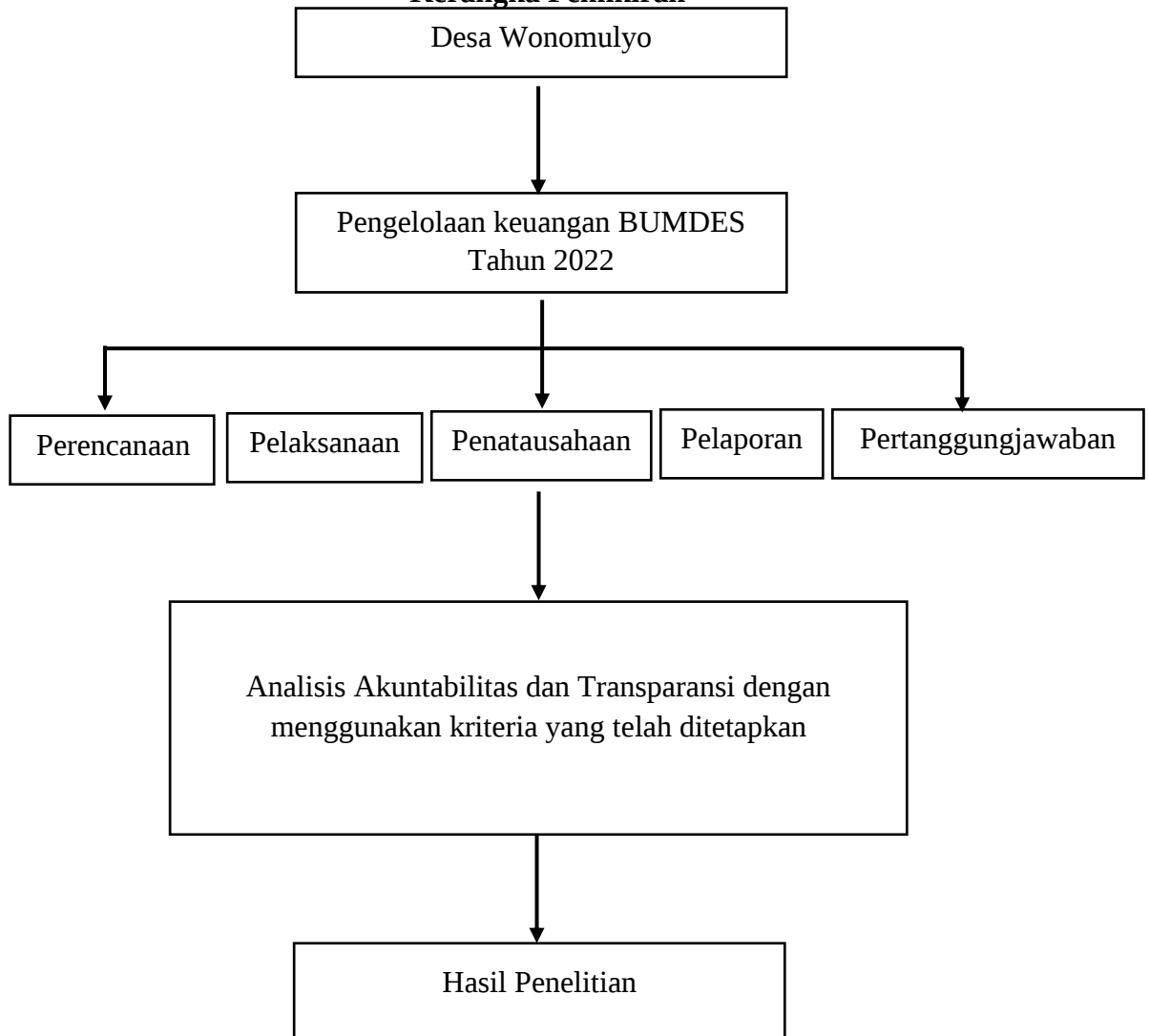
Dalam pembahasan mengenai pelaporan dan akuntansi, pertanggungjawaban memiliki tujuan yakni untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi (Widodo et al. 2021). Secara umum pertanggungjawaban merupakan gambaran dari hasil

kegiatan yang telah dikerjakan. Dalam hal pengelolaan BUMDes pertanggungjawaban merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh pengurus BUMDes untuk mempertanggungjawabkan atau mengakuntabilitaskan sumber daya yang dimiliki dan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BUMDes. Bentuk pertanggungjawaban oleh pengurus BUMDes yakni dalam bentuk laporan yang disusun secara lengkap, baik mengenai laporan keuangan maupun laporan kinerja.

2.3 Kerangka Berfikir

Menurut (Darmalaksana, 2020) kerangka berpikir merupakan hubungan antar konsep yang ada dalam penelitian hingga menjadi sebuah bangunan berpikir. Dalam penelitian ini yang judul Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes “Karya Mulya” Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang), kerangka berpikir yang disusun adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: (Wahyu, 2018)

Berdasarkan latar belakang, kajian teori, dan kerangka berpikir yang telah disusun dapat dijelaskan bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya” yang mana pengelolaan tersebut dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Anggito et al, (2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang sumber datanya berbentuk kata-kata atau gambar yang memiliki makna tertentu, sehingga tidak menekan pada sumber data berupa angka. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan fakta yang telah terjadi di lapangan. Kemudian untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menyelidiki kegiatan yang tidak terlepas dari konteks sosial (Prihatsanti et al., 2018). Pendekatan ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman mengenai pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes “Karya Mulya” yang ada di Desa Wonomulyo.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor BUMDes “Karya Mulya” yang beralamat di Jalan Sangadi No.1 Dusun Wates, Desa Wonomulyo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

3.3 Subyek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah informan yang terlibat secara langsung dalam hal pengelolaan BUMDes serta dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan BUMdes. Adapun pihak yang akan menjadi subyek dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengelola BUMDes “Karya Mulya” yang terdiri dari ketua dan sekretaris. Dari anggota pengelola BUMDes hanya memilih ketua dan sekretaris untuk dijadikan informan dalam penelitian ini karena pihak lainnya yaitu wakil ketua dan bendahara sudah tidak aktif dalam kepengurusan sejak tahun 2022 lalu. Sehingga tidak ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan dan tidak dapat dimintai keterangan.

2. Perangkat Desa Wonomulyo yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa.
3. Salah satu anggota dari BPD, yakni ketua BPD Desa Wonomulyo
4. Masyarakat Desa Wonomulyo yang menerima manfaat dari adanya BUMDes, yaitu para petani yang tergabung dalam kelompok tani karena usaha yang saat ini sudah berjalan yaitu penjualan pupuk bersubsidi. Subjek penelitian dari petani nantinya akan dipilih secara acak berjumlah tiga orang untuk dimintai informasi.

3.4 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber secara langsung. Dalam penelitian ini data primer didapat melalui hasil wawancara dengan informan yang berhubungan atau terlibat dalam hal pengelolaan BUMDes di Desa Wonomulyo dan observasi kondisi di lapangan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan kumpulan informasi yang telah ada sebelumnya yang selanjutnya digunakan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data pada penelitian berikutnya. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan BUMDes Desa Wonomulyo tahun periode 2022 dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan keuangan BUMDes tahun 2022.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan melakukan wawancara bersama informan, observasi lapangan, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara yang akan digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur, dimana sebelum melakukan wawancara dengan informan

terpilih peneliti terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan secara urut mengenai permasalahan yang akan diteliti. Kemudian agar hasil wawancara tidak hilang atau lupa, peneliti menggunakan beberapa alat yakni buku catatan untuk mencatat poin-poin hasil wawancara, recorder untuk merekam semua percakapan atau pembicara, dan kamera untuk memotret pada saat peneliti melakukan pembicaraan dengan informan. Ini bertujuan untuk menyakinkan bahwasanya peneliti benar-benar melakukan pengumpulan data. (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang berhubungan serta dianggap dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya” yang ada di Desa Wonomulyo. Informan tersebut diantaranya Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, Kepala Desa Wonomulyo, Sekretaris Desa Wonomulyo, Bendahara Desa Wonomulyo, Ketua BPD, dan petani yang tergabung dalam kelompok tani berjumlah tiga orang yang dipilih secara acak. Berikut daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara dengan informan:

Tabel 3. 1
Daftar Pertanyaan Wawancara

Narasumber	Pertanyaan
Ketua BUMDes, sekretaris BUMDes, kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD,	1. Kapan mulai berdiri BUMDes di Desa Wonomulyo ini? 2. Bagaimana awal mula / hal apa yang mendasari didirikannya BUMDes ini? 3. Jenis usaha apa saja yang dijalankan? 4. Mengapa memilih usaha tersebut sebagai program usaha pada BUMDes? 5. Apa tugas anda sebagai pihak yang berperan atau berhubungan dengan pengelolaan BUMDes? 6. Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan pada tiap unit usaha?

	7. Berapa besar dana yang diberikan oleh desa untuk menjalankan kegiatan usaha pada BUMDes dan berapa besar dana yang dialokasikan pada tiap unit usaha BUMDes periode tahun 2022? 8. Apakah tiap unit usaha telah memiliki pembukuan atas catatan transaksi dan laporan keuangan selama menjalankan usaha pada tahun 2022? 9. Apakah laporan keuangan BUMDes periode tahun 2022 telah diserahkan kepada pihak desa? jika sudah kapan laporan tersebut diserahkan? 10. Dari manakah BUMDes mendapatkan pupuk yang kemudian dijual kembali kepada para petani? 11. Berapa harga beli pupuk yang didapatkan oleh BUMDes dan berapakah harga jual pupuk yang ditetapkan BUMDes kepada para petani? 12. Apakah tiap unit usaha BUMDes memiliki gedung/tempat untuk menjalankan kegiatan usahanya? 13. Sebagai penanggung jawab langkah apa yang anda lakukan apabila terdapat keterlambatan penyeteroran laporan keuangan BUMDes? 14. Sebagai penanggungjawab langkah apa yang anda lakukan apabila terdapat ketidaksesuaian dana pada laporan keuangan? 15. Dalam melakukan perencanaan kegiatan apakah dilaksanakn melalui musyawarah bersama? 16. Siapa sajakah pihak yang dilibatkan dalam kegiatan musyawarah? 17. Apakah terdapat kegiatan pertemuan dalam
--	---

	pemaparan laporan pertanggungjawaban kegiatan pada periode tahun 2022? 18. Siapa sajakah pihak-pihak yang hadir/terlibat dalam pertemuan tersebut? 19. Apakah dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes telah sesuai dengan standar akuntansi yang ada? 20. Apakah laporan keuangan BUMDes boleh diakses secara umum? 21. Siapa sajakah pihak yang boleh mengakses laporan keuangan BUMDes?
Kelompok Tani	1. Manfaat apa yang anda terima dari adanya penjualan pupuk bersubsidi pada BUMDes? 2. Menurut anda harga yang ditawarkan di BUMDes lebih mahal/lebih murah dari harga umum dipasaran? 3. Berapakah nominal uang yang anda keluarkan untuk membeli produk pupuk di BUMDes? 4. Apakah produk yang dijual pada BUMDes memiliki kualitas yang baik? 5. Apakah anda puas dengan pelayanan dan produk yang ada dapatkan di BUMDes?

Sumber: Diolah Penulis

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi di lapangan dan dokumen yang diteliti, yakni laporan keuangan BUMDes periode tahun 2022, kuitansi pembayaran pupuk, dan catatan hasil penjualan pupuk.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah memperoleh dokumen berupa data tertulis maupun gambar yang berkaitan dengan keuangan BUMDes “Karya Mulya”.

3.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian kualitatif akan berhubungan dengan proses pengumpulan data dan analisis data (Sarosa, 2021). Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Sarosa, (2021) teknik tersebut terdapat 4 (empat) tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berikut uraian teknik analisis data tersebut:

1. Pengumpulan data

Langkah awal dalam melakukan analisis data adalah mengumpulkan data-data yang akan digunakan baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari hasil wawancara dengan informan yang berhubungan langsung mengenai pengelolaan keuangan BUMDes, hasil observasi dari dokumen yang diteliti, dan dokumentasi yang berhubungan dengan keuangan BUMDes periode 2022 yang ada di Desa Wonomulyo.

2. Reduksi data

Langkah kedua yang dilakukan peneliti dalam analisis data adalah mereduksi data. Reduksi data adalah proses menyederhanakan atau meringkas data-data yang telah didapatkan sebelumnya agar menjadi bentuk yang lebih simpel dan mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan cara mengategorikan data-data yang ada. Pengategorian tersebut dibuat berdasarkan variabel yang akan diteliti, yakni data mengenai akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan BUMDes. Setelah melakukan pengategorian maka data yang dirasa tidak penting dapat dihilangkan. Dengan begitu maka peneliti

dapat lebih fokus pada data-data yang penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

3. Penyajian / penampilan data

Langkah ketiga yang dilakukan peneliti adalah menyajikan atau menampilkan data. Ini merupakan tahap penyatuan dari data-data yang telah direduksi atau disederhanakan sebelumnya. Data tersebut baik yang berasal dari wawancara dan lainnya akan dituangkan ke dalam uraian yang berbentuk teks. Dengan melakukan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi serta dapat merencanakan langkah selanjutnya yang harus dikerjakan sesuai dengan yang telah dipahami. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan memaparkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah ada. Selanjutnya data-data tersebut disesuaikan dengan kriteria dari akuntabilitas dan transparansi yang telah ditentukan.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat dijadikan sebagai temuan baru yang sebelumnya mungkin masih belum ada. Pembaruan ini dapat berupa deskripsi dari objek yang sebelumnya masih terdapat keraguan. Dalam melakukan penarikan kesimpulan, data yang telah tersaji dikaitkan dengan dasar yang digunakan sebagai acuan untuk menyimpulkan pengelolaan BUMDes agar dapat dikatakan akuntabel dan transparan. Kriteria yang akan digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pada BUMDes akan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2
Kriteria Pencapaian Akuntabilitas

Variabel	Kriteria
Akuntabilitas	1. Adanya laporan pertanggungjawaban keuangan
	2. Adanya partisipasi masyarakat
	3. Adanya pengawasan dan pemeriksaan

Sumber: Ayu Ariski et al (2022) dalam Ebrahim (2003).

Tabel 3. 3
Kriteria Pencapaian Transparansi

Variabel	Kriteria
Transparansi	1. Adanya ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
	2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi.
	3. Adanya keterbukaan dalam melakukan proses.
	4. Adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Sumber: Pakaya et al, (2019) dalam Kristianten (2006:73).

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Wonomulyo

Secara Astronomis, Desa Wonomulyo terletak pada posisi 8° 2' 22.9" (8.0397°) Lintang Selatan dan 112° 45' 45.4" (112.7626°) Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 500 - 642 meter di atas permukaan air laut. Jarak tempuh ke ibu kota kabupaten Malang adalah sekitar +- 25 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 50-60 menit. Desa Wonomulyo terdiri dari lahan terbangun (415 Ha) dan lahan tidak terbangun (159,5 Ha). Dengan kelengkapan fasilitas sarana yang mencukupi untuk kebutuhan desa yang terdiri dari sarana kesehatan (1 Puskesmas Poncokusumo), Sarana Pendidikan (SD, SMP, SMK), sarana peribadatan (musholla dan masjid), sarana olahraga, sertasarana perdagangan dan Jasa.

Secara administratif, Desa Wonomulyo terletak di wilayah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan posisi yang dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga yaitu:

- Sebelah Utara : Desa Belung
- Sebelah Timur : Desa Wonorejo
- Sebelah Selatan : Desa Karangnongko
- Sebelah Barat : Desa Argosuko

Jarak tempuh Desa Wonomulyo ke ibu kota kecamatan adalah 0 km, karena Desa Wonomulyo merupakan ibu kota kecamatan Poncokusumo. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 19 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 60 menit.

Gambar 4. 1
Peta Wilayah Desa Wonomulyo



(Sumber: Data Profile Desa Tahun 2019)

Desa Wonomulyo terdiri dari dua Dukuh yakni Dukuh Wates dan Dukuh Robyong. Berdasarkan cerita rakyat pada masa dahulu sebelum bernama Desa Wonomulyo, dahulu masing-masing Dukuh mempunyai cerita sejarah sendiri-sendiri. Dukuh Wates sejarahnya ada kaitannya dengan Desa Belung dan Kerajaan Singosari yang mana pada jaman dahulu terjadi pertempuran dimana Desa Belung yang artinya tulang merupakan tempat yang sangat menakutkan dan mengerikan. Disana terdapat banyak mayat bergelimpangan, tulang belulang korban peperangan berserakan dimana-mana, sehingga dinamakan Belung dan Wates. Dukuh Wates merupakan batas pertahanan sehingga dinamakan Wates. Pemberian kedua nama Desa ini Sangat berkaitan keberadaanya dan sekarang Wates dan Robyong di jadikan nama dusun. Pemberian Nama Desa Wonomulyo pun dikaitkan dengan keberadaan sejarah hutan, yang mana pada jaman dahulu dipercayai bahwa hutan Dukuh Wates dan hutan Robyong merupakan hutan yang membawa kemulyaan bagi masyarakat.

Gambar 4. 2
Kantor Desa Wonomulyo



Sumber: Diolah Penulis

4.1.2 Keadaan Ekonomi Desa Wonomulyo

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Wonomulyo sangat mendukung dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Meskipun memiliki letak geografis yang kurang strategis, namun dengan ditetapkannya bromo tengger semeru sebagai kawasan pariwisata maka desa Wonomulyo memiliki potensi ekonomi pariwisata yang menjanjikan. Sehingga bisa menambah peluang bisnis serta pendapatan masyarakat desa Wonomulyo itu sendiri.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Sumber Pendapatan Desa antara lain:

1. Sumber Pendapatan Desa

- a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah

- b. Dana Desa yang bersumber dari APBN
 - c. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional
 - d. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa
 - e. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah
 - f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui rekening kas desa
 3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah. Adapun Kekayaan desa terdiri dari:
 - a. Tanah kas desa
 - b. Bangunan desa yang dikelola desa
 - c. Kekayaan milik desa lainnya

Mata pencaharian penduduk di Desa Wonomulyo sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk Desa Wonomulyo Berdasarkan Mata
Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1	Wiraswasta	698	
2	Petani	1.226	
3	Wiraswasta	698	
4	Pegawai Swasta	506	
5	Pedagang	788	
6	Buruh	409	
7	Ibu Rumah Tangga	703	
8	Pegawai Negeri Sipil	108	
9	TNI dan Polri	12	
10	Pensiunan dan Purnawirawan	11	
11	Guru/Dosen	27	
12	Dokter dan Tenaga Medis	7	
13	Pelajar/Mahasiswa	654	
14	Lain-lain	64	
		6.169	

(Sumber: Data Profile Desa Tahun 2019)

4.1.3 Visi dan Misi Desa Wonomulyo

Visi:

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Desa Wonomulyo harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Desa Wonomulyo memiliki visi yang dirumuskan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Wonomulyo dan implementasiannya dituangkan dalam Misi yang merupakan rumusan langkah – langkah pencapaiannya. Untuk itulah pemerintah Desa Wonomulyo dalam mencapai cita-citanya memiliki Visi:

**“Terwujudnya Desa Wonomulyo yang Damai, Demokratis,
Agamis, Mandiri, Sejahtera Dan Selangkah Lebih Maju.”**

Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

Misi:

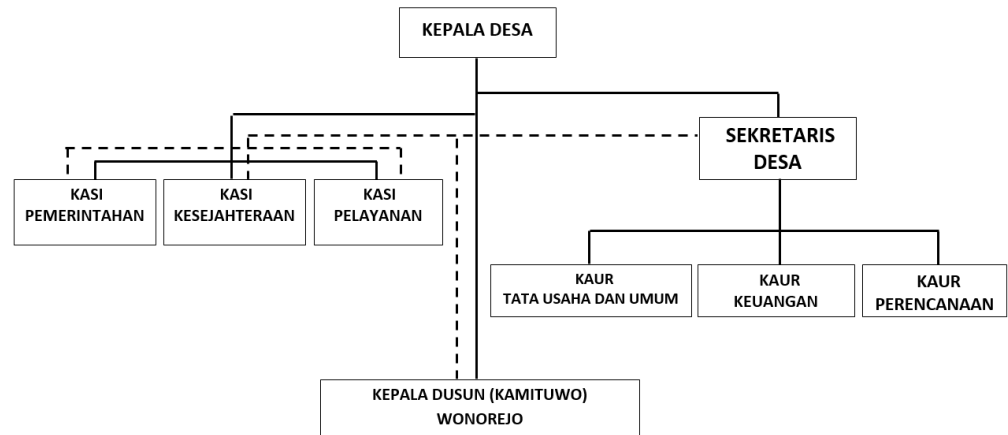
Misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa 5 (lima) tahun.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Bermasyarakat
2. Terwujudnya Pelayanan Pemerintah yang cepat dan transparan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Meningkatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkelanjutan dan efisien
4. Terwujudnya Masyarakat yang sehat melalui partisipasi masyarakat
5. Meningkatkan dan Mengembangkan Perekonomian Masyarakat

4.1.4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Wonomulyo

Gambar 4. 3
Gambar Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Wonomulyo



Sumber: Data Profile Desa Tahun 2019

4.1.5 Gambaran Umum BUMdes “Karya Mulya”

BUMDes “Karya Mulya” didirikan di Desa Wonomulyo mulai November tahun 2021. Pembentukan BUMDes ini didasari oleh adanya Peraturan Desa (Perdes) Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pendirian BUMDes dan Pengesahan Anggaran Dasar BUMDes, sebagai pijakan dalam mengoperasikan BUMDes, serta mengganti kepengurusan BUMDes yang baru. Selain itu hal lain yang mendasari didirikannya BUMDes di Desa Wonomulyo adalah belum adanya Pendapatan Asli Desa (PAD) yang masuk ke desa. Sehingga dengan didirikannya BUMDes diharapkan dapat mengelola dan menjalankan usaha-usaha desa yang nantinya dapat menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) di tahun-tahun berikutnya, serta dapat menata perekonomian desa Wonomulyo agar bisa lebih maju dan sejahtera.

Jenis usaha BUMDes yang diprogramkan pada awal dirikan antara lain usaha penjualan pupuk bersubsidi, sembako, air minum, pengelolaan sampah, dan ruko. Akan tetapi sampai tahun 2023 ini usaha yang sudah berjalan hanya penjualan pupuk bersubsidi yang berjalan pada tahun 2022 dan usaha penjualan sembako berupa beras

yang mulai berjalan pada tahun 2023. Untuk jenis usaha lain masih dalam tahap pembangunan dan perencanaan ulang.

Alasan dipilihnya usaha penjualan pupuk bersubsidi sebagai usaha yang dijalankan oleh BUMDes “Karya Mulya” karena hampir 90% masyarakat Desa Wonomulyo bermata pencaharian sebagai petani dan para petani tersebut mengeluhkan ketersediaan pupuk. Oleh karena itu Desa Wonomulyo mengadakan program untuk pengadaan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani Desa Wonomulyo agar mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih murah.

4.1.6 Visi dan Misi BUMDes “Karya Mulya”

Visi:

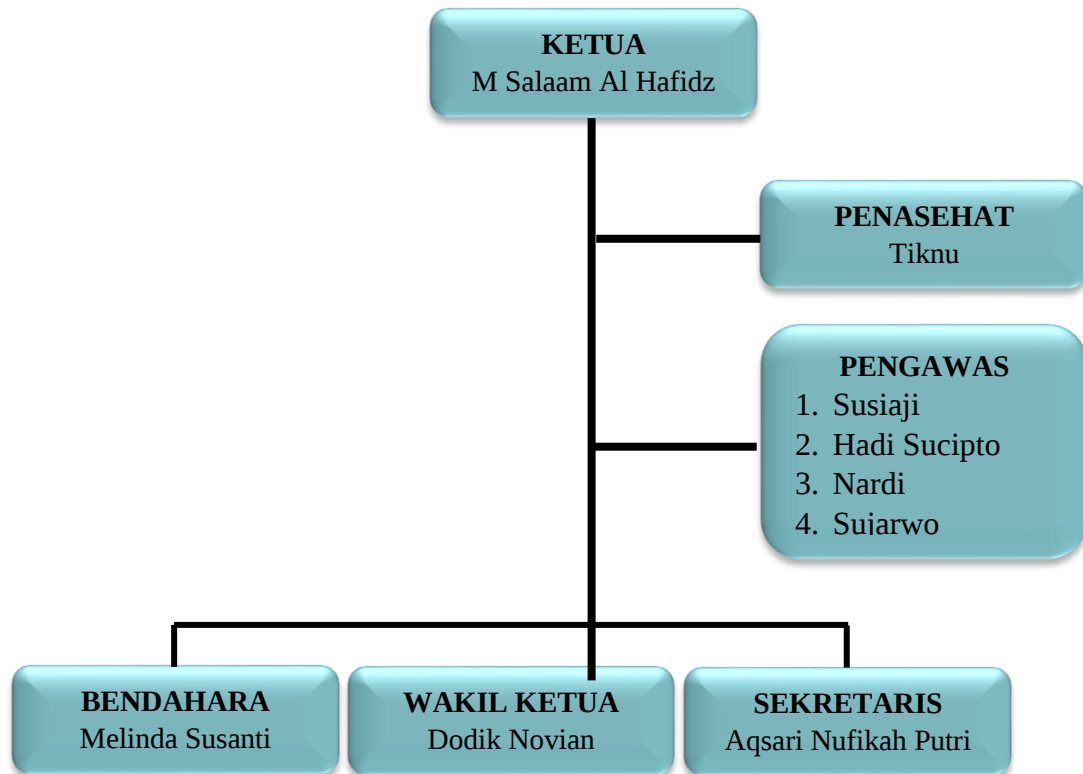
Menjadikan BUMDes “Karya Mulya” sebagai badan usaha tingkat desa yang mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Wonomulyo

Misi:

1. Mengolah dan memanfaatkan potensi desa untuk mencapai kesejahteraan bersama
2. Menggandeng dan memberi fasilitas kepada kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas
3. Bekerjasama dengan pihak lain untuk membantu pencapaian tujuan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
4. Pemanfaatan teknologi untuk membantu produktivitas masyarakat
5. Menjunjung ekonomi kecil dan menengah untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa

4.1.7 Susunan Organisasi Pengelola BUMDes “Karya Mulya”

Gambar 4. 4
Gambar Susunan Organisasi Pengelola BUMDes “Karya Mulya”



Sumber: Diolah Penulis

4.1.8 Pengelolaan Keuangan BUMDes “Karya Mulya”

Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ada pada BUMDes “Karya Mulya” terdiri dari lima tahap, yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Tahap awal dalam menjalankan suatu usaha adalah melakukan perencanaan. Kegiatan perencanaan dalam rangka menjalankan usaha BUMDes tidak dilakukan oleh pihak BUMDes sendiri, melainkan perencanaan tersebut dilakukan oleh pihak desa. Hal ini karena terdapat program desa untuk melakukan bantuan pengadaan pupuk dan kerja sama dengan para kelompok tani di Desa Wonomulyo. Sehingga pemerintah desa menunjuk BUMDes sebagai jembatan yang membantu antara pihak desa dengan pihak

kelompok tani dalam menjalankan usaha penjualan pupuk bersubsidi kepada para kelompok tani. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Mas Hafidz selaku ketua BUMDes “Karya Mulya”, yaitu:

“Jadi perencanaan itu yang merencanakan bukan dari BUMDes tapi yang merencanakan adalah pihak desa untuk mengadakan bantuan pengadaan pupuk, sifatnya itu bantuan dan juga kerja sama”. (Wawancara tanggal 5 April 2023)

Mengenai perencanaan keuangan, kepala desa menyerahkan kepada pihak kelompok tani untuk melakukan perhitungan segala bentuk kebutuhan dana yang akan dibutuhkan. Misalnya jumlah pupuk yang dibutuhkan, dana yang dibutuhkan untuk penebusan pupuk, dan biaya operasional lainnya. Dana yang diberikan oleh pihak desa kepada BUMDes untuk menjalankan usaha pupuk ini sebesar Rp 50.000.000. Kemudian dana tersebut digunakan sebagai permodalan bagi kelompok tani untuk melakukan penebusan pupuk. Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Mbak Putri selaku sekretaris BUMDes “Karya Mulya”, yaitu:

“Yang merencanakan keuangannya kan beliau (kepala desa) bahwa ada program seperti ini tolong dihitung kebutuhannya berapa nah itu kan nantinya yang menghitung dari pihak kelompok tani. kemudian kelompok tani mengajukan sekian. Selanjutnya yang menyetujui, menentukan pencairan dana, dan yang mencairkan dana itu ya dari pihak desa sendiri. Lalu desa memberikan pencairan dana tersebut kepada BUMDes sebagai pihak yang selanjutnya akan menjalankan usaha”. (Wawancara Tanggal 11 April 2023)

Berkaitan dengan pencairan dana desa sebesar Rp 50.000.00 yang digunakan untuk permodalan usaha penjualan pupuk pada BUMDes juga dibenarkan oleh sekretaris desa sebagai pihak yang mengurus pencairan dana desa. sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Mantri selaku Sekretaris Desa Wonomulyo, yaitu:

“Sebetulnya peran utama perangkat desa hanya mensupport BUMdes, tidak boleh ikut campur di dalamnya. Kalau saya sebagai bendahara ini mengurus dalam hal anggaran. Untuk tahun 2022 kemarin dana yang dianggarkan dan dicairkan untuk BUMDes itu Rp 50.000.000”. (Wawancara Tanggal 11 April)

2. Tahap pelaksanaan

Tahap kedua adalah pelaksanaan. Pada tahap ini yang menjalankan adalah pihak BUMDes “Karya Mulya” sendiri. Dana yang telah dicairkan oleh pihak desa sebesar Rp 50.000.000 diserahkan kepada pihak BUMDes. Selanjutnya dana tersebut digunakan untuk membayar pupuk ke pihak penyedia pupuk yang ada di Desa wonomulyo, yaitu koperasi “Lestari Makmur”. Adapun jenis pupuk yang diadakan terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu ZA, Urea, Phonska, dan SP dan setiap penjualan per karung pupuk, BUMDes mengambil keuntungan sebesar Rp 5.000. Dari besaran dana Rp 50.000.000 tersebut yang digunakan untuk pembayaran pupuk ke pihak Lestari Makmur sebesar Rp 40.000.000. Untuk sisa sebesar Rp 10.000.000 digunakan sebagai biaya operasional. Seperti yang telah diungkapkan oleh Mas Hafidz selaku ketua BUMDes “Karya Mulya”, yaitu:

“Desa sudah mencairkan dan menyerahkan uang itu kepada BUMDes, lalu BUMDes membayarkan ke “Lestari Makmur” sebagai penyedia pupuk. Kemudian untuk jumlah yang dibayarkan untuk pupuk itu Rp 40.000.000. Sedangkan Rp 10.000.000 itu awalnya akan digunakan untuk pembukaan rekening di bank Jatim. Tapi tidak jadi akhirnya dialih fungsikan untuk dana operasional”. (Wawancara Tanggal 5 April 2023)

Gambar 4. 5
Produk Pupuk yang dijual oleh BUMDes “Karya Mulya”



Sumber: Diolah Penulis

Gambar 4. 6
Bukti pembelian pupuk kepada “Lestari Makmur”

Perkiraan	URAIAN	Jumlah
Urea	15 ton. * 24.500.000	90.000.000
ZA	10 ton. * 17.000.000	
Ponskha	15 ton. * 35.200.000	
SP	5 ton. * 12.300.000	
101.050.000		

Terbilang: 40.000.000

CATATAN: Pembukuan Mengetahui K. Penerima

KOPERASI USAHA MANDIRI
“LESTARI MAKMUR”
Jl. Raya Wonomulyo No. 44 Telp. (0341) 787473
Kec. Poncokusumo

Nota No. :

Tanggal : 24 - Mei - 2022

Nama : MARGOMULYO I

Alamat : WONOMULYO

Pembelian Pupuk :

1. UREA	= 20 Kw x Rp. 230.000 = Rp. 4.600.000
2. Z. A.	= Kw x Rp. = Rp.
3. PONSKHA	= 90 Kw x Rp. 235.000 = Rp. 21.150.000
4. SUPER PHOS	= Kw x Rp. = Rp.
5. PETROGANIK	= Kw x Rp. = Rp.
6. NPK	= Kw x Rp. = Rp.
JUMLAH	= 25.750.000

Pembeli : *[Signature]* Kasir : *[Signature]*

Sumber: Diolah Penulis

Selama usaha penjualan pupuk bersubsidi ini berjalan, BUMDes tidak memiliki kantor serta gudang. Pada saat mengadakan rapat atau pertemuan internal menggunakan salah satu ruangan yang ada di kantor desa. Kemudian untuk penyimpanan pupuk, BUMDes menyewa gudang milik kelompok tani yang berada di Dusun Robyong. Pupuk yang dipesan dari “Lestari Makmur” langsung dikirim menuju gudang. Sehingga kegiatan transaksi pembelian pupuk juga dilakukan di gudang tersebut.

Nantinya ketua kelompok tani lah yang akan menyetorkan uang hasil penjualan pupuk kepada pihak BUMDes. Sebagaimana pula yang telah diungkapkan oleh Bapak Endro selaku masyarakat Desa Wonomulyo yang menjadi Ketua Kelompok Tani, yaitu:

“Sebagai ketua sekaligus perwakilan dari teman-teman kelompok tani saya bertugas untuk mencatat transaksi dan memegang uang hasil penjualan. Ketika uang sudah lengkap, baru saya setorkan kepada BUMDes beserta catatannya. Karena biasanya itu ada teman-teman dari kelompok tani yang mengambil barangnya dulu kemudian pembayarannya dicicil.”
(Wawancara Tanggal 6 April 2023)

Gambar 4. 7
Ruang Rapat BUMDes



Sumber: Diolah Penulis

Gambar 4. 8
Gudang Penyimpanan Pupuk



Sumber: Diolah Penulis

Adanya usaha penjualan pupuk bersubsidi ini memiliki manfaat dan kekurangan bagi para anggota kelompok tani. Manfaat yang diterima oleh kelompok tani adalah mereka sedikit terbantu dengan adanya harga subsidi yang diterapkan. Namun disisi lain terdapat kekurangan, yaitu dalam hal pembatasan jumlah pembelian pupuk. Pembatasan tersebut sesuai dengan ukuran luas lahan pertanian yang dimiliki oleh tiap petani. Untuk luas lahan $\frac{1}{4}$ Ha mendapatkan jatah pupuk sebanyak 300 Kg. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Juwanan selaku masyarakat Desa Wonomulyo yang tergabung dalam anggota Kelompok Tani, yaitu:

“Petani menjadi terbantu dengan adanya harga subsidi ini walaupun tidak banyak. Tapi kalau menurut saya mungkin masih banyak kekurangan di waktu tahun 2022 lalu itu. Dalam pembelian pupuk petani dibatasi jumlahnya sesuai dengan luas lahan. Jadi sesuai RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) masing-masing petani”. (Wawancara Tanggal 6 April 2023)

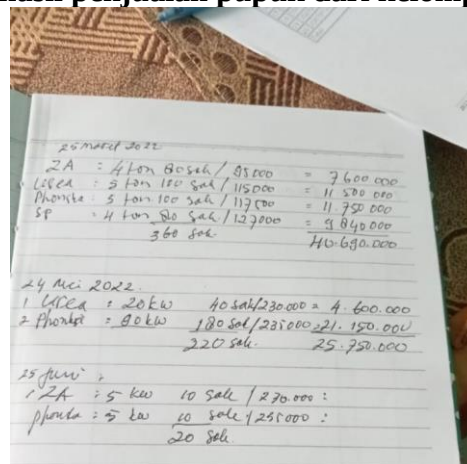
3. Tahap penatausahaan

Tahap ketiga dalam kegiatan pengelolaan keuangan BUMDes adalah penatausahaan. Pada BUMDes “Karya Mulya” kegiatan penatausahaan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak BUMDes sendiri dan perwakilan dari pihak kelompok tani. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Mbak Putri selaku Sekretaris BUMDes yang bertugas melakukan pencatatan keuangan usaha pupuk, yaitu:

“Yang menata usaha pupuk ini dari kelompok tani. Kalau pencatatan-pencatatan mengenai transaksi jual belinya, harga pupuknya itu kelompok tani yang tau. Tapi kalau pencatatan pembuatan laporan keuangannya secara global itu kita dari BUMDes yang buat”. (Wawancara Tanggal 11 April 2023)

Pihak yang ditunjuk dari perwakilan kelompok tani untuk melakukan pencatatan atas usaha pupuk adalah ketua kelompok tani. Pencatatan yang dilakukan adalah waktu terjadinya transaksi, jumlah pupuk yang terjual, dan pendapatan yang diperoleh. Pencatatan tersebut masih dilakukan dengan sangat sederhana. Pihak kelompok tani hanya melakukan pencatatan tersebut pada lembaran kertas seperti pada gambar berikut:

Gambar 4.9
catatan hasil penjualan pupuk dari kelompok tani



Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa kegiatan transaksi dari penjualan pupuk bersubsidi terjadi sebanyak 3 kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan maret, mei, dan Juni dengan total perolehan hasil penjualan berturut-turut sebesar Rp 40.690.000, Rp 25.750.000, dan Rp 2.325.000. Untuk masing-masing jenis pupuk memiliki harga jual yang berbeda. Pupuk jenis Urea dijual seharga Rp115.000/kantong, Phonska Rp 117.500/kantong, SP Rp 127.000/kantong, dan ZA Rp 95.000/kantong. Tetapi pada bulan mei dan juni pupuk jenis ZA ini mengalami peningkatan harga menjadi Rp 115.000/kantong.

Pihak BUMDes yang bertugas melakukan pencatatan laporan keuangan seharusnya adalah bendahara BUMDes. Tetapi dikarenakan bendahara tidak aktif dalam kepengurusan BUMDes maka tugas tersebut diambil alih oleh sekretaris. Kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh pihak BUMDes yaitu pencatatan mengenai keuangan selama kelangsungan usaha secara lebih terperinci menggunakan aplikasi excel. Mulai dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas, dan buku pembantu.

4. Tahap pelaporan

Tahap keempat pada kegiatan pengelolaan keuangan BUMDes adalah pelaporan. Dalam pelaksanaannya BUMDes “Karya Mulya” telah melakukan penyusunan laporan keuangan di akhir tahun berdasarkan kegiatan usaha yang telah dijalankan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Mbak Putri selaku sekretaris BUMDes, yaitu:

“kalau saya pribadi ditanya mengenai laporanya gimana? Ya saya jawab kalau laporanya ada. Hanya saja BUMDes masih belum diberikan wadah oleh desa untuk melaporkan secara resmi pada forum yang resmi seperti MUSDES mengenai laporannya BUMDes. Tapi kalau seandainya ada masyarakat yang bertanya ya saya jawab”. (Wawancara Tanggal 11 April 2023)

Berdasarkan ketentuan yang ada pelaksanaan pelaporan keuangan seharusnya dilakukan secara tahunan atau 1 (satu) tahun sekali di akhir tahun dan semesteran atau tiap 6 (enam) bulan sekali. Pihak yang diundang untuk menghadiri pelaporan pada kurun 6 (enam) bulan sekali antara lain kepala desa, sekretaris desa dan pengawas (BPD). Dalam hal ini tokoh masyarakat tidak turut hadir karena undangan untuk tokoh masyarakat tersebut dilakukan pada saat pertemuan MUSDES. Namun pada kenyataannya Desa Wonomulyo pada tahun 2022 masih belum melaksanakan pertemuan musyawarah desa (MUSDES).

5. Tahap pertanggungjawaban

Tahap terakhir dalam kegiatan pengelolaan adalah pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis BUMDes “Karya Mulya” sejauh ini masih belum memberikan tindakan pertanggungjawaban secara tertulis atau dalam bentuk fisik kepada pihak desa (kepala desa) selaku pihak yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan usaha penjualan pupuk bersubsidi dan BPD selaku perwakilan dari masyarakat desa Wonomulyo.

4.1.9 Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes “Karya Mulya”

Menurut hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan di lapangan, BUMDes “Karya Mulya” telah menyusun laporan keuangan dari usaha penjualan pupuk bersubsidi yang telah dijalankan pada tahun 2022. Terdapat dua macam laporan, yaitu laporan yang ditulis oleh kelompok tani secara sederhana mengenai hasil penjualan pupuk tahun 2022 dan laporan keuangan yang disusun oleh sekretaris BUMDes secara lebih terperinci menggunakan aplikasi excel. Aplikasi tersebut merupakan pemberian dari STAN sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes. Namun

sejauh ini meskipun laporan keuangan telah dibuat dan siap untuk di laporkan, pihak BUMDes masih belum memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Baik kepada pihak desa (kepala desa) selaku pihak yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan usaha penjualan pupuk bersubsidi maupun BPD selaku perwakilan dari masyarakat Desa Wonomulyo. Hal tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Tiknu selaku Kepala Desa Wonomulyo yaitu:

“Kalau untuk laporan keuangan BUMDes itu sudah ada katanya. Tapi sementara ini masih belum diserahkan kepada saya bentuk fisiknya. Kalau pada waktu rapat hanya sudah dilaporkan dalam setahun pendapatannya sekian, labanya sekian sudah cuma itu saja”. (Wawancara Tanggal 11 April 2023)

Berdasarkan keterangan dari pihak BPD juga dikatakan bahwa masih belum ada laporan keuangan secara tertulis yang diberikan oleh pihak BUMDes sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan dana desa untuk usaha penjualan pupuk. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Susiaji selaku Ketua BPD Desa Wonomulyo, yaitu:

“Belum ada laporan keuangan yang diberikan kepada saya. Cuma dengar saja sudah dilaporkan tapi secara tertulisnya masih belum. Saya sebagai pengawas akan saya tanyakan terus bentuk laporan tertulisnya. Jadi kemarin itu hanya ngomong-ngomong saja.” (Wawancara Tanggal 13 April 2023)

Hal senada juga di benarkan oleh Mas Hafidz selaku ketua dari BUMDes “Karya Mulya”, yaitu:

“Laporan keuangan tahun 2022 itu sudah ada. Hanya saja BUMDes sampai saat ini masih belum diberikan wadah dan kesempatan untuk memaparkan laporanya kepada pihak desa dan masyarakat secara umum. Pemaparan tersebut hanya bisa dilakukan pada saat desa mengadakan musyawarah desa (MUSDES). Jadi kemarin hanya dipaparkan pada saat rapat internal dengan para pengelola BUMDes dan pihak desa yang dihadiri oleh kepala desa sekretaris desa, dan ketua BPD itupun hanya secara singkat tidak secara terperinci.” (Wawancara Tanggal 5 April 2023)

4.1.10 Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Bumdes “Karya Mulya”

Dokumentasi dari kegiatan pengelolaan keuangan BUMDes meliputi surat perjanjian, dokumen transaksi berupa faktur, catatan sederhana dari kelompok tani, dan laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes. Dokumen tersebut saat ini masih belum bisa diakses secara umum, hanya bisa diakses secara internal oleh pihak yang termasuk dalam struktural BUMDes saja. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Mas Hafidz selaku Ketua BUMDes “Karya Mulya”, yaitu:

“Untuk dokumen masalah keuangan BUMDes kalau diakses secara umum masih belum bisa. Saat ini akses hanya untuk internal saja yang termasuk dalam struktural BUMDes. Dan yang memegang dokumen-dokumen itu Mbak Putri (Sekretaris BUMDes)”. (Wawancara Tanggal 5 April 2023)

Berdasarkan keterangan dari sekretaris desa juga bahwa mengenai keterbukaan dan kebebasan akses dokumen BUMDes tidak dapat dilakukan secara umum. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Ryan selaku Sekretaris Desa Wonomulyo, yaitu:

“Kalau dokumen BUMDes kan ibarat BUMDes itu perusahaan yang berada dibawah naungan desa tetapi berdiri sendiri. Jadi tidak mungkin masalah keuangan perusahaan dipublikasikan secara umum. Tapi kalau misal ada keperluan seseorang untuk melakukan penelitian mungkin bisa dengan persetujuan teman-teman dari struktural BUMDes”. (Wawancara Tanggal 11 April 2023)

Keterangan lainnya juga disampaikan oleh anggota Kelompok Tani Desa Wonomulyo bahwa pada tahun 2022 sampai dengan saat ini anggota Kelompok Tani masih belum mendapatkan undangan dalam rangka musyawarah desa (MUSDES) sehingga yang diketahui oleh kelompok tani mengenai keuangan hasil usaha penjualan pupuk hanya catatan sederhana yang dibuat oleh kelompok Tani. Seperti yang telah disampaikan Bapak Dodik selaku masyarakat Desa Wonomulyo yang tergabung dalam anggota Kelompok Tani, yaitu:

“Masalah keuangan yang secara mendetail itu saya sendiri kurang paham. Karena yang saya ketahui hanya catatan yang ada di kelompok tani sendiri.” (Wawancara Tanggal 6 April 2023)

4.1.11 Kendala yang Terjadi dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes “Karya Mulya”

Adanya kendala dalam pengelolaan keuangan pada BUMDes “Karya Mulya” menjadikan kegiatan pengelolaan keuangan tersebut tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Kendala tersebut terjadi karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan tugas. Pada BUMDes “Karya Mulya terdapat keanggotaan inti yaitu ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Tetapi pada kenyataannya anggota yang ikut serta dalam pengelolaan keuangan usaha penjualan pupuk bersubsidi mulai dari pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban hanya ketua dan sekretaris saja. Wakil ketua dan bendahara yang seharusnya memegang peranan penting dalam hal keuangan justru tidak ikut aktif. Sehingga tugas dari wakil dan bendahara tersebut dikerjakan oleh ketua dan sekretaris, termasuk mengenai keuangan. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mas Hafidz selaku Ketua BUMDes “Karya Mulya, yaitu:

“Saya disini sebagai ketua BUMDes jadi saya ikut mengurus semua urusan. Apalagi sekarang kita cuma dua orang saja dengan Mbak Putri karena wakil sama bendaharanya sudah lama tidak aktif di BUMDes ini jadi kita saling membantu satu sama lain.” (Wawancara Tanggal 5 April 2023)

Hal senada juga diungkapkan oleh Mbak Putri selaku Sekretaris BUMDes “Karya Mulya”, yaitu:

“Sebenarnya kita dari pihak pengelola BUMDes tahun 2022 itu ada empat orang ada bendahara dan wakil ketuanya juga. Tapi yang dua orang ini (wakil dan bendahara) tidak aktif. Jadi ya saya sama ketua memegang semua peranan. Untuk masalah internal operasional itu mungkin saya yang lebih berperan. Sedangkan untuk masalah eksternal itu ketuanya.” (Wawancara Tanggal 11 Maret 2023)

Selain kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan pengelolaan keuangan BUMDes dan ketidaksesuaian antara jobdesk dengan pihak yang menjalankan, kurangnya kemampuan pihak pengelola keuangan BUMDes mengenai akuntansi juga menjadi kendala. Kendala tersebut terletak pada kurangnya pemahaman peletakan tiap akun pada saldo normal yang sesuai dengan ketentuan. Meski telah mendapat bimbingan dari kunjungan STAN mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan BUMDes dan penggunaan *software* dengan benar, namun pihak yang menyusun terkadang masih menemukan kesulitan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Putri selaku Sekretaris BUMDes yang menyusun laporan keuangan, yaitu:

“Saya membuat laporan keuangannya itu sudah berdasarkan aplikasi yang diberi dan dibimbing orang STAN. Tapi karena saya juga tidak mempunyai basic akuntansi jadi saya sendiri terkadang juga masih bingung dalam melakukan penyusunan laporan keuangannya.” (Wawancara Tanggal 11 April 2023)

Hal lainnya yang menjadi kendala adalah sampai dengan periode selanjutnya (2023), pemerintah Desa Wonomulyo masih belum mengadakan pertemuan musyawarah desa (MUSDES) secara resmi. Sehingga pihak BUMDes sendiri tidak memiliki wadah untuk memaparkan pertanggungjawaban keuangan kepada publik.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Bumdes “Karya Mulya”

4.2.1.1 Adanya Laporan Pertanggungjawaban

Tahun 2022 merupakan tahun pertama BUMDes “Karya Mulya” menjalankan usaha. Usaha yang dijalankan adalah penjualan pupuk bersubsidi. Penjualan pupuk tersebut tidak untuk umum, melainkan hanya untuk para petani Desa Wonomulyo yang tergabung dalam keanggotaan kelompok tani. Pada saat menjalankan usaha, BUMDes beserta pihak desa dan kelompok tani melakukan

kerja sama dalam hal pengelolaan, termasuk mengenai keuangannya. Kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan Pasal 4 PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa pengelolaan BUMDes dilaksanakan dengan prinsip profesional, terbuka dan tanggungjawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan.

Akuntabilitas menurut PP Nomor 11 tahun 2021 merupakan tindakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan BUMDes kepada masyarakat Desa karena BUMDes adalah bagian dari badan usaha yang dimiliki oleh Desa. BUMDes “Karya Mulya” melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan kegiatan penjualan pupuk yang telah terjadi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa yang telah diberikan oleh desa kepada BUMDes. Pernyataan ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ayu Ariski et al (2022) dalam Ebrahim (2003) bahwa pengukuran akuntabilitas salah satunya dapat dilihat dari adanya laporan pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah dijalankan. Berdasarkan Pasal 27 (2c) PP Nomor 11 Tahun 2021 juga dijelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan BUMDes tersebut ditujukan kepada penasehat dan pengawas. Pihak yang menjadi penasehat adalah kepala desa dan yang menjadi pengawas adalah BPD. Kemudian pada pasal 58 juga dijelaskan bahwa pelaksana operasional dari BUMDes diwajibkan menyiapkan laporan keuangan baik laporan keuangan secara berkala (semesteran maupun laporan keuangan tahunan yang kemudian disampaikan kepada musyawarah desa setelah ditelaah oleh penasehan dan pengawas. Tetapi berdasarkan keadaan nyata di lapangan, BUMDes “Karya Mulya” sejauh ini masih belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban

mengenai keuangan tersebut kepada penasehat dan pengawas, baik dalam bentuk fisik maupun *softfie* serta belum melaksanakan musyawarah desa. Pihak BUMDes hanya memaparkan pengeluaran, pendapatan hasil penjualan, dan laba yang didapatkan pada saat rapat internal.

4.2.1.2 Adanya Partisipasi Masyarakat

Menurut Ayu Ariski et al (2022) dalam Ebrahim (2003) adanya partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu ukuran dari suatu kegiatan telah terlaksana secara akuntabel. Hal ini telah sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi pada pelaksanaan usaha penjualan pupuk bersubsidi. BUMdes “Karya Mulya” dalam menjalankan usahanya bekerja sama dengan masyarakat Desa Wonomulyo yang tergabung dalam keanggotaan kelompok tani. Tugas dari kelompok tani tersebut antara lain mendata luas lahan tiap anggota, melakukan pencatatan kebutuhan dana yang akan digunakan untuk usaha, dan melakukan penjualan kepada para anggota. Sedangkan tugas dari BUMDes adalah sebagai jembatan antara pihak desa dengan kelompok tani. BUMDes membantu pengadaan pupuk dan melakukan pencatatan mengenai keuangan secara lebih terperinci dengan menggunakan aplikasi excel agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Namun di akhir pelaksanaan usaha, kelompok tani tidak mengetahui laporan keuangan yang telah dibuat oleh BUMDes. Yang diketahui hanyalah catatan sederhana dari pihak kelompok tani sendiri pada saat penjualan. Hal ini disebabkan masih belum adanya kesempatan BUMDes untuk memaparkan laporan pertanggungjawaban mengenai keuangan secara umum. Karena BUMDes berada di bawah naungan desa, maka hanya bisa memaparkan secara umum pada saat musyawarah desa (MUSDES) di akhir tahun saja bersamaan dengan pemaparan hal-hal lainnya oleh pemerintah desa. Pernyataan ini sesuai dengan Pasal 27 (1) G yang mana mengatakan bahwa BUMDes dapat melakukan kerjasama

dengan pihak lain (Masyarakat) guna mengembangkan usaha pada BUMDes. Selain itu pasal 27 (2d) PP Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatakan bahwa laporan tahunan (termasuk laporan keuangan) dari pelaksanaan usaha BUMDes diajukan kepada musyawarah desa setelah diperiksa oleh penasehat dan pengawas. Sejauh ini BUMDes melakukan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada pertemuan internal dengan pihak struktural BUMDes sendiri yang juga dihadiri oleh pengawas dan penasihat.

4.2.1.3 Adanya Pengawasan dan Pemeriksaan

Pengukuran lainnya mengenai akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan usaha BUMDes menurut Ayu Ariski et al (2022) dalam Ebrahim (2003) adalah adanya pengawasan dan pemeriksaan. Hal ini juga sesuai dengan yang telah di jelaskan pada Pasal 31 PP Nomor 11 Tahun 2021. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat 3 (tiga) ayat yang menjelaskan mengenai pemeriksaan laporan keuangan dari pelaksanaan pengelolaan usaha. Pertama dijelaskan pada pasal 31 (2d), yaitu bahwa laporan keuangan semesteran yang telah dibuat, dilakukan pemeriksaan oleh pelaksana operasional untuk selanjutnya diajukan kepada penasehat. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 31 (2f), yaitu laporan keuangan tahunan yang telah dibuat atas pelaksanaan pengelolaan usaha diperiksa bersama dengan penasehat dan pelaksana operasional sebelum diajukan kepada musyawarah desa. Lalu yang terakhir pada pasal 31 (2g), yaitu laporan keuangan dari pelaksanaan pengelolaan usaha diperiksa oleh penasihat untuk diajukan kepada musyawarah desa. Namun berdasarkan pelaksanaan nyata, BUMDes “Karya Mulya” belum menyerahkan laporan keuangan dari pelaksanaan usaha pupuk kepada penasehat maupun pengawas. Sehingga penasehat dan pengawas pun tidak bisa melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan dari pengelolaan usaha pupuk

Dengan demikian penulis menilai bahwa pelaksanaan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya” dalam menjalankan pengelolaan usaha penjualan pupuk bersubsidi masih kurang akuntabel. Hal ini dikarenakan belum adanya laporan keuangan yang diberikan oleh BUMDes “Karya Mulya” kepada kepala desa selaku penasehat dan BPD selaku pengawas pelaksanaan pengelolaan keuangan usaha penjualan pupuk bersubsidi ini serta kepada masyarakat umum. Sehingga tidak terjadi pengawasan dan pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemerintah Desa Wonomulyo sebaiknya segera melakukan Musyawarah Desa (MUSDES) sebagai wadah untuk BUMDes “Karya Mulya” bisa melakukan pelaporan keuangan kepada publik.

4.2.2 Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Bumdes “Karya Mulya”

4.2.2.1 Adanya Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Transparansi atau keterbukaan menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 adalah penyelenggaraan pengelolaan usaha BUMDes dapat dipantau atau diketahui oleh masyarakat Desa, termasuk mengenai keuangan. Pakaya et al, (2019) dalam Kristianten (2006:73) mengatakan bahwa suatu kegiatan dapat dikatakan transparan apabila memenuhi 4 (empat) poin. Pertama, ketersediaan dan aksesibilitas dokumen. hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 59 bahwa laporan keuangan tahunan yang telah dipaparkan pada musyawarah desa dipublikasikan melalui alat media masa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa. Selama menjalankan pengelolaan usaha penjualan pupuk bersubsidi, BUMDes “Karya Mulya” memiliki dokumen mengenai keuangan yang terdiri dari kwitansi pembayaran pupuk dari “Iestari Makmur” (pihak penyedia pupuk), catatan hasil penjualan dari kelompok tani, dan laporan keuangan yang telah dibuat oleh sekretaris BUMdes.

Untuk catatan hasil penjualan dari kelompok tani berwujud sangat sederhana karena hanya berbentuk catatan pada satu lembar kertas, sedangkan untuk laporan yang dibuat oleh sekretaris BUMDes sudah dalam bentuk aplikasi dan lebih terperinci. Berdasarkan keterangan yang didapat peneliti bahwa bagi pihak yang membutuhkan atau ingin mengakses data serta dokumen mengenai keuangan dapat melalui ketua atau sekretaris BUMdes “Karya Mulya”. Namun tidak untuk umum, akan tetapi hanya bagi pihak yang berkepentingan saja.

4.2.2.2 Adanya Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Kedua, adanya kelengkapan dan kejelasan informasi. Pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 dikatakan bahwa laporan keuangan semesteran paling sedikit memuat informasi mengenai laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya. Kemudian untuk laporan keuangan tahunan setidaknya memuat informasi mengenai laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya, laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersarna, keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai, kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir. Berdasarkan kondisi nyata, terdapat dokumen yang masih belum lengkap. BUMDes “Karya Mulya” dalam melaksanakan penjualan pupuk telah melakukan transaksi pengadaan pupuk kepada “Lestari Makmur” (penyedia pupuk) sebanyak 3 kali. Tetapi bukti transaksi yang tersedia hanya ada 2 kwitansi. Selain itu

dokumen laporan keuangan dalam bentuk cetak (*hardfile*) juga masih belum tersedia. Sehingga ketersediaan laporan keuangan hanya dalam bentuk *softfile* saja.

4.2.2.3 Adanya Keterbukaan dalam Melakukan Proses

Ketiga, adanya keterbukaan dalam melakukan proses. Artinya dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BUMdes tidak ada hal-hal yang ditutupi baik dari pihak desa dan BUMDes. Hal ini dikarenakan kerja sama yang baik ditandai dengan sistem komunikasi yang teratur, terbuka, dan jelas (Handayati et al., 2020). Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 27 (1) G yang mengatakan bahwa BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain (Masyarakat) guna mengembangkan usaha pada BUMDes. Kegiatan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan telah dilaksanakan secara terbuka. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan masyarakat Desa Wonomulyo yaitu para kelompok tani karena mereka lah yang melaksanakan penjualan kepada anggota kelompok lainnya, sehingga mereka mengetahui besaran dana keluar yang digunakan untuk melakukan penebusan kepada pihak penyedia pupuk (Lestrai Makmur) dan besaran hasil penjualan pupuk tersebut. Namun dalam kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban kelompok tani ini tidak ikut serta di dalamnya, hanya anggota struktural BUMDes saja hadir dalam rapat internal. Berdasarkan keterangan yang didapat penulis, kelompok tani akan diundang dalam pertemuan besar pada saat musawarah desa bersamaan dengan para tokoh masyarakat lainnya untuk melaporkan dan memaparkan pengelolaan BUMdes yang telah dilakukan. Tetapi pada kenyataannya sampai dengan saat ini musyawarah desa masih belum dilaksanakan.

4.2.2.4 Adanya Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

Keempat, adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Kerangka regulasi ini diperlukan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya” agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang yang dapat merugikan banyak pihak. Adapun regulasi yang menjamin transparansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya” yaitu Pasal 4 PP Nomor 11 Tahun 2021. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan BUMDes, pengelolaan BUMDes tersebut harus dilaksanakan secara semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan prinsip profesional, keterbukaan dan tanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan.

Dengan demikian peneliti menilai bahwa pengelolaan keuangan usaha penjualan pupuk bersubsidi pada BUMdes “Karya Mulya” masih kurang menerapkan prinsip transparansi. Hal ini dibuktikan masih belum sesuainya kriteria pertama dan kedua dengan keadaan nyata dilapangan. Masih belum ada keterbukaan laporan pertanggungjawaban keuangan dari kegiatan pengelolaan usaha penjualan pupuk serta sedikit keterbatasan pihak luar dalam mengakses informasi mengenai keuangan BUMDes. Seharusnya hal tersebut boleh saja dilakukan karena keuangan BUMDes berasal dari dana desa. selain itu juga aga kepercayaan masyarakat Desa Wonomulyo kepada pihak pengelola BUMDes dan pihak desa tidak menurun.

4.2.3 Kendala yang Terjadi dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes “Karya Mulya”

Menuju suatu keberhasilan dalam usaha, penting untuk melakukan identifikasi berbagai faktor yang dapat berpengaruh pada usaha tersebut (Mohamed et al., 2019). Pengelola BUMDes “Karya

Mulya” selalu berupaya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara baik, akuntabel, dan transparan. Namun pada kenyataannya upaya tersebut masih belum terwujud. Terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya”, yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan pengelolaan

Struktur organisasi merupakan salah satu faktor utama dalam membangun sistem pengendalian secara keseluruhan dalam menjalankan seluruh kegiatan organisasi (Wahyuni & Triatmanto, 2020). Berdasarkan temuan peneliti, jumlah anggota dari struktural BUMDes “Karya Mulya” yang ikut serta dalam melaksanakan pengelolaan keuangan usaha pupuk terbilang cukup kurang. Seharusnya struktural BUMDes terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Namun faktanya wakil ketua dan bendahara yang seharusnya menjadi pihak terpenting untuk mengurus keuangan BUMDes justru tidak aktif dalam kepengurusan sehingga yang menjalankan pengelolaan keuangan hanya ketua dan sekretaris BUMDes.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ketidakikutsertaan wakil ketua dan bendahara dalam pengelolaan keuangan BUMDes ini berdampak pada tidak maksimalnya hasil yang didapatkan. Hal ini dikarenakan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh wakil dan bendahara juga menjadi tugas ketua dan sekretaris. Di sisi lain ketua dan sekretaris juga telah memiliki tugas masing-masing. Sehingga tugas ketua dan wakil semakin menumpuk. Namun keberadaan kelompok tani dalam pengelolaan usaha penjualan pupuk bersubsidi juga dapat membantu meringankan tugas BUMDes mengenai pelaksanaan penjualan dan pencatatan hasil penjualan.

Dengan demikian agar dalam menjalankan usaha selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan maksimal, BUMDes “Karya Mulya” perlu melengkapi kekosongan posisi tersebut. Namun upaya yang sejauh ini telah dilakukan oleh ketua dan sekretaris BUMDes “Karya Mulya” selaku pihak yang melaksanakan pengelolaan keuangan adalah saling membantu dan membagi tugas. Untuk ketua BUMDes lebih menangani kegiatan yang berhubungan dengan masalah eksternal. Misalnya melakukan pertemuan dengan kelompok tani, mengunjungi koperasi untuk melakukan pengadaan pupuk, dan lain-lain. Sedangkan sekretaris BUMDes sebaliknya, lebih menangani kegiatan yang berhubungan dengan masalah internal. Misalnya mengumpulkan dan menyimpan dokumen penting, menyusun laporan keuangan, dan melakukan pencatatan.

2. Kurangnya kualitas Sumber daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengelolaan keuangan

Berdasarkan temuan peneliti, kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi salah satu kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya”. Faktanya sekretaris BUMDes “Karya Mulya” sebagai pihak yang melakukan penyusunan laporan keuangan masih sering mengalami kesulitan dalam melakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi yang ada. Hal ini dikarenakan sekretaris BUMDes tersebut tidak memiliki kemampuan dasar akuntansi sebelumnya. Selain itu dari pihak kelompok tani yang melakukan pencatatan hasil penjualan juga tidak memiliki kemampuan akuntansi sehingga hasil pencatatannya pun juga masih sangat sederhana.

Dengan demikian BUMDes “Karya Mulya” telah melakukan upaya, yaitu dengan mempelajari penggunaan aplikasi excel yang telah diberikan oleh STAN untuk melakukan penyusunan laporan keuangan. Bentuk laporan yang hanya berupa catatan hasil penjualan pupuk dari kelompok tani, oleh BUMDes disusun kembali

secara lebih terperinci dengan menggunakan bantuan aplikasi. Sehingga bisa terbentuklah laporan keuangan.

3. Kurangnya fasilitas untuk kelancaran pengelolaan BUMDes

Fasilitas yang diberikan oleh pihak Desa kepada BUMDes terbilang masih kurang, sehingga dengan kurangnya fasilitas yang diberikan, hasil pengelolaan keuangan usaha pupuk pada BUMDes juga menjadi kurang maksimal. Kurangnya fasilitas dalam hal ini adalah tidak adanya jadwal kegiatan musyawarah desa yang diberikan oleh pemerintah Desa Wonomulyo kepada BUMDes “Karya Mulya. Sehingga BUMDes “Karya Mulya” tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan dari hasil pengelolaan usaha penjualan pupuk berusbisi. Hal ini dikarenakan BUMDes berada di bawah naungan Pemerintah Desa dan yang berwenang untuk mengadakan musyawarah desa adalah pemerintah desa. Selain itu BUMDes “Karya Mulya” juga tidak memiliki gedung sendiri yang digunakan untuk pertemuan dan menyimpan pupuk yang diperdagangkan. Sehingga untuk kegiatan rapat/pertemuan BUMDes menggunakan salah satu ruangan yang ada di Kantor Desa Wonomulyo, sedangkan untuk menyimpan pupuk yang diperdagangkan BUMDes menyewa gudang milik kelompok tani.

Dengan demikian perlu diadakanya musyawarah desa agar BUMDes “Karya Mulya” dapat melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada publik. Mengingat pelaksanaan pengelolaan dapat dikatakan akuntabel dan transparan apabila telah memenuhi salah satunya adanya pelaporan dan pertanggungjawaban kepada publik. Namun sejauh ini upaya yang telah dilakukan oleh BUMDes “Karya Mulya” adalah melakukan pelaporan kepada pihak pengawas dan penasehat dalam sebuah forum internal meskipun hanya melalui lisan saja tanpa adanya laporan bentuk cetak yang diserahkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes “Karya Mulya” serta kendala yang terjadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan pada BUMDes “Karya Mulya” masih kurang akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan belum sesuainya antara pelaksanaan nyata di lapangan dengan 2 (dua) dari 3 (tiga) kriteria akuntabilitas yang ada. Kriteria yang masih belum disesai yaitu belum adanya laporan pertanggungjawaban keuangan yang diberikan kepada penasehat, pengawas, dan publik melalui musyawarah desa sehingga belum adanya pengawasan dan pemeriksaan atas laporan keuangan BUMDes “Karya Mulya”. Sedangkan kriteria yang telah sesuai yaitu adanya partisipasi masyarakat. hal ini dibuktikan dengan adanya keikutsertaan anggota Kelompok Tani dalam kegiatan usaha penjualan pupuk BUMDes “Karya Mulya”.
2. BUMDes “Karya Mulya” dalam melakukan pengelolaan keuangan kurang melaksanakan prinsip transparansi atau masih kurang transparan. Hal ini dibuktikan dengan belum sesuainya antara pelaksanaan nyata di lapangan dengan 2 (dua) dari 4 (empat) kriteria transparansi yang ada. Kriteria yang masih belum sesuai yaitu belum adanya ketersediaan dan aksesibilitas dokumen yang telah dipublikasikan melalui media masa maupun media lainya sehingga informasi mengenai pengelolaan keuangan BUMDes tidak dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu mengenai kejelasan dan kelengkapan informasi juga masih kurang karena masih terdapat dokumen yang tidak tersedia. Dokumen tersebut yaitu kurangnya jumlah kuitansi penebusan pupuk dan tidak adanya laporan keuangan dalam bentuk cetak. Sedangkan kriteria yang telah memenuhi syarat

3. transparan yaitu adanya keterbukaan dalam melakukan proses yang dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat (kelompok tani) dalam kegiatan pengelolaan keuangan usaha pada BUMDes serta adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021.
4. Kendala yang dialami oleh BUMDes “Karya Mulya” dalam melaksanakan pengelolaan keuangan terjadi pada kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kurangnya fasilitas berupa pelaksanaan musyawarah desa yang menjadikan proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan menjadi kurang maksimal.

5.2 Saran

Berikut ini saran yang diberikan penulis setelah melakukan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

1. BUMDes “Karya Mulya” seharusnya bisa sigap dalam menghadapi kondisi kekosongan keanggotaan. Sebelum pelaksanaan pengelolaan semakin jauh, sebaiknya segera mencari pengganti posisi yang kosong tersebut agar keanggotaan bisa lengkap kembali dan bisa lebih fokus melaksanakan pengelolaan sesuai dengan tugas masing-masing posisi.
2. BUMDes “Karya Mulya” seharusnya melakukan pelaporan laporan pertanggungjawaban keuangan dari kegiatan pengelolaan usaha pupuk kepada kepala desa selaku penasehat dan Ketua BPD selaku pengawas secara tepat waktu agar kedua pihak tersebut mengetahui secara jelas kondisi keuangan dari kegiatan usaha penjualan pupuk pada BUMDes “Karya Mulya”.
3. Keanggotaan BUMDes “Karya Mulya” perlu meningkatkan SDM (Sumber daya Manusia) untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan.
4. Pemerintah Desa wonomulyo seharusnya segera mengagendakan pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES) ketika mendekati masa akhir periode tahunan. Sehingga pada saat akhir periode tahunan

tersebut MUSDES bisa terlaksana secara tepat waktu dan BUMDes “Karya Mulya” bisa melakukan pelaporan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat umum/publik mengenai keuangan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, M., Forijati, R., & Muchson, M. (2021). Pengaruh Good Public Governance (GPG) Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kediri. *JAE: JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI* , 6, 132–142. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.15722>.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (ella Deffi Lestari, Ed.; 1st ed.). CV. Jejak.
- Asnawi, N., Setyaningsih, N. D., & Fanani, M. A. (2020). Determinants of Consumers' Responses on Government Policy toward Eco-Friendly Behavior in Indonesia. *Systematic Reviews in Pharmacy* , 11(3), 410–420. <https://doi.org/10.5530/srp.2020.3.52>.
- Ayu Ariski, N., & Asim Asy, M. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Jaya Tirta”. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12, 230–249. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/5159/4035>.
- Darmalaksana, W. (2020). *Cara Menulis Proposal Penelitian* (1st ed.). Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=SgnfDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=kerangka+berpikir+adalah&ots=kEG9JRrsU8&sig=3puMqklzStTugtQpF8oDklQkVZk&redir_esc=y#v=onepage&q=kerangka%20berpikir&f=false.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (A. Musfirah, A. Puspita, & Hasriani, Eds.). Pusaka Almailda.
- Gusliana Mais, R., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance* (Vol. 1, Issue 1). <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jago>.
- Handayati, P., Soetjipto, B. E., Putri, D. M., Ermayda, R. Z., Rochayatun, S., Nastiti, R. D., Narmaditya, B. S., & Alhaleh, S. E. A. (2020). Industrial Role Optimization in Regional Development through Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 12(2), 176–183. <https://doi.org/10.17977/um002v12i22020p176>
- Hasan, A., & Gusnardi. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. Taman Karya.

- Hasan, I., Farida, L., & Kholilah. (2021). The role of Islamic Corporate Social Responsibility in Building Corporate Image to Increase Customer Loyalty. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(2), 83–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jem.v17i2.5334>
- Hendang Waluya, A. (2020). Akuntansi: Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-284. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2020), 15–35.
- Izza Aryanti, F., & Putri Andini, D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis* (Vol. 1, Issue 1). <https://publikasi.polije.ac.id/index.php/asersi/article/view/2668/1709>.
- Mahmudah, S. (2018). *Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: Bumdes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik)*. <https://ejournal.umaha.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/376>.
- Marwiyah, S. (2018). *Kepemimpinan spiritual profetik dalam pencegahan korupsi* (B. Daz, Lutfiah, & Setyaningrum, Eds.). CV. Jakad Publishing Surabaya.
- Mohamed, N., Ridwan, A. M., Saoula, O., & Issa, M. R. (2019). Factors Causing Mismanagement in Public/Private Contracts: An Indonesian Perspective. *Management Science Letters*, 9(9), 1429–1438. <http://m.growingscience.com/beta/msl/3221-factors-causing-mismanagement-in-public-private-contracts-an-indonesian-perspective.html>.
- Mufti Rahajeng, M. (2020). Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Managament Inquiry*, 4(2), 163–174. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/ppmi/article/view/3912/2076>.
- Munir, M., Prajawati, M. I., & Sagena, B. (2021). Strategies of Sustainable Cooperative Partnerships. *International Journal of Financial Research*, 12(3), 157–161. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v12n3p157>
- Pakaya, N., Rorong, A., & Tulusan, F. (2019). *Transparansi Pengolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/23830/23480>
- Prihatsanti, U., Suryanto, & Hendriani, W. (2018). Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi. *Buletin Psikologi*, 26(2), 126–136. <https://journal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/38895/pdf>.
- Qosjim, A. (2017). Analisis Kinerja BUMDes di Kabupaten Lumajang. In *Journal Ekuilibrium: Vol. II* (Issue 10).

- Ridwan, M., Asnawi, N., & Setyaningsih, N. D. (2019). Public Perception about Economics and Its Impact on Shariah Stock Market of Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(11), 167–182. https://www.ijicc.net/images/vol6iss11/61112_Ridwan_2019_TD_R.pdf.
- Rochayatun, S., Pratikto, H., Wardoyo, C., Handayati, P., & Bidin, rosmiza. (2023). Assessing the Relevance of Spirituality and Corporate Social Responsibility in A Family Business: A Scooping Review. *Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Manajemen*, 9(2), 107–123. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jpbm/article/view/38312>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (F. Maharani, Ed.). PT Kanisius.
- Shidqon Prabowo, M. (2018). Good Corporate Governance (GCG) Dalam Prespektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* , 11(Vol. 11 No. 2 Nov 2018), 257–270.
- Soetjipto, B. E., Handayati, P., Hanurawan, F., Meldona, Rochayatun, sulis, & Bidin, R. (2023). Enhancing MSMEs Performance through Innovation: Evidence from East Java, Indonesia. *Journal for Re Attach Therapy and Developmental Diversities*, 6(3), 124–145. <https://jrtd.com/index.php/journal/article/view/331>
- Sopanah, A., & Prasetyaning Prawestri, H. (n.d.). *Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tamanharjo Bersinar Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*. Retrieved December 3, 2022, from <https://jurnal.widyagama.ac.id/index.php/cebi/article/view/102/105>.
- Suci Setia Ningrum, eka, & Hermawan, S. (2018). Analisis Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDES dan Kemungkinan Berdirinya Bumdes. *Jurnal Publikasi Ilmiah*. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/10397/eka%20suci-compressed.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development/ R&D)* (S. Yustiyani Suryandari, Ed.; 4th ed.). ALFABETA, cv.
- Suharyono, S. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 648. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.963>
- Surya Adi Tama, P., & Gede Wirama, D. (2020). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 73. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i01.p06>

Wahyu. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*.

Wahyuni, N., & Triatmanto, B. (2020). The Effect of The Organizational Change on Company Performance Mediated by Changes in Management Accounting Practices. *Accounting*, 6(4), 581–588. <http://growingscience.com/beta/ac/3914-the-effect-of-the-organizational-change-on-company-performance-mediated-by-changes-in-management-accounting-practices.html>.

Widodo, T., & Suharyono, S. (2021). Pengaruh Perencanaan Serta Pelaksanaan Dan Penatausahaan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDESA di Kabupaten Bengkalis. *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(1), 35. <https://doi.org/10.31602/atd.v5i1.4144>.

Yuliana, I., & Sartika, F. (2020). Mediating Effect of Islamic Social Reporting on the Relationship between Good Corporate Governance and Company Value: The Case of the State-Owned Enterprises. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 8(1), 1–11. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/grieb/article/view/1161/686>.

Surat An-Nisa Ayat 58. TafsirWeb | Baca al-Qur'an Online Terjemah Tafsir. <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html#history>.

Surat Al-Ahzab Ayat 37. TafsirWeb | Baca al-Qur'an Online Terjemah Tafsir. <https://tafsirweb.com/7649-surat-al-ahzab-ayat-37.html#history>.

Surat Al-Isra Ayat 35. TafsirWeb | Baca al-Qur'an Online Terjemah Tafsir. <https://tafsirweb.com/4639-surat-al-isra-ayat-35.html#history>.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan keuangan BUMDes “Karya Mulya” Unit Pupuk Tahun 2022

BUM Desa Karya Mulya Unit Pupuk						
BUKU JURNAL						
Tanggal	Nomor Bukti	Kode dan Nama Akun	Post Ref	SISI KIRI (Debit)	SISI KANAN (Kredit)	Keterangan Transaksi
01/01/2022		6.2.01.01 Beban Gaji/Upah Bag. Operasional		1.900.000		
01/01/2022		1.1.01.01 Kas Tunai			1.900.000	Gaji Karyawan
01/01/2022		1.1.01.01 Kas Tunai		1.900.000		
01/01/2022		2.1.03.01 Utang Gaji dan Tunjangan			1.900.000	Gaji Karyawan
01/02/2022		6.2.01.01 Beban Gaji/Upah Bag. Operasional		1.900.000		
01/02/2022		1.1.01.01 Kas Tunai			1.900.000	Gaji Karyawan
01/02/2022		1.1.01.01 Kas Tunai		1.900.000		
01/02/2022		2.1.03.01 Utang Gaji dan Tunjangan			1.900.000	Gaji Karyawan
01/03/2022		6.2.01.01 Beban Gaji/Upah Bag. Operasional		1.900.000		
01/03/2022		1.1.01.01 Kas Tunai			1.900.000	Gaji Karyawan
01/03/2022		1.1.01.01 Kas Tunai		1.900.000		
01/03/2022		2.1.03.01 Utang Gaji dan Tunjangan			1.900.000	Gaji Karyawan
25/03/2022	002/01/UWA/2022	1.1.01.01 Kas Tunai		40.000.000		Pembelian Pupuk
25/03/2022	002/01/UWA/2022	3.1.01.01 Penyertaan Modal Desa			40.000.000	Pembelian Pupuk
25/03/2022	002/01/UWA/2022	1.1.01.01 Kas Tunai			40.000.000	Pembelian Pupuk
25/03/2022	002/01/UWA/2022	1.1.05.01 Persediaan Barang Dagangan		40.000.000		Pembelian Pupuk
01/04/2022		6.2.01.01 Beban Gaji/Upah Bag. Operasional		1.900.000		
01/04/2022		1.1.01.01 Kas Tunai			1.900.000	Gaji Karyawan
01/04/2022		1.1.01.01 Kas Tunai		1.900.000		
01/04/2022		2.1.03.01 Utang Gaji dan Tunjangan			1.900.000	Gaji Karyawan
01/05/2022		6.2.01.01 Beban Gaji/Upah Bag. Operasional		1.900.000		
01/05/2022		1.1.01.01 Kas Tunai			1.900.000	Gaji Karyawan
01/05/2022		1.1.01.01 Kas Tunai		1.900.000		
01/05/2022		2.1.03.01 Utang Gaji dan Tunjangan			1.900.000	Gaji Karyawan
24/05/2022	002/01/UWA/2022	1.1.01.01 Kas Tunai		41.800.000		penjualan Pupuk
24/05/2022	002/01/UWA/2022	4.2.01.07 Pendapatan Penjualan Pupuk			41.800.000	
24/05/2022	002/01/UWA/2022	5.1.01.01 Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan		40.000.000		

printed: 02/05/2023 10:13 - @ph

hal 1 dari 426

Tanggal	Nomor Bukti	Kode dan Nama Akun	Post Ref	SISI KIRI (Debit)	SISI KANAN (Kredit)	Keterangan Transaksi
24/05/2022	002/01/UWA/2022	1.1.05.01 Persediaan Barang Dagangan			40.000.000	
24/05/2022	002/01/UWA/2022	1.1.01.01 Kas Tunai			25.750.000	Pembelian Pupuk
24/05/2022	002/01/UWA/2022	1.1.05.01 Persediaan Barang Dagangan		25.750.000		Pembelian Pupuk
01/06/2022		6.2.01.01 Beban Gaji/Upah Bag. Operasional		1.900.000		
01/06/2022		1.1.01.01 Kas Tunai			1.900.000	Gaji Karyawan
01/06/2022		1.1.01.01 Kas Tunai		1.900.000		
01/06/2022		2.1.03.01 Utang Gaji dan Tunjangan			1.900.000	Gaji Karyawan
25/06/2022	002/01/UWA/2022	1.1.01.01 Kas Tunai		26.850.000		penjualan Pupuk
25/06/2022	002/01/UWA/2022	4.2.01.07 Pendapatan Penjualan Pupuk			26.850.000	
25/06/2022	002/01/UWA/2022	5.1.01.01 Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan		25.750.000		
25/06/2022	002/01/UWA/2022	1.1.05.01 Persediaan Barang Dagangan			25.750.000	
25/06/2022	002/01/UWA/2022	1.1.01.01 Kas Tunai			2.325.000	Pembelian Pupuk
25/06/2022	002/01/UWA/2022	1.1.05.01 Persediaan Barang Dagangan		2.325.000		Pembelian Pupuk
01/07/2022		6.2.01.01 Beban Gaji/Upah Bag. Operasional		1.900.000		
01/07/2022		1.1.01.01 Kas Tunai			1.900.000	Gaji Karyawan
01/07/2022		1.1.01.01 Kas Tunai		1.900.000		
01/07/2022		2.1.03.01 Utang Gaji dan Tunjangan			1.900.000	Gaji Karyawan
01/08/2022		6.2.01.01 Beban Gaji/Upah Bag. Operasional		1.900.000		
01/08/2022		1.1.01.01 Kas Tunai			1.900.000	Gaji Karyawan
01/08/2022		1.1.01.01 Kas Tunai		1.900.000		
01/08/2022		2.1.03.01 Utang Gaji dan Tunjangan			1.900.000	Gaji Karyawan
01/09/2022		6.2.01.01 Beban Gaji/Upah Bag. Operasional		1.900.000		
01/09/2022		1.1.01.01 Kas Tunai			1.900.000	Gaji Karyawan
01/09/2022		1.1.01.01 Kas Tunai		1.900.000		
01/09/2022		2.1.03.01 Utang Gaji dan Tunjangan			1.900.000	Gaji Karyawan
01/10/2022		6.2.01.01 Beban Gaji/Upah Bag. Operasional		1.900.000		
01/10/2022		1.1.01.01 Kas Tunai			1.900.000	Gaji Karyawan
01/10/2022		1.1.01.01 Kas Tunai		1.900.000		
01/10/2022		2.1.03.01 Utang Gaji dan Tunjangan			1.900.000	Gaji Karyawan
01/11/2022		6.2.01.01 Beban Gaji/Upah Bag. Operasional		1.900.000		
01/11/2022		1.1.01.01 Kas Tunai			1.900.000	Gaji Karyawan

printed: 02/05/2023 10:13 - @ph

hal 2 dari 426

Tanggal	Nomor Bukti	Kode dan Nama Akun	Post Ref	SISI KIRI (Debit)	SISI KANAN (Kredit)	Keterangan Transaksi
01/11/2022		1.1.01.01 Kas Tunai		1.900.000		
01/11/2022		2.1.03.01 Utang Gaji dan Tunjangan			1.900.000	Gaji Karyawan
01/12/2022		6.2.01.01 Beban Gaji/Upah Bag. Operasional		1.900.000		
01/12/2022		1.1.01.01 Kas Tunai			1.900.000	Gaji Karyawan
01/12/2022		1.1.01.01 Kas Tunai		1.900.000		
01/12/2022		2.1.03.01 Utang Gaji dan Tunjangan			1.900.000	Gaji Karyawan
31/12/2022	002/01/UWA/2022	1.1.01.01 Kas Tunai		2.425.000		penjualan Pupuk
31/12/2022	002/01/UWA/2022	4.2.01.07 Pendapatan Penjualan Pupuk			2.425.000	
31/12/2022	002/01/UWA/2022	5.1.01.01 Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan		2.325.000		
31/12/2022	002/01/UWA/2022	1.1.05.01 Persediaan Barang Dagangan			2.325.000	

printed: 02/05/2023 10:13 - @ph

hal 3 dari 426



BUM Desa Karya Mulya
Unit Pupuk

BUKU BESAR

KODE AKUN : 1.1.01.0
NAMA AKUN : Kas Tunai

Tanggal	Transaksi	Ref	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	(1.900.000)
01/01/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
01/02/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	(1.900.000)
01/02/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
01/03/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	(1.900.000)
01/03/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
25/03/2022	Pembelian Pupuk		40.000.000	-	40.000.000
25/03/2022	Pembelian Pupuk		-	40.000.000	(40.000.000)
01/04/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	(1.900.000)
01/04/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
01/05/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	(1.900.000)
01/05/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
24/05/2022	penjualan Pupuk		41.800.000	-	41.800.000
24/05/2022	Pembelian Pupuk		-	25.750.000	(25.750.000)
01/06/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	(1.900.000)
01/06/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
25/06/2022	penjualan Pupuk		26.850.000	-	26.850.000
25/06/2022	Pembelian Pupuk		-	2.325.000	(2.325.000)
01/07/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	(1.900.000)
01/07/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
01/08/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	(1.900.000)
01/08/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
01/09/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	(1.900.000)
01/09/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
01/10/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	(1.900.000)

printed: 28/05/2023 22:07 - @ph

hal 1 dari 2

Tanggal	Transaksi	Ref	Debit	Kredit	Saldo
01/10/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
01/11/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	(1.900.000)
01/11/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
01/12/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	(1.900.000)
01/12/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
31/12/2022	penjualan Pupuk		2.425.000	-	2.425.000



BUM Desa Karya Mulya
Unit Pupuk

BUKU BESAR

KODE AKUN : 2.1.03.0
NAMA AKUN : Utang Gaji dan Tunjangan

Tanggal	Transaksi	Ref	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	1.900.000
01/02/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	1.900.000
01/03/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	1.900.000
01/04/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	1.900.000
01/05/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	1.900.000
01/06/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	1.900.000
01/07/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	1.900.000
01/08/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	1.900.000
01/09/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	1.900.000
01/10/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	1.900.000
01/11/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	1.900.000
01/12/2022	Gaji Karyawan		-	1.900.000	1.900.000



BUM Desa Karya Mulya
Unit Pupuk

BUKU BESAR

KODE AKUN : 3.1.01.0
NAMA AKUN : Penyertaan Modal Desa

Tanggal	Transaksi	Ref	Debit	Kredit	Saldo
25/03/2022	Pembelian Pupuk		-	40.000.000	40.000.000



BUM Desa Karya Mulya
Unit Pupuk

BUKU BESAR

KODE AKUN : 4.2.01.0
NAMA AKUN : Pendapatan Penjualan Pupuk

Tanggal	Transaksi	Ref	Debit	Kredit	Saldo
24/05/2022	penjualn Pupuk		-	41.800.000	41.800.000
25/06/2022	penjualn Pupuk		-	26.850.000	26.850.000
31/12/2022	penjualn Pupuk		-	2.425.000	2.425.000



BUM Desa Karya Mulya
Unit Pupuk

BUKU BESAR

KODE AKUN
NAMA AKUN

: 1.1.05.0
: Persediaan Barang Dagangan

Tanggal	Transaksi	Ref	Debit	Kredit	Saldo
25/03/2022	Pembelian Pupuk		40.000.000	-	40.000.000
24/05/2022	penjualan Pupuk		-	40.000.000	(40.000.000)
24/05/2022	Pembelian Pupuk		25.750.000	-	25.750.000
25/06/2022	penjualan Pupuk		-	25.750.000	(25.750.000)
25/06/2022	Pembelian Pupuk		2.325.000	-	2.325.000
31/12/2022	penjualan Pupuk		-	2.325.000	(2.325.000)



BUM Desa Karya Mulya
Unit Pupuk

BUKU BESAR

KODE AKUN
NAMA AKUN

: 6.2.01.0
: Beban Gaji/Upah Bag. Operasional

Tanggal	Transaksi	Ref	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
01/02/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
01/03/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
01/04/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
01/05/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
01/06/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
01/07/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
01/08/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
01/09/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
01/10/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
01/11/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000
01/12/2022	Gaji Karyawan		1.900.000	-	1.900.000



BUM Desa Karya Mulya
Unit Pupuk

BUKU BESAR

KODE AKUN : 5.1.01.0
NAMA AKUN : Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan

Tanggal	Transaksi	Ref	Debit	Kredit	Saldo
24/05/2022	penjualan Pupuk		40.000.000	-	40.000.000
25/06/2022	penjualan Pupuk		25.750.000	-	25.750.000
31/12/2022	penjualan Pupuk		2.325.000	-	2.325.000



BUM Desa Karya Mulya
Unit Pupuk

NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN Per 31 December 2022

(dalam Rupiah)

	Kode dan Nama Akun	Neraca Percobaan		Saldo	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit
1	1.1.01.01 Kas Tunai	Rp 133.875.000	Rp 90.875.000	Rp 43.000.000	-
2	3.1.01.01 Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp 40.000.000	Rp -	Rp 40.000.000
3	4.2.01.07 Pendapatan Penjualan Pupuk	Rp -	Rp 71.075.000	Rp -	Rp 71.075.000
4	5.1.01.01 Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan	Rp 68.075.000	Rp -	Rp 68.075.000	Rp -
	Jumlah	Rp 292.825.000	Rp 292.825.000	Rp 133.875.000	Rp 133.875.000



BUM Desa Karya Mulya

Unit Pupuk

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Desember 2022	s.d 31 Desember 2022
1	PENDAPATAN USAHA		
2	Pendapatan Jasa		
3	Pendapatan Wisata	Rp -	Rp -
4	Pendapatan Pengelolaan Air Bersih	Rp -	Rp -
5	Pendapatan Pengelolaan Sampah	Rp -	Rp -
6	Pendapatan Sewa	Rp -	Rp -
7	Pendapatan Jasa Pelayanan	Rp -	Rp -
8	Pendapatan Transportasi	Rp -	Rp -
9	Pendapatan Parkir	Rp -	Rp -
10	Pendapatan Simpan Pinjam	Rp -	Rp -
11	Pendapatan Pelatihan	Rp -	Rp -
12	Pendapatan Penginapan/Homestay	Rp -	Rp -
13	Pendapatan Komisi	Rp -	Rp -
14	Total Pendapatan Jasa (3 s.d. 13)	Rp -	Rp -
15	Pendapatan Penjualan Barang Dagangan		
16	Pendapatan Penjualan Barang Dagangan	Rp 2.425.000	Rp 71.075.000
17	Pendapatan Penjualan Barang Jadi		
18	Pendapatan Penjualan Barang Jadi	Rp -	Rp -
19	Total Pendapatan (14+16+18)	Rp 2.425.000	Rp 71.075.000
20			
21	HARGA POKOK PENJUALAN		
22	Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan		
23	Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan	Rp 2.325.000	Rp 68.075.000
24	Harga Pokok Penjualan Barang Jadi		
25	Harga Pokok Penjualan Barang Jadi	Rp -	Rp -
26	Total Harga Pokok Penjualan (23+25)	Rp 2.325.000	Rp 68.075.000
27	Laba (Rugi) Kotor (19+26)	Rp 100.000	Rp 3.000.000
28			
29	BEBAN-BEBAN USAHA		
30	Beban Administrasi dan Umum		
31	Beban Pegawai Bagian Administrasi Umum	Rp -	Rp -
32	Beban Perlengkapan	Rp -	Rp -
33	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	Rp -	Rp -
34	Beban Utilitas	Rp -	Rp -
35	Beban Sewa dan Asuransi	Rp -	Rp -
36	Beban Kebersihan dan Keamanan	Rp -	Rp -
37	Beban Penyisihan dan Penyusutan/Amortisasi	Rp -	Rp -
38	Beban Administrasi dan Umum Lainnya	Rp -	Rp -

Nomor Urut	Uraian	Desember 2022	s.d 31 Desember 2022
39	Total Beban Administrasi Umum (31 s.d. 38)	Rp -	Rp -
40	Beban Operasional		
41	Beban Pegawai Bagian Operasional	Rp 1.900.000	Rp 22.800.000
42	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	Rp -	Rp -
43	Beban Keamanan	Rp -	Rp -
44	Beban Operasional Lainnya	Rp -	Rp -
45	Total Beban Operasional (41 s.d. 44)	Rp 1.900.000	Rp 22.800.000
46	Beban Pemasaran		
47	Beban Pegawai Bagian Pemasaran	Rp -	Rp -
48	Beban Iklan dan Promosi	Rp -	Rp -
49	Beban Pemasaran Lainnya	Rp -	Rp -
50	Total Beban Pemasaran (47 s.d. 49)	Rp -	Rp -
51	Total Beban-Beban (39+45+50)	Rp 1.900.000	Rp 22.800.000
52	LABA (RUGI) OPERASI (27-51)	Rp (1.800.000)	Rp (19.800.000)
53			
54	PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
55	Pendapatan Lain-lain		
56	Pendapatan dari Bank	Rp -	Rp -
57	Pendapatan Bantuan/Sumbangan/Hibah	Rp -	Rp -
58	Pendapatan Dividen	Rp -	Rp -
59	Pendapatan Denda	Rp -	Rp -
59	Pendapatan Iklan	Rp -	Rp -
60	Pendapatan Lain-lain lainnya	Rp -	Rp -
61	Total Pendapatan Lain-lain (56 s.d. 60)	Rp -	Rp -
62	Beban Lain-lain		
63	Beban Bank	Rp -	Rp -
64	Beban Bunga	Rp -	Rp -
65	Beban Denda	Rp -	Rp -
66	Beban Lain-lain Lainnya	Rp -	Rp -
67	Total Beban Lain-lain (63 s.d. 66)	Rp -	Rp -
68	Beban Pajak		
69	Beban Pajak	Rp -	Rp -
70	Total Pendapatan dan Beban Lain-lain (61-67-69)	Rp -	Rp -
71	LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM BAGI HASIL	Rp (1.800.000)	Rp (19.800.000)
72	BAGI HASIL KE PEMILIK	Rp -	Rp -
73	Laba (RUGI) BERSIH SETELAH BAGI HASIL KE PEMILIK	Rp (1.800.000)	Rp (19.800.000)

Kabupaten Malang, 31 Desember 2022
Direktur BUMDesa

Hafidz
NIK 1-001



BUM Desa Karya Mulya
Unit Pupuk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	2022
1	2	3
1	PENYERTAAN MODAL	
2	Penyertaan Modal Desa Awal	Rp -
3	Penyertaan Modal Masyarakat Awal	Rp -
4	Penambahan Investasi periode berjalan:	
5	Penyertaan Modal Desa	Rp 40.000.000
6	Penyertaan Modal Masyarakat	Rp -
7	Penyertaan Modal Akhir	Rp 40.000.000
8	SALDO LABA	
9	Saldo Laba Awal:	
10	Saldo Laba Tidak Dicadangkan	Rp -
11	Saldo Laba Dicadangkan	Rp -
12	Laba (Rugi) periode berjalan	Rp (19.800.000)
13	Bagi Hasil Penyertaan:	
14	Bagi Hasil Penyertaan Modal Desa	Rp -
15	Bagi Hasil Penyertaan Modal Masyarakat	Rp -
16	Saldo Laba Akhir	Rp (19.800.000)
17	EKUITAS AKHIR	Rp 20.200.000

Kabupaten Malang, 31 Desember 2022
Direktur BUMDesa

Hafidz
NIK 1-001



BUM Desa Karya Mulya
Unit Pupuk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas	Rp 43.000.000	Rp -
4	Setoran Kas	Rp -	Rp -
5	Piutang	Rp -	Rp -
6	Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -
7	Persediaan	Rp -	Rp -
8	Perlengkapan	Rp -	Rp -
9	Pembayaran Dimuka	Rp -	Rp -
10	Aset Lancar Lainnya	Rp -	Rp -
11	RK Pusat	Rp -	Rp -
12	Total Aset Lancar	Rp 43.000.000	Rp -
14	Investasi		
15	Investasi	Rp -	Rp -
16	Total Investasi	Rp -	Rp -
18	Aset Tetap		
19	Tanah	Rp -	Rp -
20	Kendaraan	Rp -	Rp -
21	Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -
22	Meubelair	Rp -	Rp -
23	Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -
24	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -
25	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp -	Rp -
26	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -
27	Total Aset Tetap	Rp -	Rp -
29	Aset Tidak Berwujud		
30	Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -
31	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -
32	Total Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -
34	Aset Lain-lain		
35	Aset Lain-lain	Rp -	Rp -
36	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp -	Rp -
37	Total Aset Lain-lain	Rp -	Rp -
38	TOTAL ASET	Rp 43.000.000	Rp -
40	KEWAJIBAN		
41	Kewajiban Jangka Pendek		
42	Utang Usaha	Rp -	Rp -
43	Utang Pajak	Rp -	Rp -
44	Utang Gaji/Upah dan Tunjangan	Rp 22.800.000	Rp -
45	Utang Utilitas	Rp -	Rp -
46	Utang kepada Pihak Ketiga jk. Pendek	Rp -	Rp -
47	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp -	Rp -
48	Total Kewajiban Jangka Pendek	Rp 22.800.000	Rp -
50	Kewajiban Jangka Panjang		
51	Utang Ke Bank	Rp -	Rp -
52	Utang kepada Pihak Ketiga jk. Panjang	Rp -	Rp -
53	Utang Jangka Panjang Lainnya	Rp -	Rp -
54	Total Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -
55	TOTAL KEWAJIBAN	Rp 22.800.000	Rp -
57	EKUITAS		
58	Ekuitas Akhir	Rp 20.200.000	Rp -
59	RK Unit Usaha	Rp -	Rp -
60	TOTAL EKUITAS	Rp 20.200.000	Rp -
61	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp 43.000.000	Rp -

Kabupaten Malang, 31 Desember 2022
Direktur BUMDesa

Hafidz
NIK 1-001



BUM Desa Karya Mulya
Unit Pupuk

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
2	Arus Kas Masuk	
3	Penerimaan kas dari penjualan jasa	-
4	Penerimaan kas dari penjualan barang dagangan	71.075.000
5	Penerimaan kas dari penjualan barang jadi	-
6	penerimaan kas dari bunga dan deviden	-
7	penerimaan kas dari bunga bank	-
8	Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi	71.075.000
9	Arus Kas Keluar	
10	Pengeluaran kas untuk pembayaran ke pemasok barang	(68.075.000)
11	Pengeluaran kas untuk pembayaran gaji/upah pegawai/karyawan	-
12	Pengeluaran kas untuk pembayaran pajak	-
13	Pengeluaran kas untuk pembayaran bunga	-
14	Pengeluaran kas untuk pembayaran beban-beban yang lain	-
15	Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi	(68.075.000)
16	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 3.000.000
17		
18	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
19	Arus Kas Masuk	
20	Penerimaan Kas dari Penjualan Aset Tetap	-
21	Penerimaan Kas dari Penjualan Investasi	-
22	Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi	-
23	Arus Kas Keluar	
24	Pengeluaran Kas untuk Pembelian Aset Tetap	-
25	Pengeluaran Kas untuk Pembelian Investasi	-
26	Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi	-
27	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp -
28		
29	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	
30	Arus Kas Masuk	
31	Penerimaan kas dari penyertaan modal desa	40.000.000
32	Penerimaan kas dari penyertaan modal masyarakat	-
33	Penerimaan kas dari utang jangka panjang	-
34	Jumlah arus kas masuk dari aktivitas Pembiayaan	40.000.000
35	Arus Kas Keluar	
36	Pembayaran bagi hasil penyertaan modal desa	-
37	Pembayaran bagi hasil penyertaan modal masyarakat	-
38	Pembayaran pokok utang jangka panjang	-
39	Jumlah arus kas keluar dari aktivitas Pembiayaan	-
40	Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan	Rp 40.000.000
41		
42	Kenaikan (penurunan) Kas	Rp 43.000.000
43	Saldo kas awal tahun	-
44	Saldo kas akhir tahun	Rp 43.000.000

Kabupaten Malang, 31 Desember 2022
Direktur BUMDesa

Hafidz
NIK 1-001

LAPORAN BUKU PEMBANTU

1 Saldo Piutang Usaha	-
2 Saldo Piutang kepada Pegawai	22.800.000
3 Saldo Piutang Lainnya	-
3 Saldo Utang Usaha	-

No.	Jenis Buku Pembantu	Saldo
1 Piutang Usaha		
-		-
-		-
-		-
2 Piutang kepada Pegawai		
	Gaji Pegawai	22.800.000
-		-
-		-
3 Piutang Lainnya		
-		-
4 Utang Usaha		
-		-
-		-
-		-

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

A. Informan 1

Nama : Mas Hafidz
Jabatan : Ketua BUMDes “Karya Mulya”
Hari/Tanggal : Rabu, 5 April 2023
Tempat : Kantor Desa Wonomulyo

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan mulai berdiri BUMDes di Desa Wonomulyo ini?	<i>“Berdiri mulai tahun 2021”</i>
2	Bagaimana awal mula atau hal apa yang mendasari didirikannya BUMDes di Desa Wonomulyo?	<i>“ Untuk yang pertama, BUMDes Wonomulyo berdiri itu karena diharuskan dari KEMENDES bahwa harus ada BUMDes di setiap Desa. kedua, karena di Wonomulyo masih belum ada BUMDes dan belum pernah ada Pendapatan Asli Desa (PAD) yang masuk ke Desa jadi diadakan BUMDes untuk mengelola usaha-usaha desa.”</i>
3	Jenis usaha apa saja yang sudah diprogramkan di awal pendirian BUMDes?	<i>“ Yang sudah diprogramkan itu dulu ada usaha pengelolaan sampah, HIPAM, penjualan pupuk, dan wisata. Dulu sempat ada rencana wisata. Tapi yang sudah terealisasi di tahun 2022 hanya pupuk.”</i>
4	Mengapa memilih usaha tersebut pada ushaa BUMDes?	<i>”Karena petani yang ada di Desa Wonomulyo sangat membutuhkan pupuk dan untuk permodalan itu kelompok tani masih belum ada modal jadi kita kerjasama dengan kelompok tani untuk pengadaan pupuk.”</i>
5	Apa tugas anda sebagai ketua BUMDes atau sebagai pihak yang ikut serta dalam pengelolaan keuangan BUMDes?	<i>“Kalau untuk peran saya itu mengatur jalanya permodalan dari usaha pupuk dan mengelola. Karena di tahun 2022 yang aktif di BUMDes hanya ketua dan sekretaris saja.”</i>
6	Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan pada unit usaha BUMDes?	<i>”Untuk mekanisme pengelolanya jadi kita (BUMDes) bagi hasil dengan kelompok tani. BUMDes mendapatkan keuntungan dari penjualan pupuk itu Rp 5.000/kantong. Jadi BUMDes untuk</i>

		penebusan itu tergantung dengan RDKK. RDKK itu adalah luas wilayah dari petani. Seandainya kelompok tani kebutuhannya 1 ton dalam RDKK yang harus terealisasi ke kelompok tani juga harus 1 ton, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dan kelompok tani juga sudah tertera di RDKK jadi tidak bisa untuk memanipulasi pengadaan pupuk. Mekanisme pembelian intinya tergantung dengan RDKK. BUMDes melakukan kerja sama dengan kelompok tani kemudian kelompok tani yang mengajukan ke pihak ketiga untuk mendapatkan pupuk, yaitu KUM Lestari Makmur. Jadi untuk sistem pembelian itu dari kelompok tani ke pihak toko (KUM Lestari Makmur) kalau untuk mekanisme permodalan itu dari kelompok tani ke BUMDes. Yang menjualkan pupuk ke sesama anggota kelompok tani juga kelompok tani sendiri. Ibarat antara BUMDes dengan kelompok tani itu sebagai permodalan karena kelompok tani terkendala dalam hal permodalan jadi melakukan kerjasama dengan BUMDes lalu bagi hasil yang tergantung dengan penebusan. Seandainya penebusan 200 kantong BUMDes dapatkan untung Rp 5.000 x 200 kantong seperti itu. "
7	Berapa besar dana yang diberikan oleh desa untuk menjalankan usaha BUMDes dan berapa dana yang dialokasikan untuk usaha pupuk pada tahun 2022?	"Untuk usaha yang di BUMDes itu 50 Juta. 50 Juta untuk permodalan usaha pupuk."
8	Dari manakah BUMDes mendapatkan pupuk yang kemudian dijual kembali kepada para anggota kelompok tani?	"Mendapatkan pupuknya itu dari toko KUM Lestari Makmur"

9	Berapa harga beli pupuk yang didapatkan BUMDes dan berapa harga jual yang ditetapkan oleh BUMDes?	<i>"Untuk harga penebusan ada yang Rp 115.000 dan Rp 120.000. Untuk harga jualnya ada yang Rp 130.000 dan ada juga yang Rp 135.000."</i>
10	Apakah BUMDes memiliki tempat/gudang untuk menjalankan usahanya?	<i>"Kalau untuk gudang itu BUMDes masih belum ada. Tapi untuk masalah gudang kebetulan kerja sama dengan menyewa gudang milik kelompok tani. Jadi sewa gudang itu ada anggarannya sendiri yang diambilkan dari laba keuntungan. Untuk anggaran operasional langsung diambilkan dari laba keuntungan. Dari penebusan Rp 120.000 BUMDes menjual Rp 135.000 ada keuntungan Rp 15.000 disitu ada operasional, jas angkut, sewa gudang, dan keuntungan kelompok tani. kalau keuntungan BUMDes sendiri murni Rp 5.000/kantong"</i>
11	Hasil laba yang didapat BUMDes sebesar Rp 5.000 digunakan untuk apa?	<i>"Kalau untuk hasil yang itu kita ada pembagian laba dengan desa sekitar 30% dan itu masih dikelola oleh BUMDes."</i>
12	Di Tahun 2022 apakah sudah memiliki pembukuan atau sudah menyusun laporan keuangan dari kegiatan penjualan pupuk?	<i>"Kalau untuk laporan keuangan di tahun 2022 itu masih sebatas pembelian dan keuntungan saja. Jadi untuk pembelian dalam satu tahun ada tiga kali pembelian. Kalau untuk laporan keuangan kemarin hanya sebatas catatan saja dan itu BUMDes menghitungnya dari tiga penebusan dan BUMDes mendapatkan keuntungan seperti itu."</i>
13	Apakah di tahun 2022 masih belum ada laporan keuangan yang diserahkan ke pihak desa?	<i>"Kalau untuk 2022 masih belum. Dan kemarin ada musyawarah itu langsung dianggarkan ke beras tahun 2023."</i>
14	Apakah terdapat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan BUMDes?	<i>"Kalau untuk pengelolaan keuangan itu intern dari BUMDes sendiri. Kalau kerja sama dengan masyarakat (kelompok tani)."</i>
15	Apakah terdapat pengawas dan pemeriksaa oleh pihak desa dan	<i>"Kalau pengawas ada dari pihak BPD itu perwakilan dari</i>

	pihak lain dalam kegiatan pengelolaan di BUMDes?	<i>masyarakat.”</i>
16	Langkah apa yang anda lakukan apabila terdapat keterlambatan pembuatan laporan keuangan dan penyetorannya?	<i>“Kalau untuk keterlambatan pembuatan laporan kemarin tidak ada.”</i>
17	Langkah apa yang anda lakukan apabila terdapat ketidaksesuaian nominal pada laporan keuangan?	<i>“Kalau untuk ketidaksesuaian nominal di tahun 2022 kemarin tidak ada. Jadi alhamdulillah di tahun 2022 kemarin mendapatkan keuntungan sesuai dengan permodalan.”</i>
18	Apakah laporan keuangan BUMDes sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ada?	<i>“Kalau menurut saya masih belum karena yang kerja kemarin hanya sekretaris dan ketua saja.”</i>
19	Apa saja kendala yang dialami dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BUMDes?	<i>“Kendala banyak sekali terutama dari ketidaksukaan masyarakat kepada pihak yang akan melakukan pengelolaan keuangan itu banyak sekali. Banyak warga yang bilang kenapa BUMDes gini-gini aja gitu.”</i>
20	Menurut pendapat anda apakah pengelolaan keuangan BUMDes sudah akuntabel?	<i>“Dari tahun 2022 insyaallah sudah akuntabel kalau menurut saya karena tahun 2022 pengelolaanya sebatas BUMDes mendapat untung dari penjualan.”</i>
21	Apakah dokumen-dokumen selama kegiatan pengelolaan BUMDes tersedia?	<i>“Dokumen penjualan itu ada. Ada nota, foto dari penurunan pupuk itu ada semua.”</i>
22	Apakah bisa untuk diakses atau mudah diakses?	<i>“Kalau diakses itu ya sebatas intern dari BUMDes sendiri. Kemarin itu nota udah dikelola oleh BUMDes. Kalau untuk masyarakat kemarin kita tidak share ke media sosial atau media lain.”</i>
23	Apakah dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan BUMDes selalu melalui mustawarah yang melibatkan masyarakat?	<i>“Kalau pelibatan masyarakat itu kemarin kita hanya melibatkan pihak toko, kelompok tani, pengawas, perangkat desa dan BUMDes dalam rangka MUSRENG. Yang dilaksanakan masih dalam tahun 2022.”</i>
24	Berarti untuk laporan keuangannya apakah hanya disampaikan secara lisan?	<i>“Itu masih secara lisan aja. belum ada bentuk fisiknya.”</i>

25	Apakah laporan keuangan BUMDes boleh diakses secara umum?	<i>“Kalau untuk keuangan itu intern dari BUMDes sendiri. Karena itu BUMDes ibarat sebuah perusahaan jadi keuangan itu hanya intern. Kalau masyarakat luar mengetahuinya itu keuntungannya saja. Kalau untuk operasional, pengelolaan itu hanya intern dari BUMDes.”</i>
26	Bagaimana cara agar dapat mengetahui informasi mengenai keuangan BUMDes bagi pihak yang berkepentingan?	“iya kita berikan tapi hanya sebatas informasi mengenai keuangan saja. Kalau untuk pengelolaanya tidak bisa dishare ke pihak manapun. Jadi hanya intern BUMDes saja yang mengetahui.

B. Informan 2

Nama : Mbak Putri
Jabatan : Sekretaris BUMDes “Karya Mulya”
Hari/Tanggal : Selasa, 11 April 2023
Tempat : Rumah Mbak Putri

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan mulai berdiri BUMDes di Desa Wonomulyo ini?	<i>“Kalau beridirinya itu 2021 tapi kalau aktif mulai tahun 2022”</i>
2	Bagaimana awal mula atau hal apa yang mendasari didirikanya BUMDes di Desa Wonomulyo?	<i>“Kalau BUMDesnya dulu kan amanat UU karena kan pemerintah desa diwajibkan untuk mendirikan BUMDes jadi gitu.</i>
3	Jenis usaha apa saja yang sudah diprogramkan di awal pendirian BUMDes?	<i>“Program awal itu pertama pupuk trus baru berkembang ke sembako. Kalau kedepanya itu rencananya banyak tapi masih belum terealisasikan contohnya itu ruko pasar, air minum, itu aja.” Kalau yang pupuk mulai jalan dari tahun 2022 kalau sembako baru tahun 2023 ini.”</i>
4	Mengapa memilih usaha tersebut pada ushaa BUMDes?	<i>“Kalau yang pupuk itu karena memang kan masyarakat wonomulyo terutama robyong sangat bergantung pada pertanian. Trus pupuk itu kan sulit untuk yang subsidi jadi kita bantu untuk pengadaan pupuk.”</i>
5	Apa tugas anda sebagai sekretaris BUMDes atau sebagai pihak yang ikut serta dalam pengelolaan keuangan BUMDes?	<i>“sebetulnya tahun 2022 itu ada 4 orang, ada bendahara sama wakil juga tapi yang 2 orang itu kan ngga aktif jadi otomatis yaa saya sama ketua hampir memegang peranan. Jadi untuk masalah internal operasional itu mungkin saya yang lebih berperan tapi untuk masalah eksternal itu ketua yang lebih berperan.”</i>
6	Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan pada unit usaha BUMDes?	<i>“Kan unit usahanya Cuma satu yaa. Jadi kemarin kita dapat panduan lah untuk aplikasi akuntansi dari STAN. Jadi ya kita menggunakan aplikasi itu untuk pencatatanya. Kalau yang tahun lalu tidak ada pencatatan manual.”</i>

7	Berapa besar dana yang diberikan oleh desa untuk menjalankan usaha BUMDes dan berapa dana yang dialokasikan untuk usaha pupuk pada tahun 2022?	<i>"Kalau yang dari desa itu dikasih 50 Juta untuk yang tahun 2022 trus yang dialokasikan ke pupuk sekitar 40 Juta an. 40 juta ini digunakan untuk pengadaan pupuk yang terdiri dari 4 jenis, yaitu ZA, Urea, Organis, Phonska."</i>
8	Dari manakah BUMDes mendapatkan pupuk yang kemudian dijual kembali kepada para anggota kelompok tani?	<i>"Jadi kita bagi hasil sama kelompok tani dari hasil penjualan. Kita belinya dari lestari makmur."</i>
9	Berapa harga beli pupuk yang didapatkan BUMDes dan berapa harga jual yang ditetapkan oleh BUMDes?	<i>"Saya kurang hafal mbak.. yang jelas sudah menurut aturan pemerintah kare aitu kan bersubsidi. Terus untuk harga sepertinya kemarin tidak ada kenaikan. Cuma ada tiga kali pembelian dalam satu tahun."</i>
10	Berapa laba yang diperoleh BUMDes dari hasil penjualan pupuk?	<i>"Labanya kemarin 3 juta dari 3 kali transaksi penjualan."</i>
11	Apakah BUMDes memiliki tempat/gudang untuk menjalankan usahanya?	<i>"Kalau gudang sekarang itu ngga da. Kalau yang pupuk kita pakai gudangnya sementara milik kelompok tani. Jadi pupuk setelah dibeli dari lestari makmur langsung diletakkan di gudang yang berda di Dusun Robyong."</i>
12	Di Tahun 2022 apakah sudah memiliki pembukuan atau sudah menyusun laporan keuangan dari kegiatan penjualan pupuk?	<i>"Sudah ada. Dokumennya dalam bentuk digital semanya."</i>
13	Apakah di tahun 2022 masih belum ada laporan keuangan yang diserahkan ke pihak desa?	<i>"Belum...belum."</i>
14	Apakah terdapat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan BUMDes?	<i>"Kalau masyarakat luar ngga ada. Masyarakat luar paling yang membantu keuangan ya pihak internal sama pembina di desa yang membantu konsultasi masalah keuangan. Kalau untuk rapat yang mendatangkan masyarakat itu ada di waktu MUSDES. Jadi nanti MUSDES itu kita sebagai BUMDes melaporkan kinerja kita di tahun 2022 itu trus laporan keuangan dan"</i>

		<i>rencana di tahun selanjutnya begitu. Tapi yang tahun ini masih belum terlaksana. Itu juga kan ada tokoh masyarakat dan pihak BPD juga.</i>
15	Apakah terdapat pengawas dan pemeriksian oleh pihak desa dan pihak lain dalam kegiatan pengelolaan di BUMDes?	<i>“Pengawasan ada. Memang dalam struktural BUMDes sendiri ada pihak pengawas yaitu ketua BPD itu juga kita laporkan secara berkala. Setiap bulan kita ada laporan untuk meskipun tidak mendetail.</i>
16	Langkah apa yang anda lakukan apabila terdapat keterlambatan penyeteroran laporan keuangan dan penyeterorannya?	<i>“Itu pasti ditanyakan terus sama yang bersangkutan. Yang tahun 2022 kemarin baru dikumpulkan akhir tahun 2022.”</i>
17	Langkah apa yang anda lakukan apabila terdapat ketidaksesuaian nominal pada laporan keuangan?	<i>“Kalau yang kemarin kan cuma tiga transaksi ya jadi ya tidak ada perbedaan atau selisih.”</i>
18	Apakah laporan keuangan BUMDes sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ada?	<i>“Kalau yang diaplikasi iya sudah.”</i>
19	Apa saja kendala yang dialami dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BUMDes?	<i>“Saya pribadi sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan merasa kesulitan pada saat melakukan pencatatan mengenai penentuan antara transaksi dan alur pencatatannya.”</i>
20	Menurut pendapat anda apakah pengelolaan keuangan BUMDes sudah akuntabel dan transparan?	<i>“Menurut saya sudah sih...”</i>
21	Apakah dokumen-dokumen selama kegiatan pengelolaan BUMDes tersedia?	<i>“Kalau diakses secara umum masih belum yaa. Tapi diakses internal bisa. untuk dokumennya itu ada surat perjanjian mitra kerja antara BUMDes sama kelompok tani sama dokumen transaksi berupa faktur bukti pembelian dari lestari makmur.”</i>
22	Apakah bisa untuk diakses atau mudah diakses?	<i>“Kalau masalah itu saya masih belum tau saya juga belum konsultasi dengan pembina.”</i>
23	Apakah dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan BUMDes selalu melalui mustawarah yang melibatkan masyarakat?	<i>“ketika ada pelaporan masalah keuangan itu kita pasti mengadakan rapat. Sebenarnya diwajibkan satu tahun sekali untuk akhir tahun juga setiap semester. Nah itu kita mengundang pengawas dari BPD</i>

		<i>selaku perwakilan masyarakat, pembina dari kepala desa, pihak perangkat desa, dan pembina desa. kalau yang ada tokoh masyarakat itu hanya di MUSDES yang satu tahun sekali itu saja.</i>
24	Apakah laporan keuangan BUMDes boleh diakses secara umum?	<i>“Sejauh ini yang bisa mengakses hanya pihak internal saja”</i>
25	Bagaimana cara agar dapat mengetahui informasi mengenai keuangan BUMDes bagi pihak yang berkepentingan?	<i>“yaa bisa melalui saluranya.. BPD itu bisa atau bisa tanya langsung ke struktural BUMDes. Ke saya atau ke mas Hafid (Ketua BUMDes)”</i>

C. Informan 3

Nama : Bapak Tiknu
Jabatan : Kepala Desa Wonomulyo
Hari/Tanggal : Selasa, 11 April 2023
Tempat : Kantor Desa Wonomulyo

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan mulai berdiri BUMDes di Desa Wonomulyo ini?	<i>"Tahun 2022. Tapi kalau bulanya saya lupa."</i>
2	Bagaimana awal mula atau hal apa yang mendasari didirikannya BUMDes di Desa Wonomulyo?	<i>"Yang mendasari berdirinya BUMDes yang jelas ingin menata nilai ekonomi masyarakat desa."</i>
3	Jenis usaha apa saja yang sudah diprogramkan di awal pendirian BUMDes?	<i>"Awalnya dulu ada pengolahan sampah, pasar desa, penjualan pupuk ,penjualan beras.Tapi untuk tahun 2022 hanya pupuk saja yang sudah berjalan"</i>
4	Mengapa memilih usaha tersebut pada ushaa BUMDes?	<i>"Sebelumnya masih nihil dengan adanya gagasan seperti ruko,pupuk itu munculnya dari keluhan warga terutama masalah pupuk.soalnya warga sini kan 90% petani jadi sementara mengarahkan yang pertama ini ke pupuk. Trus yang kedua dengan adanya pertambahan ruko dalam hal perdagangan. Yaa kedepanya mungkin bisa kongkrit bilamana yang telah direncanakan desa seperti pasar desa. embung, dan masalah sampah."</i>
5	Apa tugas anda sebagai kepala desa atau sebagai pihak yang ikut serta dalam pengelolaan keuangan BUMDes?	<i>"yaa dalam pengelolaan BUMDes sebagai pengawas."</i>
6	Berapa besar dana yang diberikan oleh desa untuk menjalankan usaha BUMDes dan berapa dana yang dialokasikan untuk usaha pupuk pada tahun 2022?	<i>"Kalau dulu itu anggaran yang diturunkan untuk BUMDes sekitar 50 juta."</i>
7	Dari manakah BUMDes mendapatkan pupuk yang kemudian dijual kembali kepada para anggota kelompok tani?	<i>"Dari KUM Lestrai Makmur."</i>
8	Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan pada unit	<i>"Yang jelas mekanismenya itu ya bagi hasil sama prosentase dari</i>

	usaha BUMDes?	<i>hasilnya. Itupun kalau berjalan dengan normal. Yang penting dalam kepengurusan BUMDes bisa mencukupi operasionalnya BUMDes."</i>
9	Terkait anggaran yang diberikan kepada BUMDes, apakah BUMDes sebelumnya mengajukan proposal?	<i>"iyaa BUMDes mengajukan proposal."</i>
10	Di Tahun 2022 apakah sudah memiliki pembukuan atau sudah menyusun laporan keuangan dari kegiatan penjualan pupuk?	<i>"Sudah.."</i>
11	Apakah di tahun 2022 masih belum ada laporan keuangan yang diserahkan ke pihak desa?	<i>"Sementara ini kayaknya belum. Kayak waktu rapat itu sudah disampaikan pada satu tahun menghasilkan laba sekian. Hanya itu saja. Secara tertulis masih belum."</i>
12	Langkah apa yang dilakukan oleh pihak desa apabila BUMDes belum menyerahkan laporan keuangan?	<i>"Yang jelas kita pertanyakan laporanya secara pembukuanya dengan laba sekian menghasilkan sekian itu jelas kita pertanyakan."</i>
13	Apakah usaha BUMDes di tahun 2022 memiliki laba?	<i>"Ada... ada labanya. Laba tersebut dibagi hasil sesuai dengan kepengurusan."</i>
14	Apakah terdapat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan BUMDes?	<i>"Bayak.. masukan dari masyarakat menghendaki dari adanya BUMDes karena untuk pengelolaan ekonomi desa itu yang bisa memajukan dari BUMDes terutama warga kita ini kaum petani utamanya itu masalah pupuk. Disamping itu masalah perdagangan kita punya pasar."</i>
15	Apakah terdapat pengawas dan pemeriksaa oleh pihak desa dan pihak lain dalam kegiatan pengelolaan di BUMDes?	<i>"Iya ada.. dari saya sendiri selalu koordinasi dengan Sekdes sebagai operator tentang pengeluaran uang, pemasukan."</i>
16	Kapan diadakan pertemuan?	<i>"Rencananya kemarin itu diadakan pertemuan rentang waktu 1 atau 2 bulan sekali."</i>
17	Penyampaian laporan kepada anda dan pihak desa lainnya dilakukan kapan?	<i>"Akhir tahun.. masih masuk tahun 2022"</i>
18	Bagaimana yang anda lakukan apabila mengetahui ketidaksesuaian nominal didalam	<i>"Yaa kita mengcrosscheck ulang untuk pembenahan kesalahan atau kekurangan itu."</i>

	laporan yang telah disampaikan?	
19	Apakah laporan keuangan BUMDes sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ada?	<i>"Sudah sesuai dengan prosedur."</i>
20	Apa saja kendala yang dialami dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BUMDes?	<i>"Yang jelas masalah keuangan dengan anggaran yang diajukan tidak bisa harus dipenuhi. Karena juga desa membagi dana untuk porsi porsi kebutuhan yang lainnya.sejauh ini upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan, pengarahannya yang ada di lapangan."</i>
21	Menurut pendapat anda apakah pengelolaan keuangan BUMDes sudah akuntabel dan transparan?	<i>"Kalau menurut saya pribadi "sudah...tapi hanya sebatas internal antara pihak desa dan BUMDes."</i>
22	Apakah dokumen-dokumen selama kegiatan pengelolaan BUMDes tersedia dan mudah untuk diakses?	<i>"Yang jelas masalah dokumen tentang laporannya ke saya itu belum ada. Dan untuk dokumen-dokumen lainnya itu saya kurang paham."</i>
23	Apakah dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan BUMDes selalu melalui mustawarah yang melibatkan masyarakat?	<i>"Sementara ini masih dalam internal karena volumenya masih kecil.Kalau untuk kedepannya apabila sudah mencakup volume yang lebih besar insyaallah bisa melibatkan masyarakat juga"</i>
24	Apakah laporan keuangan BUMDes boleh diakses secara umum?	<i>" boleh..boleh.."</i>
25	Bagaimana cara agar dapat mengetahui informasi mengenai keuangan BUMDes bagi pihak yang berkepentingan?	<i>"Yaa ke struktural BUMDesnya bisa."</i>

D. Informan 4

Nama : Mas Riyan
Jabatan : Sekretaris Desa Wonomulyo
Hari/Tanggal : Selasa, 11 April 2023
Tempat : Kantor Desa Wonomulyo

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan mulai berdiri BUMDes di Desa Wonomulyo ini?	<i>"Awal tahun 2019."</i>
2	Bagaimana awal mula atau hal apa yang mendasari didirikannya BUMDes di Desa Wonomulyo?	<i>"Yaa kalau mendasari ya memang dorongan dari UU dari kementerian desa itu menyarankan memang desa harus punya BUMDes."</i>
3	Jenis usaha apa saja yang sudah diprogramkan di awal pendirian BUMDes?	<i>"Kalau usaha terprogram itu tergantung BUMDes awalnya desa juga belum punya pemikiran karena kita juga tidak bisa memberikan ide kalau tidak diajak rapat. Soalnya BUMDes berdiri sendiri dan mempunyai porsi sendiri untuk membesarkan BUMDes. Kalau usaha itu awal awal itu di pertanian dan perdagangan pupuk.dan berkembangnya sekarang se sembako (beras). Trus nanti ada ruko disebelah lapangan. Kalau pupuk itu sudah dari tahun 2020 tapi jalanya tahun 2021. Karena proses pupuk itu kan lama."</i>
4	Mengapa memilih usaha tersebut pada ushaa BUMDes?	<i>"Karena mayoritas desa kita kan bertani jadi kita membantu walaupun sebenarnya diomongkan penghasilan itu minim kalau pupuk. Tapi kan kita ada efek bantu ke petani ada subsid ini bisa ditebus oleh masyarakat yang mayoritas petani."</i>
5	Apa tugas anda sebagai sekretaris desa atau sebagai pihak yang ikut serta dalam pengelolaan keuangan BUMDes?	<i>"Kalau dari yang saya sampaikan di awal tadi karena BUMDes adalah bentuknya desa tapi berdiri dan tidak boleh ada interfensi dari desa termasuk dari saya. Jadi saya di BUMDes di struktural BUMDes tidak jadi apa-apa. Saya hanya sering diajak konsultasi oleh teman-teman BUMDes. Cuma itu saja.jadi</i>

		<i>saya Cuma membantu pemikiran saya mulai dari keuangan, dan semanya lah.”</i>
6	Berapa besar dana yang diberikan oleh desa untuk menjalankan usaha BUMDes dan berapa dana yang dialokasikan untuk usaha pupuk pada tahun 2022?	<i>“Kalau di tahun 2022 itu sekitar 97 juta sekian untuk pupuk saja. Itu sudah sama operasional. Karena kita tetep menganggarkan untuk teman-teman bisa jalan. Trus kalau ngga jalan ngga digaji kan kasihan. Kemudian anggaran yang digunakan murni untuk usaha itu sekitar 53 juta.”</i>
7	Terkait anggaran yang diberikan kepada BUMDes, apakah BUMDes sebelumnya mengajukan proposal?	<i>“Iyaa.. jadi dari besaran 97 juta sekian itu sebelumnya stelah BUMDes terbentuk kemudian kita rapat. Tahun 2021 kita udah menyiapkan anggaran tapi BUMDes ada kendala di internal. Lalu tahun 2022 kita baru jalan dan sebelumnya pengajuan proposal.”</i>
8	Di Tahun 2022 apakah sudah memiliki pembukuan atau sudah menyusun laporan keuangan dari kegiatan penjualan pupuk?	<i>“Kalau masalah itu bisa ditanyakan ke temen BUMDes. Kayaknya sudah ada kalau laporan itu.”</i>
9	Apakah di tahun 2022 masih belum ada laporan keuangan yang diserahkan ke pihak desa?	<i>“Laporan keuangan yang tahun 2022 yang tertulis masih belum diserahkan. Sampai saat ini belum. Yang disampaikan hanya lisan saja pas rapat bersama. Ada BUMDes, pengawas, pendamping, ada pak lurah. Itu dilaksanakan sebelum puasa kemarin. karena pelaporan itu paling lambat dilakukan tahun berikutnya paling lambat 3 bulan. Yang kemarin itu rapat dilaksanakan sekitar februari.”</i>
10	Langkah apa yang dilakukan oleh pihak desa apabila BUMDes belum menyerahkan laporan keuangan?	<i>“ Yaaa..mungkin kita ajak rapat. Tapi kan kita tetep harus ada mekanisme yang tepat. Kalau tiba-tiba mengajak rapat kan nggak etis karena mereka (BUMDes) juga punya badan pengawas. Jadi kita hubungi dulu pengawasnya untuk melaksanakan rapat. Sampai saat ini desa juga tetap terus meminta laporanya karena desa</i>

		<i>yang memberikan modal jadi kita harus mengetahui keuangan itu.”</i>
11	Apakah terdapat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan BUMDes?	<i>“Iya ada... kalau pupuk itu malah masyarakat yang melaksanakan. Iyaa petani yang melaksanakan. Kalau di pupuk itu GAPOKTAN itu gabungan kelompok tani. itu yang menjalankan dengan petani-petani yang lain. Kalau mekanismenya kan yang mengumpulkan data-data petani itu GAPOKTAN kemudian dimasukkan ke desa lewat BUMDes. Nah BUMDes menyalurkan pupuk sesuai yang disampaikan oleh GAPOKTAN.”</i>
12	Apakah terdapat pengawas dan pemeriksaan oleh pihak desa dan pihak lain dalam kegiatan pengelolaan di BUMDes?	<i>“Ada.. karena kan BUMDes ini program prioritas dari pemerintah pusat itu melalui pemerintah desa namanya pendamping desa. pendamping desa lah yang mengontrol semua kegiatan BUMDes. Kemarin juga ada rapat dengan pengawas dalam rangka penyampaian sesuatu di BUMDes saya juga ikut. Pendamping desa nya ada dari kementrian desa. jika saya dibutuhkan untuk pengawas dan pemeriksa saya saya periksa tapi tergantung dari kepala desa karena beliaulah yang berwenang.”</i>
13	Penyampaian laporan kepada anda dan pihak desa lainnya dilakukan kapan?	<i>“Sebelum Puasa kemarin sekitar bulan februari.”</i>
14	Apakah laporan keuangan BUMDes sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ada?	<i>“Kalau ngomongin sesuai dengan standar akuntansi kayaknya belum. Karena kan kalau kita standar harus banyak pembinaan, BIMTEK, dan sebagainya. Itu yang minim di BUMDes.”</i>
15	Apa saja kendala yang dialami dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BUMDes?	<i>“Kendalanya ada di sistem digitalisasi. Jadi teman BUMDes masih akan menuju ke aplikasi untuk pembuatan laporan keuangannya.”</i>
16	Sejauh ini upaya apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?	<i>“Yaa lagi-lagi pernyataan modal. Kalau kita sudah ngomongin aplikasi kan sudah ada harga. Kalau</i>

		<i>kita punya aplikasi tidak punya nggaran ta tetep aja kita manual. Karena kalau sisi keuangan pasti sekarang sudah haris digitalisasi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.</i>
17	Sejauh bagaimana akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan di BUMDes ini?	<i>“Kalau akuntabilitas dan transparansi karena kan manual jadi bisa saja memanipulasi. Kalau dikatakan akuntabel dan transparan menurut saya pribadi mau ngomong sudah akuntabel dan transparan itu takut salah ngomong belum akuntabel dan transparan juga takut disalahkan. Jadi yang bisa menjawab itu ya bukan saya. Saya tidak punya wewenang jadi takut salah. Bisa ditanyakan ke teman-teman BUMDEs saja.”</i>
18	Apakah dokumen-dokumen selama kegiatan pengelolaan BUMDes tersedia dan mudah untuk diakses untuk umum?	<i>“kalau untuk dokumen itu pasti ada dan temen-temen BUMDes sendiri itu pasti buat. Tiap triwulan sekali pasti mengadakan rapat internal untuk menyampikan. Kalau untuk akses dokumen BUMDes karena itu perusahaan ngga mungkin untuk dipublikasikan. Tapi kalau misal mau dibuat penelitian itu mungkin bisa. Tapi balik lagi tergantung dengan temen-temen BUMDes. Tapi kalau untuk publikasi tidak boleh.”</i>
19	Apakah dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan BUMDes selalu melalui mustawarah yang melibatkan masyarakat?	<i>“Kalau musyawarah terkait BUMDes kita rapatnya dengan BPD saja yang mewakili masyarakat.”</i>
20	Bagaimana cara agar dapat mengetahui informasi mengenai keuangan BUMDes bagi pihak yang berkepentingan?	<i>“Yaa langsung ke BUMDes saja.”</i>

E. Informan 5

Nama : Bapak Mantri
Jabatan : Bendahara Desa Wonomulyo
Hari/Tanggal : Selasa, 11 April 2023
Tempat : Kantor Desa Wonomulyo

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan mulai berdiri BUMDes di Desa Wonomulyo ini?	<i>"BUMDes itu dari tahun 2021."</i>
	Bagaimana awal mula atau hal apa yang mendasari didirikannya BUMDes di Desa Wonomulyo?	<i>"Dalam rangka persiapan untuk membenruk desa yang mandiri. Karena kedepannya mungkin dana desa itu nggak selamanya akan ada. Jdi BUMDes diharpkan dibentuk awal-awal sewaktu-waktu dana desa sudah tidak ada, desa sudah bisa berkembang dengan anggaran yang dikelola sendiri yang disebut Pendapatan Asli Desa (PAD). Jadi tidak mengharapkan anggaran dari pusat lagi. Wacananya seperti itu."</i>
23	Jenis usaha apa saja yang sudah diprogramkan di awal pendirian BUMDes?	<i>"Karena ini masih merintis, BUMDes di Wonomulyo ini sementara ini kalau mulai awal itu programnya cuma pengadaan pupuk sembako sama pengolahan sampah. Ini mulai tahun 2021. Tapi dari program itu ada yang masih belum jalan. Kayak pengolahan sampah itu belum jalan. Mobilnya sudah ada tapi pengaturanya yang belum. Kalau pupuk sudah jalan mulai tahun 2022. Tahun 2021 itu fokus pembentukan. Yang membuat programnya nggak jalan karena belum ada kesiapan dari BUMDes untuk menjalankan program yang sudah ada. Jadi anggaran 2021 tidak dikeluarkan dan mulai dikeluarkanya tahun 2022."</i>
3	Mengapa memilih usaha tersebut pada ushaa BUMDes?	<i>"kalau pupuk itu termasuk kebutuhan masyarakat jadi agak menyimpang dari prinsip BUMDes untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Senenarnya sih ngga ada keuntunganya</i>

		<i>menjalankan usaha pupuk mbak.</i>
4	Apa tugas anda sebagai bendahara desa atau sebagai pihak yang ikut serta dalam pengelolaan keuangan BUMDes?	<i>“Kalau di dalam BUMDes perangkat desa tidak boleh terlibat di dalamnya. Jadi peran utama perangkat desa disini termasuk bendahara mensupport BUMDes dalam hal anggaran. Ketika awal tahun BUMDes mengajukan anggaran modal untuk BUMDes desa berusaha semaksimal mungkin memberikan modal itu agar bisa segera digunakan. Karena kalau BUMDes itu kan permintaan modal sama dengan pelaksanaan yang lain. Kadang mintanya sekian tapi realisasinya belum tentu sesuai jadi dibagi dengan yang lainnya.”</i>
5	Labanya yang didapatkan BUMDes apakah untuk sendiri atau akan dibagi hasil dengan desa?	<i>“Labanya BUMDes sudah diatur di ADAT BUMDes yang dibentuk mulai awal pembentukan BUMDes dan direvisi setiap tahun. Disitu ada mencantumkan honor masing-masing BUMDes itu ada honor, jadi honor dan bagi hasil untuk desa yang dibahas waktu ADAT sekian persen. Nantinya kalau yang masuk ke desa itu sudah disebut PAD”</i>
67	Berapa besar dana yang diberikan oleh desa untuk menjalankan usaha BUMDes dan berapa dana yang dialokasikan untuk usaha pupuk pada tahun 2022?	<i>“Tahun 2022 itu 50 juta anggaran untuk pupuk.”</i>
7	Terkait anggaran yang diberikan kepada BUMDes, apakah BUMDes sebelumnya mengajukan proposal?	<i>“BUMDes membuat proposal untuk dimasukkan ke APBDes itu tahun anggaran berjalan. Sebelum waktu penetapan untuk APBDes. Jadi BUMDes menyerahkan proposal di bulan Desember 2023.”</i>
8	Apakah usaha BUMDes di tahun 2022 memiliki laba?	<i>“Kalau untuk labanya bisa langsung ditanyakan ke pihak BUMDes. Kalau laporan kemarin ada labanya cuma secara detail saya kurang paham.”</i>
9	Di Tahun 2022 apakah sudah memiliki pembukuan atau sudah	<i>“Termasuk itu nanti bisa ditanyakan ke Pak Sekdes. Jadi intinya BUMDes</i>

	menyusun laporan keuangan dari kegiatan penjualan pupuk?	<i>akhir tahun memang harus membuat laporan keuangan yang diberikan ke desa, yaitu pak Kades dan Pak Sekdes selaku tangan kanan dari kepala desa."</i>
10	Apakah di tahun 2022 masih belum ada laporan keuangan yang diserahkan ke pihak desa?	<i>"Secara aturan harusnya sudah tapi pada kenyataannya mbaknya harus tanya pada Pak Sekdes. Harusnya memang sudah dan wajib juga."</i>
11	Langkah apa yang dilakukan oleh pihak desa apabila BUMDes belum menyerahkan laporan keuangan?	<i>"Jadi laporan keuangan BUMDes itu harus dilaporkan setiap akhir tahun. Ketika akhir tahun BUMDes tidak bisa melaporkan permodalan yang sudah diberikan maka kemungkinan besar BUMDes tidak bisa mengajukan proposal untuk tahun anggaran berikutnya."</i>
12	Apakah terdapat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan BUMDes?	<i>"Kalaun untuk keuangan BUMDes itu dibahas dalam forum internal yang dihadiri oleh BPD (wakil masyarakat)."</i>
13	Apakah terdapat pengawas dan pemeriksaan oleh pihak desa dan pihak lain dalam kegiatan pengelolaan di BUMDes?	<i>"Kalau BUMDes pengelolaan keuangan dari desa. jadi disitu sudah ada pengawas dari pihak BUMDes termasuk BPD itu tadi. Kepala desa juga ada sebagai penasehat BUMDes. Sistem pengawasannya itu kebetulan setiap bulan ada pertemuan rutin untuk melaporkan kegiatan BUMDes itu."</i>
14	Apakah laporan keuangan BUMDes sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ada?	<i>"nah itu juga bisa ditanyakan ke Pak Sekdes."</i>
15	Apa saja kendala yang dialami dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BUMDes?	<i>"Mungkin kalau pertanyaan yang itu bisa ditanyakan ke BUMDes saja sebagai pihak yang berhubungan langsung. Desa siap membantu ketika ada kesulitan."</i>
16	Sejauh ini upaya apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi keterlambatan penyetoran laporan keuangan?	<i>"Sejauh ini masih belum ada hal seperti itu. Katrena tahun ini sistem dan program berjalan seperti biasa."</i>
17	Sejauh bagaimana akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan di BUMDes ini?	<i>"Kalau menurut saya pribadi sudah."</i>

18	Apakah dokumen-dokumen selama kegiatan pengelolaan BUMDes tersedia dan mudah untuk diakses untuk umum?	<i>“Kebetulan belum kayaknya. Mungkin itu bisa dijadikan pertanyaan kepada teman-teman BUMDes terkait transparansinya seperti apa. Karena sejauh ini masih belum ada. Kalau untuk akses secara langsung mungkin bisa tapi kalau umum masih belum ada. Jadi kalau mau menanyakan hal-hal yang sifatnya intern bisa langsung ke pihak BUMDes.</i> <i>Untuk laporan keuangan BUMDes boleh diakses secara umum. Karena BUMDes harus dan wajib menyampaikan laporannya ke pengawas itu tadi yaitu BPD yang merupakan wakil masyarakat dan nanti setiap awal tahun itu ada yang namanya penetapan APBDes dan BUMDes harus presentasi atas kegiatan yang telah dilakukan pada forum MUSDES.</i>
19	Bagaimana cara agar dapat mengetahui informasi mengenai keuangan BUMDes bagi pihak yang berkepentingan?	<i>“Kalau itu bisa langsung ke struktural BUMDes saja mbak.”</i>

F. Informan 6

Nama : Bapak Susiaji
Jabatan : Ketua BPD Desa Wonomulyo
Hari/Tanggal : Kamis, 13 April 2023
Tempat : Kantor Desa Wonomulyo

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebagai BPD apa peran anda di dalam pengelolaan keuangan BUMDes?	<i>"Saya sebagai pengawas BUMDes. Memang kan pengawas diambilkan dari BPD. Saya akan mengawasi jalannya keuangannya itu gimana. Kalau untuk usaha pupuk itu kemarin sudah saya tanyakan tapi hanya katanya-katanya saja. Katanya uangnya pupuk sudah ada semua, sudah balik dan sudah ada laba sekian. "</i>
2	Apakah setiap BUMDes mengadakan rapat anda selalu hadir?	<i>"Iya saya pasti diundang dan saya hadir."</i>
3	Selama tahun 2022 apakah anda ikut pertemuan BUMDes?	<i>"Tahun 2022 tidak karena memang kelihantanya masih fakum masih belum berjalan secara maksimal. Kan terjadi kekurangan pengurus ada 2 orang yang mengundurkan diri. Sebetulnya saya sudah sering mengusulkan ke Pak Lurah terkait kekosongan posisi bendahara dan wakil yang ada di BUMDes. Akhirnya baru di akhir tahun 2022 baru ada gantinya."</i>
4	Bagaimana mekanisme pemberian modal dari desa kepada BUMDes?	<i>"Kalau untuk tahun 2022 kemarin sepertinya pemberian uangnya dilakukan secara langsung oleh Pak Carik."</i>
5	Anda sebagai ketua BPD dan pengawas BUMDes melakukan pengawasan dalam hal apa?	<i>"Yaa saya mengawasi dalam hal kinerja BUMDes termasuk juga mengenai keuangannya."</i>
6	Bagaimana bentuk pengelolaan keuangan di BUMDes?	<i>"Modal yang diterima dari desa langsung digunakan untuk penebusan pupuk ke lestari Makmur. Kemudian dalam jangka waktu berapa gitu uangnya kembali dari hasil penjualan ke kelompok tani beserta labanya. Untuk labanya yang kemarin sepertinya tidak</i>

		<i>banyak sehingga kemudian dialihkan tidak pupuk lagi. Dan saat ini pupuk bersubsidi juga sudah tidak ada lagi.</i>
7	Terjadi berapa transaksi pada penjualan pupuk di tahun 2022?	<i>"Setau saya hanya 1 kali di Pak hendro."</i>
8	Sebagai BPD bagaimana peran anda selaku perwakilan masyarakat di BUMDes?	<i>"Ya sesuai dengan tugasnya saja mbak kalau saya. Kalau ada aspirasi masyarakat ya saya tampung, saya kelola, dan saya rapatkan dengan anggota yang lainnya. kemudian dari situ apa yang dikeluhkan masyarakat tentang desa ini. Tugas lainnya juga mengawasi kinerja kepala desa. Kemudian tugas lainnya juga membuat peraturan desa. saya menjalankan hanya sebatas itu."</i>
9	Apakah anda mengetahui besaran dana yang turun dari desa untuk BUMDes?	<i>"Yaa saya diberitahu oleh Pak Carik. Untuk BUMDes sekitar 50 juta. Saya juga tidak begitu mendetail."</i>
10	Apakah dalam sudah ada laporan keuangan dari usaha pupuk di tahun 2022?	<i>"Eee belum. Cuma dengar saja sudah dilaporkan tapi laporan secara tertulis masih belum diserahkan. Kemungkinan bentuk tertulisnya sudah ada. Nah tapi akan saya tanyakan terus laporan secara tertulisnya dan tanda tangan petinggi lainnya harus jelas. Jadi kemarin cuma ngomong-ngomong saja gitu. Sekretaris BUMDes ngomongnya pelaporan secara rinci akan dilakukan di musyawarah desa nanti."</i>
11	Kapan dilaksanakan pelaporan secara internal?	<i>"Tanggal 20 Maret kemarin ini mbak..kemudian ada lagi tapi saya lupa tanggal berapa karena saya juga tidak hadir. Undanganya hanya lewat WhatsApp saja tidak ada undangan resmi."</i>
12	Apa saja kendala dalam pengelolaan keuangan di BUMdes?	<i>"Kendalanya itu kemarin kurangnya komunikasi. Sehingga berantakan semua. Kemarin saya menegaskan kalau ada apa-apa itu ngomong masalahnya ini kita pegang uangnya orang banyak, jangan ditangani</i>

		<i>sendiri.”</i>
13	Apakah ada keterlibatan masyarakat dalam usaha BUMDes?	<i>“Sepertinya tidak ada sih. Cuma seperti mekanisme transaksi penjualan pada umumnya. Ada pendapatan ada laba, gitu aja.”</i>
14	Upaya apa yang anda lakukan ketika laporan keuangan belum diserahkan kepada anda selaku pihak pengawas dan pihak perwakilan masyarakat?	<i>“Kalau misal ada rapat lagi nanti karena kemarin diagendakan itu rapatnya tiap bulan. Nah itu akan saya minta terus pertanggungjawabannya gimana. Harus jelas uangnya di pupuk itu berapa nanti diminta hitam diatas putihnya mana.nah itu nanti tugas dari pengawas untuk mengetahui itu semua jangan sampai ada uang yang tidak jelas dan tidak ada bukti catatannya. Kalau Mbak Putri (Sekretaris BUMDes) insyaallah tertib. Tapi terkadang di lapangan itu yang kurang tertib.”</i>
15	Dokumen terkait pengelolaan keuangan BUMDes apakah tersedia?	<i>“Insyaallah tersedia. Tapi ya itu tadi mungkin di lapangnya yang kurang. Karena orang-orangnya pun juga kurang telaten kalau disuruh untuk mencatat. Mangkanya kemarin itu disusulkan untuk pencatatannya diusulkan lewat aplikasi tapi saya lupa aplikasinya apa dan sudah disepakati bersama.”</i>
16	Siapa sajakah yang boleh atau bisa mengakses dokumen BUMDes?	<i>“Sekretaris, bendahara, dan pelaku itu yang saya tau selama ini. Tapi untuk aturanya saya masih belum tau siapa saya yang boleh.”</i>
17	Apakah masyarakat umum boleh mengakses?	<i>“oh itu bisa insyaallah bisa. Itu bebas bukan rahasia. Menurut saya itu bisa bebas sekali dan bolehseklai karena kan itu uang masyarakat bukan uang pribadi. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau tidak boleh berarti ada apa-apa itu.”</i>
18	Bagaimana solusi untuk mengatasi pernyataan boleh dan tidak boleh dalam hal mengakses dokumen BUMDes?	<i>“Yaa itu akan dirapatkan nanti. Kita akan ambil kesepakatan di rapat kalau memang tidak boleh mengapa alasanya, aturanya apa nah itu harus tau. Kalau saya pribadi</i>

		<i>berpendapat itu boleh saja karna ingin uang rakyat jadi wajar kalau rakyat ingin tau, bahkan memang harus dilaporkan ke rakyat itu nanti.mangkanya kemarin dikatakan bahwa katanya mau disampaikan di MUSDES.”</i>
19	Kapan dilaksanakanya MUSDES?	<i>“Minimal satu tahun sekali. Nanti tergantung desa gimana. Kalau BPD kan tinggal mengikuti saja. Kalau desa sudah siap ya BPD juga siap.”</i>
20	Menurut anda pribadi BUMDes ini apakah sudah akuntabel dan transparan dalam melakukan pengelolaan keuanganya?	<i>“Kalau menurut saya sudah tapi masih kurang karena masih belum bentuk laporan jelasnya. Bilangnya Cuma mau dilaporkan di MUSDES tapi tetap akan saya minta terus tiap rapat bulanan.”</i>

G. Informan 7

Nama : Bapak Endro
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Desa Wonomulyo
Hari/Tanggal : Kamis, 6 April 2023
Tempat : Rumah Bapak Endro

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Manfaat apa yang anda terima dari adanya penjualan pupuk bersubsidi pada BUMDes?	<i>"Pertama memang prtani tidak membutuhkan anggaran besar untuk penebusan pupuk. Yang kedua memang pupuk bagi petani sangat dibutuhkan dan subsidi juga sangat membantu meskipun tidak banyak. Untuk masa panen 3-4 bulan kedepan.</i>
2	Apakah terdapat pembatasan dalam pembelian pupuk?	<i>"Adaa... petani dibatasi tiap ukuran luas lahan, sesuai RDKK petani jadi pembatasannya tidak tiap transaksi. Untuk tiap ¼ Ha lahan itu mendapatkan kurang lebih sekian kwintal/kilo. Yang dulunya ¼ Ha mendapat sekitar 300 Kg sekarang mungkin cuma 30 Kg dan itu hanya untuk tanaman tertentu saja."</i>
3	Menurut anda harga yang ditawarkan di BUMDes lebih mahal/lebih murah dari harga umum dipasaran?	<i>"Kalau subsidi ya memang harga jualnya harus segitu. Jadi untuk subsidi harga jualnya tidak boleh melebihi dari harga HIT yang telah ditentukan. Tapi kalau di kelompok tani penjualannya terdapat penambahan sekitar Rp 15.000 itu ya masih tidak apa-apa karena itu masih lumrah untuk tambahan biaya operasional. Untuk tempat transaksinya itu ada di tempat kelompok tani. dikelompok tani ada gudang khusus. Jadi kalau pupuk datang langsung ditaruh disitu. Diambil dulu dari KUM Lestrai Makmur baru dikirim ke situ. Bayarnya juga ke kelompok tani. jadi ada anggota sebanyak 2 orang yang memang berperan melayani penjualan dan melakukan pengelolaan keuangan. Setelah itu kelompok tani menyerahkan uang</i>

		<i>hasil penjualan kepada pihak BUMDes.”</i>
4	Berapakah nominal uang yang anda keluarkan untuk membeli produk pupuk di BUMDes?	<i>“Untuk nominalnya itu beda-beda mbak tiap jenisnya. Ada yang Rp 115.000, Rp 117.000, 127.500.”</i>
5	Apakah produk yang dijual pada BUMDes memiliki kualitas yang baik?	<i>“Menurut saya ya sudah baik karena dari petro resmi jadi ya memiliki kualitas baik. Artinya pupuk itu asli bukan barang tiruan. Karena kan sekarang juga banyak produk-produk tiruan.”</i>
6	Apakah anda puas dengan pelayanan dan produk yang ada dapatkan di BUMDes?	<i>“iyaa saya puas karena telah sedikit membantu dalam hal penyediaan pupuk walaupun tidak bisa dalam jumlah yang banyak.”</i>
7	Anda sebagai masyarakat Desa Wonomulyo serta anggota kelompok tani apakah pernah diundang untuk menghadiri rapat musyawarah desa yang didalamnya terdapat pelaporan pertanggungjawaban BUMDes?	<i>“Sejauh ini masih belum ada penyampaian yang diberikan. Harusnya memang ada tapi ini masih belum ada.”</i>

H. Informan 8

Nama : Bapak Dodik
Jabatan : Anggota Kelompok Tani Desa Wonomulyo
Hari/Tanggal : Kamis, 6 April 2023
Tempat : Rumah Bapak Dodik

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Manfaat apa yang anda terima dari adanya penjualan pupuk bersubsidi pada BUMDes?	<i>"Dengan adanya penjualan pupuk yang merupakan kerjasama antara BUMDes dengan kelompok tani adalah saya dan teman-teman kelompok tani lainya merasa terbantu dalam hal pengadaan pupuk dan harga yang sedikit beda dengan toko biasa. Yaa walaupun tidak banyak tetapi setidaknya lumayan lah."</i>
2	Apakah terdapat pembatasan dalam pembelian pupuk?	<i>"Yaa.. namanya subsidi ya pasti ada batasanya. Karena kalau tidak ada batasan kasian teman-teman lain yang tidak kebagian. Pembatasanya itu sesuai dengan luas lahan yang dimiliki oleh masing-masing petani. Jadi masing-masing petani tidak sama dapatnya."</i>
3	Menurut anda harga yang ditawarkan di BUMDes lebih mahal/lebih murah dari harga umum dipasaran?	<i>"menurut saya lebih murah karena memang subsidi. Tapi ya itu tadi meskipun haragnya lebih murah sedikit tetapi untuk jumlahnya terbatas. Sehingga apabila dalam pemakaian kita masih ada kekurangan ya mau gak mau kita beli lagi di toko pupuk biasa lainya."</i>
4	Berapakah nominal uang yang anda keluarkan untuk membeli produk pupuk di BUMDes?	<i>"saya kok lupa yaa yang jelas sudah ada seperti daftar harganya itu karena tiap jenis pupuk itu harganya beda-beda."</i>
5	Apakah produk yang dijual pada BUMDes memiliki kualitas yang baik?	<i>"Alhamdulillah sejauh ini menggunakan produk pupuk bersubsidi ini cocok dan sama seperti pupuk yang dijual toko lainya."</i>
6	Apakah anda puas dengan pelayanan dan produk yang ada dapatkan di BUMDes?	<i>"Kalau dikatakan puas ya puas karena produk pupuknya juga baik tapi kalau dikatakan kurang puas ya</i>

		<i>ada rasa kurang puasnya karena ya itu tadi adanya batasan pembelian jadi percuma kalau ada kurangnya ya masih harus beli lagi di tempat lain.”</i>
7	Anda sebagai masyarakat Desa Wonomulyo serta anggota kelompok tani apakah pernah diundang untuk menghadiri rapat musyawarah desa yang didalamnya terdapat pelaporan pertanggungjawaban BUMDes?	<i>“sejauh ini tidak pernah. Jadi yang saya tau maslaah keuanganya yaa catatan yang ada dibuat oleh teman-teman kelompok tani sendiri.”</i>

I. Informan 9

Nama : Bapak Dodik
Jabatan : Anggota Kelompok Tani Desa Wonomulyo
Hari/Tanggal : Kamis, 6 April 2023
Tempat : Rumah Bapak Dodik

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Manfaat apa yang anda terima dari adanya penjualan pupuk bersubsidi pada BUMDes?	<i>"Yaa saya merasa sedikit terbantu dan lumayan juga bisa mendapatkan pupuk dengan harga yang sedikit beda dengan di toko lain sehingga juga bisa sedikit menghemat pengeluaran untuk pembelian pupuk."</i>
2	Apakah terdapat pembatasan dalam pembelian pupuk?	<i>"Iyaa ada. Pembatasannya itu tergantung dengan luas lahan yang saya dan teman-teman miliki. Tapi ini yang jadi kekurangannya. Sehingga kita tidak bisa bebas melakukan jumlah pembelian."</i>
3	Menurut anda harga yang ditawarkan di BUMDes lebih mahal/lebih murah dari harga umum dipasaran?	<i>"Iyaa sedikit ada bedanya. Karena subsidi ini kan ada bantuan dari pemerintah juga kan untuk harganya. Beda dengan di toko umumnya. Tapi kalau di toko kita bisa membeli dalam jumlah berapapun. Jadi yaa masing-masing punya kelebihan dan kekurangan tersendiri."</i>
4	Berapakah nominal uang yang anda keluarkan untuk membeli produk pupuk di BUMDes?	<i>"Terakhir saya beli itu harganya kalau ngga salah Rp 115.000/ kantongnya. Itu untuk jenis pupuk ZA dan Rp 117.500 untuk jenis pupuk Phonska. Karena saya hanya beli 2 jenis itu saja."</i>
5	Apakah produk yang dijual pada BUMDes memiliki kualitas yang baik?	<i>"Iyaaa sama lah seperti pada toko lain juga."</i>
6	Apakah anda puas dengan pelayanan dan produk yang ada dapatkan di BUMDes?	<i>"Seperti yang sudah saya katakan itu tadi, ada kelebihan dan kekurangan. Jadi antara puas dan kurang puas kalau saya. Gimana ya karena ada pembatasan itu tadi. Tapi saya juga menyadari kalau subsidi memang jumlahnya terbatas."</i>

7	Anda sebagai masyarakat Desa Wonomulyo serta anggota kelompok tani apakah pernah diundang untuk menghadiri rapat musyawarah desa yang didalamnya terdapat pelaporan pertanggungjawaban BUMDes?	<i>“Oh belum kalau masalah itu. Setau saya kelompok tani belum pernah. Saya juga lupa apakah pernah tapi saya yang tidak hadir ya. Pokoknya sejauh ini masih belum pernah.”</i>
---	--	---

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara











Lampiran 4. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuraidah, M.S.A
NIP : 197612102009122001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Shinta Maulydia Sari
NIM : 19520011
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

**IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES**

Judul Skripsi : **(Studi Kasus BUMDes “ KARYA MULYA” Desa Wonomulyo Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS
PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
21%	20%	10%	10%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Juni 2023
UP2M



Zuraidah, M.S.A

Lampiran 5. Jurnal Bimbingan skripsi

13/06/23, 19.55

Print Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 19520011
Nama : Shinta Maulydia Sari
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES (Studi Kasus pada BUMDes
"KARYA MULYA" Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten
Malang)

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	20 Oktober 2022	Konsultasi judul skripsi	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
2	29 November 2022	Konsultasi perubahan judul skripsi dan objek penelitian	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
3	2 Desember 2022	Setor bab 1 dan bab 3	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
4	9 Desember 2022	Setor revisi bab 1 dan bab 3	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
5	6 Januari 2023	Setor bab 1,2, dan 3	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
6	9 Januari 2023	Konsultasi dan ACC proposal	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
7	5 Mei 2023	Konsultasi bab 4	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
8	30 Mei 2023	Setor bab 4 dan 5	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
9	5 Juni 2023	Konsultasi bab 4&5	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
10	9 Juni 2023	Setor Revisi Bab 4 Bagian Pembahasan	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi

11	12 Juni 2023	ACC Skripsi	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
----	--------------	-------------	--------------------	--------------------

Malang, 12 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA

Lampiran 6. Surat ijin penelitian skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
Website : www.uin-malang.ac.id Email : info@ui-malang.ac.id

Nomor : B-018/FEK.1/PP.00.9/04/2023 6 April 2023
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Yth. **Pimpinan BUMDes "Karya Mulya"**
Jalan Sangadi No.1 Dsn. Wates, Wonomulyo, Poncokusumo, Malang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Shinta Maulydia Sari
NIM : 19520011
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Contact Person : 085895148303
Judul Penelitian : Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Bumdes (Studi Kasus BUMDEs "Karya Mulya" Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Siswanto

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. SubKoordinator Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni,
4. Arsip.

Lampiran 7. Biodata Penulis

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Shinta Maulydia Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 05 Juni 2000
Alamat Asal : Dusun Wates Desa Wonomulyo Kec. Poncokusumo
No. Hp : 085895148303
E-mail : shintamaulydia9@gmail.com

Pendidikan Formal

2006-2007 : RA Sunan Ampel
2007-2013 : SDN Wonomulyo 01
2013-2016 : SMPN 01 Poncokusumo
2016-2019 : SMAN 01 Tumpang
2019-2023 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2019-2020 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang
2019-2020 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
2020-2021 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi : -

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019
- Peserta Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019

- Peserta *Accounting Gathering* Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019
- Peserta Pelatihan Manasik Haji Ma'Had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019
- Peserta Pelatihan ACCURATE Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022
- Peserta Pelatihan ATLAS Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022

Malang, 18 Mei 2023

Shinta Maulydia Sari